



LAPORAN KINERJA

TAHUN 2025

BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II PONTIANAK

Jl.A Yani II km 13

(0561) 575979

upt_pontianak@postel.go.id

[@balmon_pontianak](https://www.instagram.com/balmon_pontianak)



LAKIN 2025



KOMDIGI
Kementerian Komunikasi dan Digital
Republik Indonesia



**Direktorat Jenderal
Infrastruktur Digital**

RINGKASAN EKSEKUTIF



**BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO
KELAS II PONTIANAK**

RINGKASAN EKSEKUTIF

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Pontianak merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital, Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Balai Monitor SFR Kelas II Pontianak memiliki peran strategis dalam mendukung pengelolaan, pengawasan, dan pengendalian spektrum frekuensi radio serta perangkat telekomunikasi di wilayah Provinsi Kalimantan Barat guna menjamin pemanfaatan spektrum frekuensi radio yang tertib, efisien, bebas gangguan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Balai Monitor SFR Kelas II Pontianak melaksanakan kegiatan monitoring dan pengukuran spektrum frekuensi radio, inspeksi dan penertiban penggunaan frekuensi radio dan perangkat telekomunikasi, penanganan gangguan frekuensi radio, serta pelayanan publik di bidang spektrum frekuensi radio dan perangkat telekomunikasi. Selain itu, Balai Monitor SFR Kelas II Pontianak juga memberikan dukungan teknis dalam pengawasan dan penegakan hukum di bidang komunikasi dan digital, khususnya terkait penggunaan spektrum frekuensi radio dan perangkat telekomunikasi.

Pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2025–2029. Kementerian Komunikasi dan Digital mendukung Prioritas Nasional 1 melalui penguatan sistem komunikasi publik nasional dan peningkatan kualitas informasi publik, Prioritas Nasional 2 melalui pengembangan ekosistem digital guna mendorong pertumbuhan ekonomi digital nasional, Prioritas Nasional 3 melalui perluasan dan pengembangan infrastruktur digital guna memperkuat konektivitas digital nasional, serta Prioritas Nasional 7 melalui penguatan tata kelola pemerintahan guna mewujudkan pemerintahan digital yang terpadu. Dalam konteks tersebut, Balai Monitor SFR Kelas II Pontianak turut berkontribusi dalam menjaga kualitas dan keberlanjutan layanan komunikasi, penyiaran, dan konektivitas digital di wilayah Kalimantan Barat.

Kinerja Balai Monitor SFR Kelas II Pontianak juga mendukung pencapaian sasaran strategis Kementerian Komunikasi dan Digital Tahun 2025–2029, khususnya dalam mewujudkan Indonesia yang Terhubung, Tumbuh, dan Terjaga melalui penguatan konektivitas digital, pengembangan ekosistem digital nasional, serta penguatan ruang digital yang aman dan terpercaya. Selama Tahun 2025, berbagai program dan kegiatan yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja telah dilaksanakan dengan capaian yang secara umum memenuhi target yang telah ditetapkan. Ringkasan capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1 Target dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2025

No.	Kinerja (1)	Indikator Kinerja (2)	Target (3)	Realisasi (4)	Capaian (5)
1	Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban serta pelayanan publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi	1. Persentase (%) Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio	80% Kab/kota	125%	100%
		2. Persentase (%) Pemeriksaan Stasiun Radio	100%	100%	100%
		3. Persentase (%) Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio	95%	100%	100%
		4. Persentase (%) Tingkat Kepatuhan Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Digital	75%	100%	100%
		5. Persentase % Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring dari Stasiun Monitor Frekuensi Radio di UPT	85%	96.95%	114.06%
		6. Persentase (%) Penanganan Sanksi Denda Administratif	80%	99.39%	99.39%
		7. Persentase (%) Tersedianya Data Hasil Pengukuran Kualitas Layanan	100%	116.07%	116.07%
		8. Persentase (%) Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Operator Radio (UNAR, MOTS- IKRAN)	100%	116.67%	116.67%
		9. Persentase (%) Pelaksanaan Penanganan Piutang BHP Frekuensi Radio	100%	100%	100%
		10. Persentase (%) Sosialisasi Pelayanan Publik	100%	100%	100%
		11. Persentase (%) Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelayanan Publik (IKM/IPKP)	100%	117%	100%

		12. Persentase (%) Pelaksanaan Survey Integritas Pelayanan Publik (IIPP/IPAK)	100%	105%	100%
		13. Persentase (%) Tindak Lanjut Verifikasi Site ISR Microwave link yang Tidak Sesuai (PrimaAksi)	100%	100%	100%
2	Meningkatnya kualitas tata kelola birokrasi yang efektif dan efisien	1. Nilai Kinerja Anggaran Balai Monitor SFR Kelas II Pontianak	86.95%	83.82%	96.40%
		2. Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)	97%	100%	103.09%

Pencapaian kinerja Tahun 2025 merupakan hasil dari komitmen, sinergi, dan profesionalisme seluruh jajaran Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Pontianak dalam melaksanakan tugas pengawasan dan pengendalian spektrum frekuensi radio serta perangkat telekomunikasi. Kinerja tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung penguatan konektivitas digital nasional serta mewujudkan ekosistem komunikasi dan infrastruktur digital yang andal, aman, tertib, dan berkelanjutan. Uraian lebih lanjut mengenai capaian kinerja tersebut disajikan pada Bab III Laporan Kinerja ini.

Pada Sasaran Program I “**Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban serta pelayanan publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi**” yang terdapat 13 (tiga belas) Indikator Kinerja.

1. Persentase (%) Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio

Jumlah Kab/Kota di Kalimantan Barat adalah 14 Kab/Kota, disetiap kotanya telah dilakukan Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio. Capaian kegiatan tersebut adalah 100%.

2. Persentase (%) Pemeriksaan Stasiun Radio

Target Pemeriksaan Stasiun Radio meliputi sebagai berikut:

- Target Pemeriksaan Stasiun Radio MW *Link* secara *Open shelter*: 451
- Target Pemeriksaan Stasiun Radio MW *Link* secara *Remote Site*: 5443
- Target Radio FM: 56
- Target TV Digital: 11

Seluruh target pemeriksaan stasiun radio telah dilakukan seluruhnya, sehingga capaian kegiatan tersebut adalah 100%.

3. Persentase (%) Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio

Terdapat satu aduan gangguan spektrum frekuensi radio, dan Balmon Pontianak telah menangani seluruh gangguan tersebut. Capaian kegiatan Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio adalah 100%.

4. Persentase (%) Tingkat Kepatuhan Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Digital

Balmon Pontianak telah melaksanakan 18 kegiatan pengawasan alat dan/atau perangkat telekomunikasi dan memeriksa total 498 sampel perangkat telekomunikasi telah memiliki sertifikat di sepanjang Tahun 2025. Adapun persentase capaian target Tingkat Kepatuhan Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Digital adalah 100%.

5. Persentase (%) Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring dari Stasiun Monitor Frekuensi Radio di UPT

Jumlah perangkat utama siap pakai adalah 43 perangkat, dan jumlah perangkat pendukung siap pakai adalah 106 dan perangkat alat komunikasi yaitu 29. Terhitung sejak Bulan Januari hingga Desember 2025 perangkat tersebut siap digunakan. Sehingga persentase capaian target adalah 96.95% dengan capaian kinerja 114.06 %.

6. Persentase (%) Penanganan Sanksi Denda Administratif

Target Pada Tahun 2025 Total 33 *Invoice* sanksi denda administratif diterbitkan sebanyak 32 *Invoice* berstatus *Paid* (Lunas), sementara 1 *Invoice* yang berstatus *Not Paid* (Belum Lunas) masih dalam program keringanan pembayaran. Realisasi capaian pada indikator ini adalah 99.39%.

7. Persentase (%) Tersedianya Data Hasil Pengukuran Kualitas Layanan

Balmon Pontianak berhasil melaksanakan pengukuran kualitas layanan infrastruktur digital pada 13 Kab/Kota di Provinsi Kalimantan Barat, melampaui target 11 Kab/Kota. Pengukuran dilakukan melalui metode *Drive test* dan *Static test* sehingga capaian kinerja indikator ini adalah 116,07%.

8. Persentase (%) Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Operator Radio (UNAR, MOTS- IKRAN)

Pada tahun 2025, Balai Monitor SFR Kelas II Pontianak berhasil melaksanakan 7 kali Ujian Negara Amatir Radio (UNAR) dari target 6 kali kegiatan dengan total peserta sebanyak 49 orang, sehingga capaian kinerja mencapai 116,67%. Selain itu, sepanjang tahun 2025 telah diterbitkan sebanyak 44 ISR sebagai bentuk legalitas penggunaan perangkat radio oleh peserta yang telah lulus sertifikasi.

9. Persentase (%) Pelaksanaan Penanganan Piutang BHP Frekuensi Radio

Pelaksanaan penanganan piutang BHP Frekuensi Radio tahun 2025 oleh Balai Monitor SFR Kelas II Pontianak berhasil mencapai target sebesar 100%. Capaian ini menunjukkan bahwa pengelolaan piutang telah dilaksanakan secara efektif melalui kegiatan penagihan aktif, pemantauan berkala, serta penyampaian informasi kewajiban kepada pengguna secara proaktif guna menekan potensi munculnya piutang baru dan meningkatkan kepatuhan pembayaran PNBPNP.

10. Persentase (%) Sosialisasi Pelayanan Publik

Pelaksanaan sosialisasi pelayanan publik tahun 2025 dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat/perangkat telekomunikasi. Balai Monitor SFR Kelas II Pontianak berhasil melaksanakan dua kegiatan sosialisasi dengan total 126 peserta, sehingga capaian kinerja terealisasi sebesar 100%.

11. Persentase (%) Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelayanan Publik (IKM/IPKP)

Pelaksanaan Survei Kepuasan Pelayanan Publik (IKM/IPKP) tahun 2025 dilaksanakan sebagai evaluasi terhadap kualitas pelayanan publik sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan target nilai minimal 3,20 pada skala 4, Balai Monitor SFR Kelas II Pontianak berhasil memperoleh nilai IKM dan IPKP masing-masing sebesar 3,73, sehingga capaian kinerja terealisasi sebesar 100% dan menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat berada pada kategori sangat baik.

12. Persentase (%) Pelaksanaan Survey Integritas Pelayanan Publik (IIPP/IPAK)

Pelaksanaan Survei Integritas Pelayanan Publik (IIPP/IPAK) tahun 2025 dilakukan sebagai evaluasi kualitas pelayanan publik sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan target nilai minimal 3,60 pada skala 4, Balai Monitor SFR Kelas II Pontianak berhasil memperoleh nilai IIPP dan IPAK masing-masing sebesar 3,77, sehingga capaian kinerja terealisasi sebesar 100% dan menunjukkan kualitas pelayanan berada pada kategori sangat baik.

13. Persentase (%) Tindak Lanjut Verifikasi *Site* ISR *Microwave link* yang Tidak Sesuai (PrimaAksi)

Target capaian kinerja untuk indikator Tindak Lanjut Verifikasi *Site* ISR yang Tidak Sesuai (PrimaAksi) tahun 2025 ditetapkan sebesar 100%. Hingga akhir tahun 2025, Balai Monitor SFR Kelas II Pontianak berhasil menindaklanjuti seluruh 2.822 *site* ISR yang Tidak Sesuai (PrimaAksi), sehingga capaian kinerja terealisasi sebesar 100%.

Pada Sasaran Program II “**Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Birokrasi yang Efektif dan Efisien**” yang terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja.

1. Nilai Kinerja Anggaran Balmon Pontianak Tahun 2025

Pada tahun 2025, target Perjanjian Kinerja (PK) yang ditargetkan oleh Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital untuk Balmon Pontianak minimal memiliki capaian > 86,95. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kementerian Keuangan diketahui bahwa capaian Indikator hingga akhir Desember 2025 adalah 83,82.

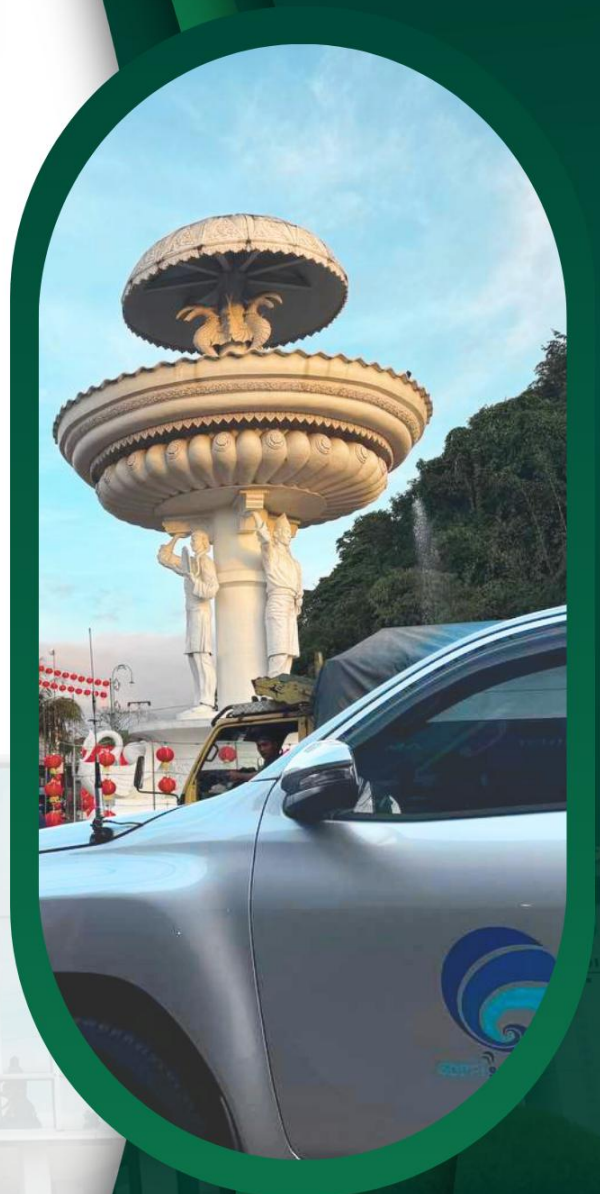
2. Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)

Pada Tahun Anggaran 2025, ditetapkan target capaian Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) sebesar 97. Berdasarkan data yang diperoleh diketahui bahwa realisasi Indikator hingga akhir Desember 2025 adalah 100, sehingga persentase capaian adalah sebesar 103.09%

LAKIN 2025



KATA PENGANTAR



BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO
KELAS II PONTIANAK

KATA PENGANTAR***Assalamu'alaikum Wr Wb***

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja Tahun 2025 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Pontianak dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Pontianak kepada publik, khususnya dalam menjalankan mandat sebagai Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital, Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Pontianak telah mencapai sasaran kegiatan, yaitu Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban serta pelayanan publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi serta meningkatnya kualitas tata kelola birokrasi yang efektif dan efisien. Seluruh pencapaian tersebut tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Pontianak sebagai instansi yang bertugas dalam mengawasi dan mengendalikan penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat perangkat telekomunikasi di wilayah Provinsi Kalimantan Barat.

Seluruh kinerja yang ditampilkan dalam laporan ini disusun sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2025–2029. Kementerian Komunikasi dan Digital mendukung Prioritas Nasional 1 melalui penguatan

sistem komunikasi publik nasional dan peningkatan kualitas informasi publik, Prioritas Nasional 2 melalui pengembangan ekosistem digital guna mendorong pertumbuhan ekonomi digital nasional, Prioritas Nasional 3 melalui perluasan dan pengembangan infrastruktur digital guna memperkuat konektivitas digital nasional, serta Prioritas Nasional 7 melalui penguatan tata kelola pemerintahan guna mewujudkan pemerintahan digital yang terpadu. Capaian kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Pontianak juga selaras dengan Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Digital Tahun 2025–2029 dalam mewujudkan Indonesia yang Terhubung, Tumbuh, dan Terjaga melalui penguatan konektivitas digital, pengembangan ekosistem digital nasional, serta penguatan ruang digital yang aman dan terpercaya.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan tugas Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Pontianak, baik dari internal Kementerian Komunikasi dan Digital maupun mitra kerja di tingkat daerah. Harapan kami, laporan ini tidak hanya menjadi dokumen pertanggungjawaban administratif, tetapi juga menjadi cerminan komitmen kami dalam menjaga keandalan ekosistem komunikasi nasional serta mendukung transformasi digital Indonesia.

Pontianak, Mei 2026

Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio
Kelas II Pontianak

Indra Sofany

LAKIN 2025

DAFTAR

ISI



KOMDIGO
Kementerian Komunikasi dan Digital
Republik Indonesia



DJO
Direktorat Jenderal
Infrastruktur Digital



BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO
KELAS II PONTIANAK

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF.....	i
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI	2
C. POTENSI DAN PERMASALAHAN STRATEGIS	4
D. SISTEMATIKA PELAPORAN	5
BAB II PERJANJIAN KINERJA	8
A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029	8
B. SASARAN PROGRAM	10
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	13
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	13
SASARAN 1 MENINGKATKAN LAYANAN MONITORING, PENGUKURAN, INSPEKSI, PENERTIBAN SERTA PELAYANAN PUBLIK SPEKTRUM FREKUENSI RADIO DAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI	14
IK-1 Persentase (%) Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio	15
IK-2 Persentase (%) Pemeriksaan Stasiun Radio	27
IK-3 Persentase (%) Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio	42
IK-4 Persentase (%) Tingkat Kepatuhan Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Digital	49
IK-5 Persentase (%) Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring dari Stasiun Monitor Frekuensi Radio di UPT	59
IK-6 Persentase (%) Penanganan Sanksi Denda Administratif	69
IK-7 Persentase (%) Tersedianya Data Hasil Pengukuran Kualitas Layanan	79
IK-8 Persentase (%) Penyelenggaraan layanan Sertifikasi Operator Radio (UNAR- MOTS-IKRAN)	90
IK-9 Persentase (%) Pelaksanaan Penanganan Piutang BHP Frekuensi Radio	98
IK-10 Persentase (%) Sosialisasi Pelayanan Publik	107
IK-11 Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelayanan Publik (IKM/IPKP)	115

IK-12 Persentase (%) Pelaksanaan Survey Integritas Pelayanan Publik (IIPP/IPAK) .	123
IK-13 Persentase (%) Tindak Lanjut Verifikasi <i>Site</i> <i>ISR Microwave link</i> yang Tidak Sesuai (PrimaAksi)	131
SASARAN 2 MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA BIROKRASI YANG EFEKTIF DAN EFISIEN	141
IK 14 Nilai Kinerja Anggaran Balai Monitor SFR Kelas II Pontianak.....	141
IK 15 Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)	145
B. KINERJA LAINNYA	148
I. LAYANAN ADMINISTRASI KETATAUSAHAAN	148
II. LAYANAN PENGELOLAAN BMN	148
III. LAYANAN PENATAUSAHAAN KEPEGAWAIAN	149
IV. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI BALMON PONTIANAK	152
V. PENGHARGAAN DAN PRESTASI	153
C. REALISASI ANGGARAN.....	154
BAB IV PENUTUP	156
LAMPIRAN.....	158

LAKIN 2025



KOMDIGO
Kementerian Komunikasi dan Digital
Republik Indonesia



**Direktorat Jenderal
Infrastruktur Digital**

DAFTAR TABEL



BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO
BALAI MONITOR
KELAS II PONTIANAK

DAFTAR TABEL

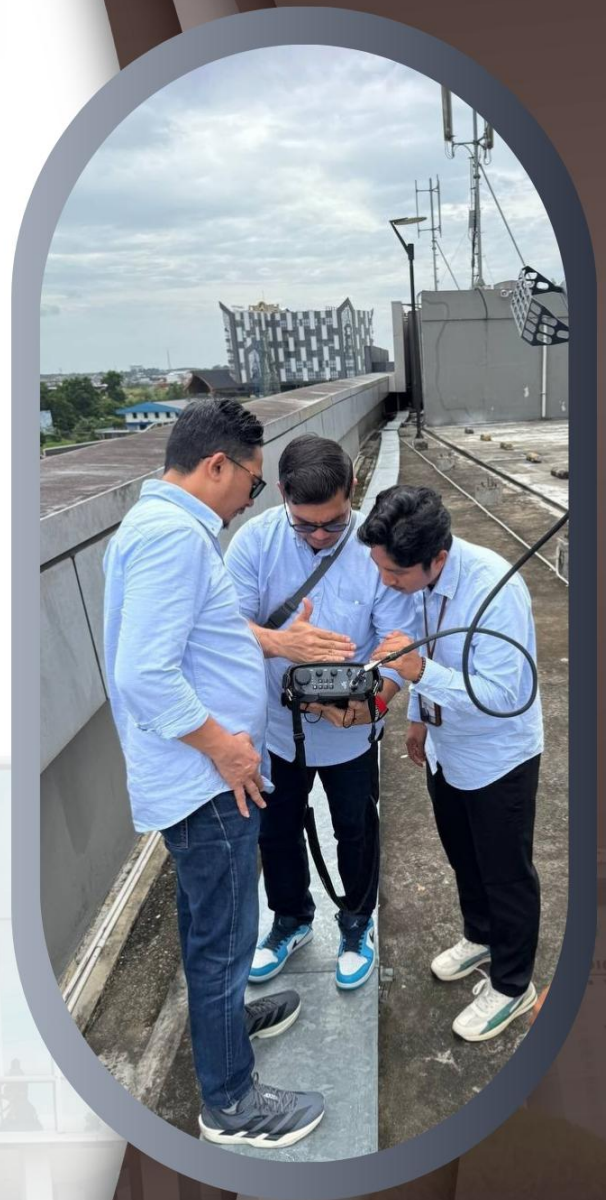
Tabel 1 Target dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2025.....	ii
Tabel 2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	10
Tabel 3 Capaian Kinerja Tahun 2025.....	13
Tabel 4 Capaian monitoring penggunaan spektrum frekuensi radio di Kabupaten/Kota.....	16
Tabel 5 Perbandingan Target dan Capaian Indikator Kinerja (IK-1) 2022-2025.....	17
Tabel 6 Jumlah Frekuensi Termonitor per Kabupaten/Kota Termonitor Tahun 2025.....	17
Tabel 7 Total Frekuensi Termonitor per Kabupaten/Kota.....	18
Tabel 8 Jumlah Legalitas Frekuensi Termonitor per Kabupaten/Kota	19
Tabel 9 Jumlah Frekuensi Termonitor berdasarkan Dinas dan <i>Subservice</i> Wilayah Perbatasan Tahun 2025	21
Tabel 10 <i>Benchmark</i> Capaian Kinerja (IK-1) dengan UPT Lain.....	22
Tabel 11 Capaian Pemeriksaan Stasiun Radio	28
Tabel 12 Perbandingan Target dan Capaian Indikator Kinerja (IK-2) 2022-2025.....	28
Tabel 13 Capaian persentase % pemeriksaan stasiun radio berdasarkan sub indikator	29
Tabel 14 <i>Benchmark</i> Capaian Kinerja (IK-2) dengan UPT Lain.....	37
Tabel 15 Capaian Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio Tahun 2025.....	43
Tabel 16 Perbandingan Target dan Capaian Indikator Kinerja (IK-3) 2022-2025.....	43
Tabel 17 Aduan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio Tahun 2025	44
Tabel 18 <i>Benchmark</i> Capaian Kinerja (IK-3) dengan UPT Lain.....	44
Tabel 19 Capaian Tingkat Kepatuhan Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Digital.....	50
Tabel 20 Target Jenis Perangkat Prioritas	50
Tabel 21 Pelaksanaan Kegiatan Tingkat Kepatuhan Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Digital.....	52
Tabel 22 Perbandingan Target dan Capaian Indikator Kinerja (IK-4) 2022-2025.....	53
Tabel 23 <i>Benchmark</i> Capaian Kinerja (IK-4) dengan UPT Lain.....	54
Tabel 24 Capaian Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring dari Stasiun Monitor Frekuensi Radio di UPT.....	59
Tabel 25 Perbandingan Target dan Capaian Indikator Kinerja (IK-5) 2022-2025.....	60
Tabel 26 Lokasi Stasiun Tetap Balmon Pontianak	60
Tabel 27 Realisasi Capaian Bulanan terjaganya operasional dan fungsi monitoring dari stasiun monitor frekuensi radio di UPT	61
Tabel 28 <i>Benchmark</i> Capaian Kinerja (IK-5) dengan UPT Lain.....	63

Tabel 29 Capaian Penanganan Sanksi Denda Administratif.....	70
Tabel 30 Data Periode Tagihan Sanksi Denda Administratif.....	72
Tabel 31 Lokasi Pelaksanaan Penanganan Sanksi Denda Administratif.....	72
Tabel 32 Perbandingan Capaian Tagihan Sanksi Denda Administratif	73
Tabel 33 Perbandingan Target dan Capaian Indikator Kinerja (IK-6) 2022-2025.....	74
Tabel 34 <i>Benchmark</i> Capaian Kinerja (IK-6) dengan UPT Lain.....	74
Tabel 35 Capaian Tersedianya Data Hasil Pengukuran Kualitas Layanan.....	80
Tabel 36 Pelaksanaan Kegiatan Pengukuran Kualitas Layanan Infrastruktur Digital UPT Balmon Pontianak Tahun 2025	81
Tabel 37 Perbandingan Target dan Capaian Indikator Kinerja (IK-7) 2022-2025.....	83
Tabel 38 <i>Benchmark</i> Capaian Kinerja (IK-7) dengan UPT Lain.....	83
Tabel 39 Capaian Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Operator Radio.....	90
Tabel 40 Perbandingan Target dan Capaian Indikator Kinerja (IK-8) 2022-2025.....	91
Tabel 41 Rincian Peserta UNAR Tahun 2025 Balmon Pontianak.....	91
Tabel 42 Rincian Jumlah ISR Tahun 2025 Balmon Pontianak.....	93
Tabel 43 <i>Benchmark</i> Capaian Kinerja (IK-8) dengan UPT Lain.....	94
Tabel 44 Capaian Pelaksanaan Penanganan Piutang BHP Frekuensi Radio.....	99
Tabel 45 Perbandingan Target dan Capaian Indikator Kinerja (IK-9) 2022-2025.....	100
Tabel 46 Rekap Laporan BHP Piutang PPNTD 2025	101
Tabel 47 <i>Benchmark</i> Capaian Kinerja (IK-9) dengan UPT Lain.....	103
Tabel 48 Capaian Pelaksanaan Sosialisasi Pelayanan Publik.....	108
Tabel 49 Hasil Capaian Pelaksanaan Sosialisasi Publik.....	109
Tabel 50 Perbandingan Target dan Capaian (IK-10) Sosialisasi Pelayanan Publik	111
Tabel 51 <i>Benchmark</i> capaian kinerja (IK-10) dengan UPT lain	112
Tabel 52 Capaian Pelaksanaan Survei Kepuasan Pelayanan Publik (IKM / IPKP).....	116
Tabel 53 Hasil Capaian Pelaksanaan Survei IKM / IPKP Tahun 2025	117
Tabel 54 Capaian Nilai Indeks pada 9 Kategori Survei IKM.....	118
Tabel 55 Perbandingan Target dan Capaian (IK-11) Survei (IKM/IPKP).....	119
Tabel 56 <i>Benchmark</i> capaian kinerja (IK-11) dengan UPT lain	120
Tabel 57 Capaian Pelaksanaan Survei Integritas Pelayanan Publik (IIPP / IPAK).....	124
Tabel 58 Hasil Capaian Pelaksanaan Survei IIPP / IPAK Tahun 2025.....	124
Tabel 59 Capaian Nilai Indeks pada 5 Kategori Survei IIPP	125
Tabel 60 Perbandingan Target dan Capaian (IK-12) Survei IIPP/IPAK.....	126
Tabel 61 <i>Benchmark</i> capaian kinerja (IK-12) dengan UPT lain	127

Tabel 62 Capaian Tindak Lanjut Verifikasi <i>Site</i> ISR <i>Microwave link</i> yang Tidak Sesuai (PrimaAksi) Tahun 2025	132
Tabel 63 Capaian Tindak Lanjut Verifikasi ISR <i>Microwave link</i> yang Tidak Sesuai (PrimaAksi) Tahun 2025	133
Tabel 64 Data Sebaran verifikasi <i>site</i> operator seluler di wilayah Kalimantan Barat Tahun 2025	134
Tabel 65 Perbandingan Target dan Capaian (IK-13) Tindak Lanjut Verifikasi Ketidaksesuaian Data ISR (Prima Aksi).....	135
Tabel 66 <i>Benchmark</i> Capaian Kinerja (IK-13) dengan UPT Lain.....	136
Tabel 67 Capaian Nilai Kinerja Anggaran UPT Balmon Pontianak Tahun 2025	142
Tabel 68 Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja (IK-14) 2022-2025	143
Tabel 69 <i>Benchmark</i> Capaian Kinerja (IK-14) dengan UPT Lain.....	143
Tabel 70 Capaian Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA).....	145
Tabel 71 Perbandingan Target dan Capaian Indikator Kinerja (IK-15) 2022-2025.....	146
Tabel 72 <i>Benchmark</i> Capaian Kinerja (IK-15) dengan UPT Lain.....	146
Tabel 73 Data Kenaikan Gaji Berkala (KGB) Pegawai TA. 2025 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Pontianak	149
Tabel 74 Data Kenaikan Pangkat (KP) Pegawai TA. 2025 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Pontianak	150
Tabel 75 Data Kenaikan Pangkat sekaligus Kenaikan Jabatan Pegawai TA. 2025 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Pontianak	151
Tabel 76 Penerapan Manajemen Risiko di Balmon Pontianak	152
Tabel 77 Pagu dan Realisasi per Jenis Belanja Tahun 2025	154

LAKIN 2025

DAFTAR GAMBAR



BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO
KELAS II PONTIANAK

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Bagan Struktur Organisasi UPT Balmon Kelas II	3
Gambar 2 Peta Wilayah Kerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Pontianak (Kalimantan Barat)	5
Gambar 3 Grafik jumlah frekuensi termonitor berdasarkan Kabupaten/Kota	18
Gambar 4 Grafik jumlah frekuensi termonitor berdasarkan Pita Frekuensi	19
Gambar 5 Kegiatan monitoring Spektrum Frekuensi Radio	26
Gambar 6 Dokumentasi kegiatan pemeriksaan stasiun radio <i>Microwave link</i>	30
Gambar 7 Grafik Target Vs Realisasi Pemeriksaan Stasiun Radio <i>Microwave link (Remote Site Dan Open shelter)</i>	31
Gambar 8 Grafik Hasil Pemeriksaan Stasiun Radio <i>Microwave link Open shelter</i> dan <i>Remote Site</i> di Kab/Kota Kalbar	31
Gambar 9 Grafik Hasil Pemeriksaan Stasiun Radio <i>Microwave link</i> per Operator Seluler	32
Gambar 10 Pelaporan pemeriksaan stasiun radio <i>Microwave link</i> secara <i>Open shelter</i> di APSTARD	32
Gambar 11 Pelaporan pemeriksaan stasiun radio <i>Microwave link</i> secara <i>Remote Site</i> di APSTARD	33
Gambar 12 Dokumentasi Kegiatan Pengukuran Stasiun Radio FM	33
Gambar 13 Grafik Target Vs Realisasi Pemeriksaan Stasiun Radio FM Di Kalimantan Barat	34
Gambar 14 Grafik Sebaran Stasiun Penyiaran Radio FM di Provinsi Kalimantan Barat	34
Gambar 15 Capaian pengukuran stasiun penyiaran Radio FM Balmon Pontianak di aplikasi APSTARD	35
Gambar 16 Status Operasional dan Kepatuhan Teknis Stasiun Penyiaran Radio FM Tahun 2025	35
Gambar 17 Dokumentasi Kegiatan Pengukuran Stasiun Penyiaran TV Digital	36
Gambar 18 Grafik Target vs Realisasi Pemeriksaan Stasiun TV Digital di Kalimantan Barat	36
Gambar 19 Grafik Sebaran Stasiun Mux TV Digital di Provinsi Kalimantan Barat	37
Gambar 20 Dokumentasi Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio	48
Gambar 21 Grafik Kategori Pengguna Perangkat	51
Gambar 22 Grafik Sebaran Wilayah Penggunaan Perangkat	51
Gambar 23 Kegiatan Pemantauan Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Digital	58

Gambar 24 Grafik capaian SLA pada IK-5.....	62
Gambar 25 Kegiatan inspeksi dan pemeliharaan stasiun <i>transportable</i>	68
Gambar 26 Grafik <i>Invoice</i> Sanksi Denda Tahun 2025	71
Gambar 27 Jenis Pelanggaran Pada <i>Sub Service</i>	71
Gambar 28 Kegiatan pengenaan sanksi denda administratif	78
Gambar 29 Grafik Pelaksanaan Pengukuran Kualitas Layanan Infrastruktur Digital Wilayah Kalimantan Barat Sepanjang Tahun 2025	82
Gambar 30 Kegiatan pengukuran kualitas layanan Infrastruktur Digital	89
Gambar 31 Grafik jumlah peserta UNAR Tahun 2025	92
Gambar 32 Grafik Tren Penertiban ISR Per Bulan Tahun 2025	93
Gambar 33 Pelaksanaan UNAR di Balmon Pontianak	97
Gambar 34 Pelaksanaan Penanganan Piutang BHP Frekuensi Radio	106
Gambar 35 Sosialisasi Permen Komdigi No. 2 Tahun 2025 bersama APJII dan Penyelenggara Jasa Internet di Kalimantan Barat.....	110
Gambar 36 Sosialisasi Pengawasan SFR dan APT di Kota Pontianak, 13 November 2025	111
Gambar 37 Distribusi responden berdasarkan usia, jenis kelamin, jenis layanan, dan pendidikan terakhir.....	117
Gambar 38 Pelayanan di Kantor Balai Monitor SFR Kelas II Pontianak.....	122
Gambar 39 Distribusi responden berdasarkan kategori usia, jenis layanan, jenis kelamin, dan pendidikan terakhir	125
Gambar 40 Pelayanan di Balmon SFR Kelas II Pontianak.....	130
Gambar 41 Grafik Pelaksanaan Kegiatan Tindak Lanjut Verifikasi ISR <i>Microwave link</i> yang Tidak Sesuai (PrimaAksi) Per Triwulan Tahun 2025	133
Gambar 42 Dokumentasi Kegiatan Tindak Lanjut Verifikasi ISR <i>Microwave link</i> yang Tidak Sesuai (PrimaAksi)	134
Gambar 43 DIPA Baru (694713)	141
Gambar 44 DIPA Lama (654137).....	142

LAKIN 2025



KOMDIGI
Kementerian Komunikasi dan Digital
Republik Indonesia



DJID
Direktorat Jenderal
Infrastruktur Digital

BAB I

PENDAHULUAN



BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO
KELAS II PONTIANAK

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Pontianak merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital yang memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan pengawasan, pengendalian, penertiban, serta pelayanan di bidang spektrum frekuensi radio pada wilayah kerja Kalimantan Barat. Sebagai garda terdepan dalam menjaga ketertiban pemanfaatan frekuensi radio, Balai Monitor SFR Kelas II Pontianak terus berupaya menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif, profesional, dan akuntabel guna mendukung pencapaian target kinerja organisasi sesuai indikator yang telah ditetapkan.

Perkembangan teknologi digital, telekomunikasi, dan sistem komunikasi nirkabel yang semakin pesat dari tahun ke tahun menyebabkan kebutuhan terhadap spektrum frekuensi radio terus meningkat. Spektrum frekuensi radio menjadi sumber daya terbatas yang memiliki peranan vital dalam mendukung berbagai sektor, mulai dari komunikasi publik, penyiaran, transportasi, keamanan, hingga layanan pemerintahan berbasis digital. Oleh karena itu, pemanfaatannya perlu dikelola secara tertib, efisien, dan sesuai regulasi agar terhindar dari gangguan interferensi yang dapat menghambat kualitas layanan komunikasi. Mengingat karakteristik gelombang radio yang dapat melintasi batas geografis, pengawasan dan pengendalian yang konsisten menjadi faktor utama dalam menjaga keteraturan penggunaannya.

Dalam rangka menjamin pengelolaan spektrum frekuensi radio yang optimal, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital diberikan mandat untuk melaksanakan pengawasan dan pengendalian penggunaan frekuensi radio sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Balai Monitor SFR Kelas II Pontianak sebagai bagian dari struktur tersebut menjalankan fungsi strategis dalam memastikan penggunaan spektrum frekuensi radio di wilayah Kalimantan Barat berlangsung sesuai perizinan, bebas dari gangguan, serta mampu mendukung pembangunan nasional di sektor digital dan telekomunikasi.

Penyusunan Laporan Kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Pontianak Tahun 2025 merupakan bentuk akuntabilitas atas pelaksanaan program dan kegiatan selama satu tahun anggaran, sekaligus sebagai media evaluasi terhadap capaian sasaran strategis organisasi. Laporan ini disusun untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Monitor, termasuk efektivitas kebijakan, efisiensi penggunaan sumber daya, serta kontribusi nyata terhadap pencapaian visi dan misi organisasi.

Melalui Laporan Kinerja ini, diharapkan Balai Monitor SFR Kelas II Pontianak dapat mengidentifikasi berbagai keberhasilan yang telah dicapai maupun tantangan yang masih dihadapi, sehingga dapat menjadi dasar dalam merumuskan langkah-langkah strategis untuk peningkatan kualitas kinerja pada tahun-tahun berikutnya. Dengan demikian, laporan ini tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan, tetapi juga sebagai instrumen perencanaan dan perbaikan berkelanjutan guna mewujudkan tata kelola spektrum frekuensi radio yang semakin efektif, tertib, dan profesional.

B. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

Tugas, fungsi, dan struktur organisasi Balai Monitor SFR Kelas II Pontianak sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio.

Balai Monitor SFR Kelas II Pontianak mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian bidang penggunaan spektrum frekuensi radio. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Balai Monitor SFR Kelas II Pontianak menyelenggarakan :

- Penyusunan rencana dan program;
- Pelaksanaan pengamatan, deteksi lokasi sumber pancaran, dan pemantauan spektrum frekuensi radio;
- Penertiban dan penyidikan pelanggaran terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio dan standard perangkat pos dan informatika;
- Pelaksanaan pengukuran dan validasi data penggunaan spektrum frekuensi radio;

- Penyampaian Izin Stasiun Radio dan Surat pemberitahuan Pembayaran Biaya Hak Pengguna Frekuensi serta pendampingan penyelesaian piutang Biaya Hak Pengguna frekuensi radio;
- Pelayanan pengaduan masyarakat terhadap gangguan spektrum frekuensi radio;
- Pelaksanaan, perbaikan, dan pemeliharaan perangkat monitor frekuensi radio;
- Pelaksanaan ujian amatir radio; dan
- Pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat Unit Pelaksana Teknis bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio.

Struktur Organisasi Balai Monitor SFR Kelas II Pontianak terdiri dari :

- Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio merupakan Jabatan Pengawas atau jabatan struktural.
- Sub Bagian Umum bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas-tugas administratif dan umum yang merupakan Tim Kerja Tata Usaha dan Rumah Tangga.
- Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Monitor Bidang Spektrum Frekuensi Radio.



Gambar 1 Bagan Struktur Organisasi UPT Balmon Kelas II

C. POTENSI DAN PERMASALAHAN STRATEGIS

Wilayah Kalimantan Barat memiliki posisi strategis sebagai salah satu provinsi terluas di Indonesia yang berada di bagian barat Pulau Kalimantan serta berbatasan langsung dengan Sarawak, Malaysia Timur. Letak geografis tersebut menjadikan Kalimantan Barat memiliki peran penting dalam pengawasan dan pengendalian spektrum frekuensi radio, khususnya dalam mendukung komunikasi lintas wilayah dan lintas negara. Dengan luas wilayah sekitar 146.807 km² yang terdiri dari 2 kota dan 12 kabupaten, serta garis perbatasan darat internasional sepanjang $\pm$ 850 km, Kalimantan Barat memiliki potensi besar dalam pengembangan layanan telekomunikasi, penyiaran, transportasi, keamanan perbatasan, dan konektivitas digital nasional. Posisi ini juga memberikan peluang strategis bagi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Pontianak untuk memperkuat pengawasan spektrum dalam rangka menjaga kedaulatan frekuensi nasional dan mendukung transformasi digital hingga ke wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal.

Perkembangan teknologi informasi, digitalisasi layanan publik, serta meningkatnya penggunaan perangkat komunikasi nirkabel pada tahun 2025 turut mendorong tingginya kebutuhan masyarakat terhadap pemanfaatan spektrum frekuensi radio yang tertib, efisien, dan bebas gangguan. Pertumbuhan sektor telekomunikasi di wilayah Kalimantan Barat, termasuk pembangunan infrastruktur digital dan peningkatan aktivitas ekonomi berbasis teknologi, menjadi potensi besar yang harus diimbangi dengan pengawasan yang optimal agar penggunaan spektrum frekuensi radio tetap sesuai ketentuan perizinan dan regulasi yang berlaku.

Namun demikian, di tengah potensi tersebut masih terdapat sejumlah permasalahan strategis yang menjadi tantangan dalam pelaksanaan tugas Balai Monitor SFR Kelas II Pontianak. Wilayah kerja yang luas dengan karakteristik geografis yang beragam, meliputi daerah perkotaan, pedalaman, pesisir, serta kawasan perbatasan, menjadi kendala tersendiri dalam menjangkau seluruh titik pengawasan secara merata. Selain itu, masih ditemukan penggunaan perangkat telekomunikasi ilegal, potensi interferensi frekuensi akibat penggunaan yang tidak sesuai izin, keterbatasan infrastruktur pengawasan di beberapa wilayah terpencil, serta kebutuhan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan teknologi monitoring yang adaptif terhadap perkembangan teknologi komunikasi modern.

Kondisi perbatasan negara juga menghadirkan tantangan khusus berupa potensi penggunaan frekuensi lintas batas yang dapat menimbulkan interferensi dari negara tetangga apabila tidak dilakukan koordinasi dan pengawasan secara intensif. Oleh karena itu, penguatan strategi pengawasan, penertiban perangkat ilegal, optimalisasi sarana prasarana monitoring, peningkatan kompetensi SDM, serta sinergi dengan instansi terkait menjadi langkah penting dalam menghadapi dinamika pengelolaan spektrum frekuensi radio pada tahun 2025.

Dengan memperhatikan berbagai potensi dan permasalahan strategis tersebut, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Pontianak dituntut untuk terus meningkatkan efektivitas kinerja organisasi melalui pengawasan yang profesional, responsif, dan berbasis teknologi guna memastikan pemanfaatan spektrum frekuensi radio di Kalimantan Barat berjalan tertib, aman, serta mampu mendukung pembangunan nasional dan konektivitas digital yang berkelanjutan.



Gambar 2 Peta Wilayah Kerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Pontianak (Kalimantan Barat)

D. SISTEMATIKA PELAPORAN

Penyusunan LAKIN 2025 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Pontianak mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Ruang lingkup LAKIN 2025 Balmon SFR Kelas II Pontianak mencakup pendahuluan yang memuat gambaran umum organisasi, aspek strategis, serta permasalahan utama; perencanaan kinerja yang berisi ringkasan perjanjian kinerja tahun berjalan; akuntabilitas kinerja yang menyajikan capaian kinerja dan realisasi anggaran; serta penutup yang memuat kesimpulan dan langkah strategis untuk peningkatan kinerja pada periode selanjutnya.

LAKIN 2025



KOMDIGI
Kementerian Komunikasi dan Digital
Republik Indonesia

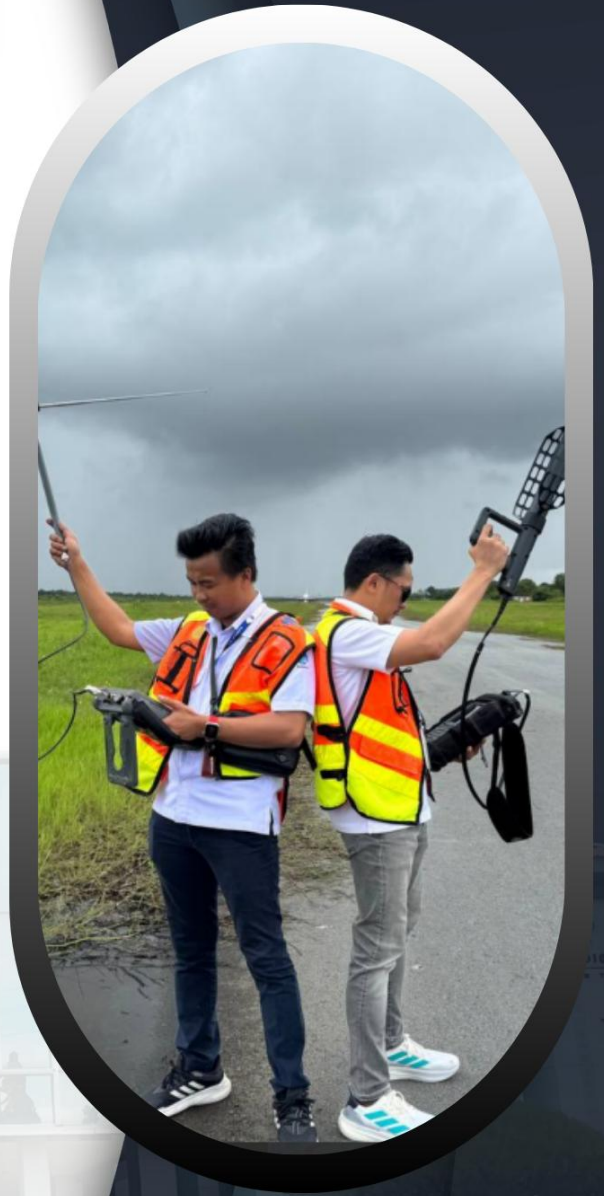


**Direktorat Jenderal
Infrastruktur Digital**

BAB II

PERJANJIAN

KINERJA



BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO
KELAS II PONTIANAK

BAB II

PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029

Dalam rangka mendukung visi pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, yaitu “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menetapkan arah strategis yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Komdigi Tahun 2025-2029.

Renstra tersebut menjadi acuan utama bagi seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Komdigi, termasuk Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Pontianak, dalam menetapkan sasaran kinerja, program, dan kegiatan yang berkontribusi terhadap pencapaian target nasional.

Arah Kebijakan dan Tujuan Strategis

Dalam dokumen Renstra, Kementerian Komdigi mengidentifikasi 3 (tiga) tujuan strategis utama yang secara langsung relevan dengan tugas dan fungsi pengelolaan spektrum frekuensi radio, yaitu:

1. Mempercepat Penyediaan Konektivitas, *Broadband* Inklusif, Berkualitas, dan Terjangkau;
2. Mempercepat Penyediaan Sistem dan Jaringan Komunikasi untuk Layanan Khusus Secara Nasional; dan
3. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Layanan Publik Kemenkomdigi; serta
4. Mewujudkan Transformasi Internal Manajemen Adaptif dan Resilien.

Sasaran Strategis Terkait Balai Monitor

Sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital (Ditjen Infradigi), Kantor Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Pontianak memiliki tanggung jawab untuk mendukung Indikator Kinerja Program Ditjen Infradigi yaitu Pengembangan dan Penguatan Infrastruktur Digital, di antaranya:

- Kecepatan Internet Jaringan Pita Lebar Bergerak (*Mobile Broadband*);
- Kecepatan Internet Jaringan Pita Lebar Tetap (*Fixed Broadband*); dan
- Realisasi Penerimaan PNBPN Bidang Infrastruktur Digital.

Seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Balai Monitor selama Tahun 2025 telah diselaraskan dengan program tersebut, dan dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Dengan pendekatan *outcome-based*, capaian kinerja instansi diukur berdasarkan kontribusinya terhadap efektivitas pengawasan frekuensi dan perangkat, serta peningkatan layanan publik di bidang komunikasi dan digital.

Kontribusi terhadap Prioritas Nasional

Kantor Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Pontianak selain mendukung Visi Misi Komdigi “Mewujudkan Transformasi Digital Bermakna Menuju Kedaulatan dan Kemandirian Digital” juga mendukung RPJMN 2025-2029 dalam Bidang Komunikasi dan Digital dimana transformasi digital menjadi salah satu pilar utama untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, dengan target meningkatkan peringkat Indeks Daya Saing Digital Global ke posisi 40 pada tahun 2029. Peran transformasi digital terintegrasi ke seluruh Prioritas Nasional, mencakup peningkatan kualitas infrastruktur TIK, penguatan SDM digital, digitalisasi sektor ekonomi dan layanan publik, penguatan keamanan siber, pengembangan riset, serta pengembangan super platform digital. Sejalan dengan agenda tersebut, kebijakan komunikasi publik dan media diarahkan untuk memperkuat pers dan media massa, membangun sistem komunikasi yang inklusif, serta memastikan kesetaraan masyarakat dalam memperoleh informasi publik.

Sebagai salah satu bagian dari perwujudan prioritas nasional di atas, Kantor Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Pontianak mengemban tugas dalam pengawasan spektrum frekuensi radio, penertiban perangkat ilegal, serta pelayanan konsultasi teknis kepada masyarakat dan instansi, khususnya dalam konteks pengurangan interferensi yang mengganggu layanan komunikasi penting dan penyelamatan jiwa.

Dengan demikian, seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2025 tidak hanya berkontribusi terhadap pencapaian target internal Kementerian Komdigi, tetapi juga terhadap tujuan pembangunan nasional secara menyeluruh.

B. SASARAN PROGRAM

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Pontianak sebagai Unit Pelaksana Teknis Ditjen Infradigi berperan langsung dalam mendukung pencapaian sasaran-sasaran tersebut melalui pelaksanaan tugas pokok. Seluruh program dan kegiatan yang dilakukan selama Tahun 2025 telah dirancang dan dilaksanakan secara sejalan dengan sasaran strategis tersebut, sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025, dan hasil capaiannya disampaikan dalam laporan ini secara transparan dan akuntabel.

Adapun Sasaran Kinerja Balai Monitor SFR Kelas II Pontianak Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban serta pelayanan publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi.
2. Meningkatnya kualitas tata kelola birokrasi yang efektif dan efisien.

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Sebagai bagian dari Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital, maka Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Pontianak memiliki peran dalam mencapai beberapa target indikator kinerja.

Perjanjian Kinerja ditandatangani oleh Kepala Balmon dan Atasan Langsung yang memuat 15 indikator kinerja, terdiri dari 13 indikator teknis dan 2 indikator tata kelola. Capaian terhadap indikator ini diukur secara kuantitatif dan dijadikan dasar evaluasi kinerja tahunan. Sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja Ditjen Infradigi tahun 2025 dapat disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No	Kinerja (1)	Indikator Kinerja (2)	Target (3)
1.	Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban serta pelayanan publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi	1. Persentase (%) Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio	80%
		2. Persentase (%) Pemeriksaan Stasiun Radio	100%
		3. Persentase (%) Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio	95%
		4. Persentase (%) Tingkat Kepatuhan Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Digital	75%

		5. Persentase (%) Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring dari Stasiun Monitor Frekuensi Radio di UPT	85%
		6. Persentase (%) Penanganan Sanksi Denda Administratif	80%
		7. Persentase (%) Tersedianya Data Hasil Pengukuran Kualitas Layanan	100%
		8. Persentase (%) Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Operator Radio (UNAR, MOTS-IKRAN)	100%
		9. Persentase (%) Pelaksanaan Penanganan Piutang BHP Frekuensi Radio	100%
		10. Persentase (%) Sosialisasi Pelayanan Publik	100%
		11. Persentase (%) Survey Kepuasan Pelayanan Publik (IKM/IPKP)	100%
		12. Persentase (%) Survey Integritas Pelayanan Publik (IIPP/IPAK)	100%
		13. Persentase (%) Tindak Lanjut Verifikasi <i>Site</i> ISR <i>Microwave link</i> yang tidak sesuai (PrimaAksi)	100%
	2. Meningkatnya kualitas tata kelola Ditjen Infrastruktur Digital yang Efektif dan Efisien	1. Nilai Kinerja Anggaran Balai Monitor SFR Kelas II Pontianak	86,95%
		2. Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)	97%

LAKIN 2025



KOMDIGI
Kementerian Komunikasi dan Digital
Republik Indonesia

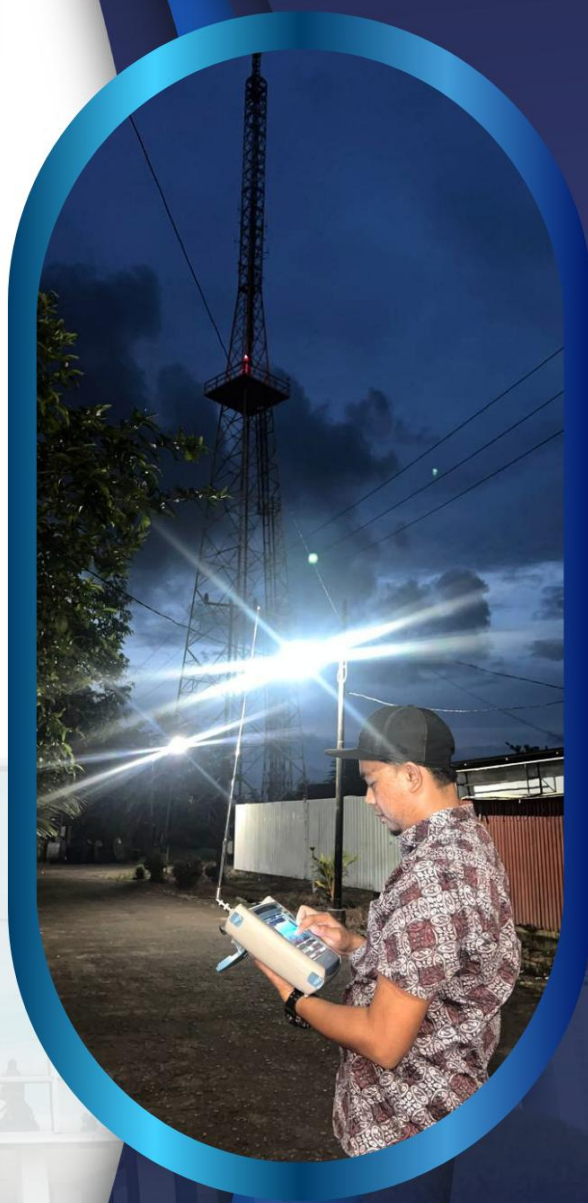


**Direktorat Jenderal
Infrastruktur Digital**

BAB III

AKUNTABILITAS

KINERJA



BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO
KELAS II PONTIANAK

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Selama Tahun Anggaran 2025, Kantor Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Pontianak telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Secara umum, pelaksanaan kinerja berjalan sesuai dengan rencana dan seluruh indikator kinerja utama (IKU) telah mencapai target.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Realisasi kinerja ini menunjukkan bahwa Kantor Balmon Kelas II Pontianak telah bekerja secara efektif dalam menjalankan fungsi pengawasan spektrum frekuensi radio dan perangkat telekomunikasi, serta memberikan layanan publik yang berkualitas. Indikator kinerja, target, dan capaian kinerja tahun 2025 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3 Capaian Kinerja Tahun 2025

No.	Kinerja (1)	Indikator Kinerja (2)	Target (3)	Realisasi (4)	Capaian (5)
1	Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban serta pelayanan publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi	1. Persentase (%) Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio	80% Kab/kota	125%	100%
		2. Persentase (%) Pemeriksaan Stasiun Radio	100%	100%	100%
		3. Persentase (%) Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio	95%	100%	100%
		4. Persentase (%) Tingkat Kepatuhan Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Digital	75%	100%	100%
		5. Persentase % Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring dari Stasiun Monitor Frekuensi Radio di UPT	85%	96.95%	114.06%
		6. Persentase (%) Penanganan Sanksi Denda Administratif	80%	99.39%	99.39%

		7. Persentase (%) Tersedianya Data Hasil Pengukuran Kualitas Layanan	100%	116.07%	116.07%
		8. Persentase (%) Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Operator Radio (UNAR, MOTS- IKRAN)	100%	116.67%	116.67%
		9. Persentase (%) Pelaksanaan Penanganan Piutang BHP Frekuensi Radio	100%	100%	100%
		10. Persentase (%) Sosialisasi Pelayanan Publik	100%	100%	100%
		11. Persentase (%) Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelayanan Publik (IKM/IPKP)	100%	117%	100%
		12. Persentase (%) Pelaksanaan Survey Integritas Pelayanan Publik (IIPP/IPAK)	100%	105%	100%
		13. Persentase (%) Tindak Lanjut Verifikasi Site ISR Microwave link yang Tidak Sesuai (PrimaAksi)	100%	100%	100%
2	Meningkatnya kualitas tata kelola birokrasi yang efektif dan efisien	1. Nilai Kinerja Anggaran Balai Monitor SFR Kelas II Pontianak	86.95%	83.82%	96.40%
		2. Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)	97%	100%	103.09%

SASARAN 1 MENINGKATNYA LAYANAN MONITORING, PENGUKURAN, INSPEKSI, PENERTIBAN SERTA PELAYANAN PUBLIK SPEKTRUM FREKUENSI RADIO DAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI

Pada Sasaran Program I “**Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban serta pelayanan publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi**” yang terdapat 13 Indikator Kinerja.

IK-1 Persentase (%) Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio**a. Latar Belakang**

Indikator monitoring spektrum frekuensi radio ditetapkan untuk memastikan bahwa pemanfaatan spektrum frekuensi radio berjalan tertib, efisien, dan sesuai ketentuan. Hal ini penting karena spektrum frekuensi radio merupakan sumber daya alam terbatas yang memiliki nilai strategis dalam mendukung layanan komunikasi, baik untuk kepentingan publik, pemerintahan, pertahanan keamanan, maupun sektor ekonomi. Penggunaan yang tidak sesuai peruntukan, tanpa izin, atau menimbulkan gangguan dapat berdampak pada terganggunya layanan komunikasi yang esensial.

Melalui indikator ini, pelaksanaan monitoring secara berkala dan sistematis di wilayah kabupaten/kota dapat dievaluasi untuk mendeteksi potensi gangguan atau penyalahgunaan frekuensi sejak dini, serta memastikan penggunaan spektrum berjalan sesuai ketentuan. Kegiatan ini juga mendukung pengawasan terhadap stasiun radio, perangkat komunikasi, dan layanan publik lainnya, khususnya di wilayah perbatasan dan daerah terpencil yang rentan terhadap penggunaan ilegal.

Penerima manfaat dari pencapaian indikator ini mencakup masyarakat umum sebagai pengguna layanan komunikasi, penyelenggara telekomunikasi dan penyiaran, serta instansi dan sektor layanan publik. Dengan demikian, pengelolaan spektrum yang tertib akan menjaga kualitas layanan komunikasi serta mendukung kelancaran aktivitas dan pembangunan digital.

b. Capaian Kinerja**Monitoring 15 Pita Frekuensi (80%)**

Indikator Kinerja Persentase (%) monitoring penggunaan frekuensi radio di kab/kota memiliki target sebesar 100%. Pada tahun 2025, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Pontianak melaksanakan monitoring spektrum frekuensi radio sebanyak 25 kali di 14 wilayah kota/kabupaten Provinsi Kalimantan Barat dengan sasaran kinerja termonitornya penggunaan frekuensi radio di 14 kota/kabupaten 100%, pelaksanaan kegiatan monitoring frekuensi dalam rangka pelacakan penggunaan frekuensi ilegal juga dilaksanakan Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Pontianak untuk memastikan penggunaan frekuensi radio yang legal dan sesuai ketentuan, serta pelaksanaan kegiatan monitor dan atau pendataan standarisasi

perangkat telekomunikasi di 14 kabupaten/kota dari 14 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Kalimantan Barat untuk memastikan peredaran perangkat telekomunikasi yang sesuai dengan ketentuan yang ada. Dengan demikian Indikator Kinerja persentase (%) monitoring penggunaan spektrum frekuensi radio di kab/kota memenuhi target yaitu sebesar 100% sesuai dengan perjanjian kinerja.

Capaian indikator kinerja dimaksud dapat dilihat pada tabel dibawah ini kemudian diikuti dengan penjelasan capaiannya.

Tabel 4 Capaian monitoring penggunaan spektrum frekuensi radio di Kabupaten/Kota

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban serta pelayanan publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi	Persentase (%) Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio	80% Kab/Kota	125%	100%

Adapun capaian indikator kinerja tersebut diperoleh berdasarkan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Formula} = \frac{\text{Jumlah Kabupaten Kota Termonitor}}{\text{Jumlah Kabupaten Kota Wil. Kerja UPT}}$$

Dengan ketentuan bahwa kabupaten/kota dinyatakan termonitor apabila memenuhi syarat monitoring 15 pita frekuensi, terdapat ISR termonitor, hasil monitoring teridentifikasi, serta dilakukan pengenaan sanksi atas temuan pelanggaran.

Capaian indikator kinerja dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 5 Perbandingan Target dan Capaian Indikator Kinerja (IK-1) 2022-2025

Indikator Kinerja	2022		2023		2024		2025	
	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
Persentase (%) Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio	80%	100%	100%	100%	100%	100%	80%	100%

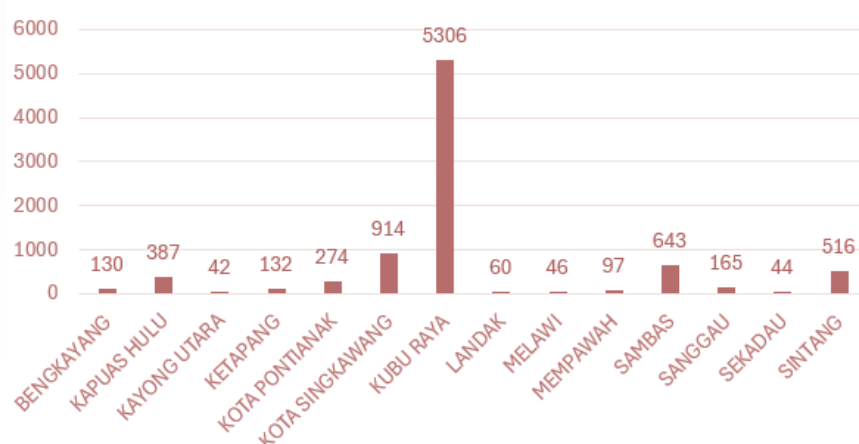
Dari capaian indikator kinerja persentase (%) monitoring penggunaan spektrum frekuensi radio di kab/kota Tahun 2025 yang telah dilaksanakan dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 6 Jumlah Frekuensi Termonitor per Kabupaten/Kota Termonitor Tahun 2025

Kab/Kota	Frekuensi Termonitor
Bengkayang	130
Kapuas Hulu	387
Kayong Utara	42
Ketapang	132
Kota Pontianak	274
Kota Singkawang	914
Kubu Raya	5306
Landak	60
Melawi	46
Mempawah	97
Sambas	643
Sanggau	165
Sekadau	44
Sintang	516
Grand Total	8756

Tabel diatas menunjukkan data jumlah frekuensi yang termonitor per Kab/Kota secara rinci, dari 14 daerah Kabupaten/Kota total frekuensi termonitor yaitu sebanyak 8526 frekuensi, dimana Kab. Kubu Raya menjadi

daerah yang paling banyak jumlah frekuensi radio yang termonitor. Monitoring frekuensi radio di Kab /Kota di tahun 2025 menggunakan 2 jenis stasiun monitoring, yaitu stasiun monitoring *transportable* dan stasiun monitoring bergerak/*mobile*. banyaknya jumlah frekuensi radio yang termonitor juga dapat dilihat melalui gambar grafik dibawah ini.



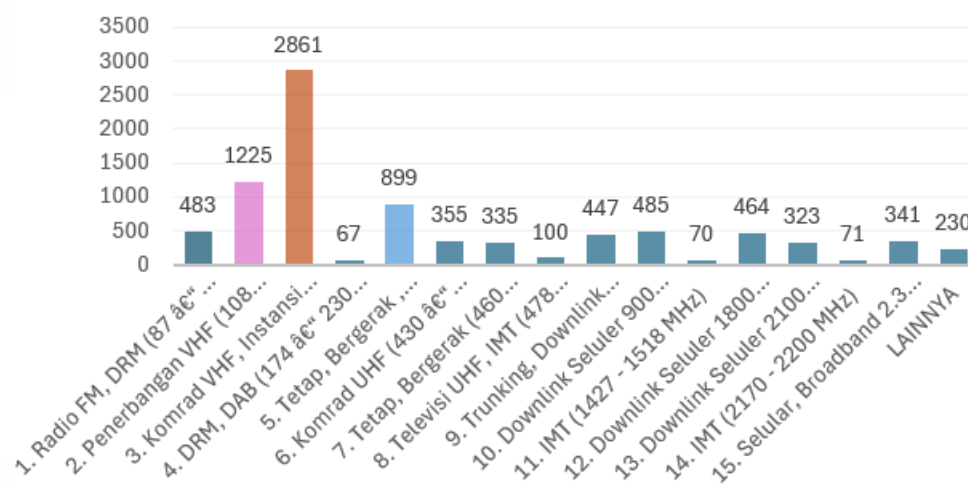
Gambar 3 Grafik jumlah frekuensi termonitor berdasarkan Kabupaten/Kota

Tabel 7 Total Frekuensi Termonitor per Kabupaten/Kota

Pita Frekuensi	Frekuensi Termonitor
1. Radio FM, DRM (87 - 108 MHz)	483
2. Penerbangan VHF (108 - 137 MHz)	1225
3. Komrad VHF, Instansi Pemerintah atau Badan Usaha, Maritim VHF (137 - 174 MHz)	2861
4. DRM, DAB (174 - 230 MHz)	67
5. Tetap, Bergerak , Marabahaya (300 - 430 MHz)	899
6. Komrad UHF (430 - 460 MHz)	355
7. Tetap, Bergerak (460 - 470 MHz)	335
8. Televisi UHF, IMT (478 - 806 MHz)	100
9. <i>Trunking</i> , <i>Downlink</i> Seluler 800 (806 - 880 MHz)	447
10. <i>Downlink</i> Seluler 900 (925 - 960 MHz)	485
11. IMT (1427 - 1518 MHz)	70
12. <i>Downlink</i> Seluler 1800 (1805 - 1880 MHz)	464
13. <i>Downlink</i> Seluler 2100 (2110 - 2170 MHz)	323

14. IMT (2170 - 2200 MHz)	71
15. Selular, <i>Broadband</i> 2.3 GHz (2300 - 2400 MHz)	341
Grand Total	8756

Tabel diatas menunjukkan jumlah frekuensi radio termonitor di 14 kabupaten / Kota berdasarkan pita frekuensinya, dari 15 pita frekuensi yang di monitor dapat dilihat bahwa pita frekuensi Komrad VHF, Instansi Pemerintah atau Badan Usaha, Maritim VHF pada rentang frekuensi 137 sampai dengan 174 MHz merupakan pita frekuensi dengan jumlah pengguna terbanyak. Penggunaan frekuensi radio berdasarkan Pita Frekuensi lebih jelasnya pada gambar grafik di bawah ini :



Gambar 4 Grafik jumlah frekuensi termonitor berdasarkan Pita Frekuensi

Hasil identifikasi dari kegiatan monitoring 15 pita frekuensi di 14 Kabupaten / Kota dapat dilihat berdasarkan tabel di bawah ini.

Tabel 8 Jumlah Legalitas Frekuensi Termonitor per Kabupaten/Kota

Status Legalitas Frekuensi Termonitor	Jumlah	Persentase
Belum Diketahui	28	0.3198%
Berizin	6390	72.9785%
<i>Clear</i>	328	3.7460%
<i>Internasional</i>	294	3.3577%
Kadaluarsa	9	0.1028%
<i>Noise</i>	62	0.7081%

Off air (Sedang Tidak Digunakan)	1594	18.2047%
Off air (Tidak Ada Informasi)	31	0.3540%
Off air (Tidak Digunakan Lagi/ <i>Dismantle</i>)	18	0.2056%
Tanpa Izin	1	0.0114%
Tidak Sesuai Parameter Teknis	1	0.0114%
Grand Total	8756	100%

Berdasarkan tabel jumlah legalitas frekuensi termonitor diatas, diketahui bahwasanya dari 8756 frekuensi yang di monitor, terdapat 11 (sebelas) status legalitas yang mana 6390 frekuensi Legal menjadi persentase sebanyak yaitu 72.9785%. Berdasarkan penjelasan diatas, disimpulkan bahwa capaian untuk Indikator Kinerja "Persentase (%) monitoring penggunaan spektrum frekuensi radio di kabupaten/kota yang ditargetkan mencapai 100% secara akumulasi sampai dengan Desember 2025 telah tercapai 100%.

Selain target tersebut, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Pontianak juga memiliki target pelaksanaan observasi dan identifikasi pada kabupaten/kota yang memiliki stasiun tetap/*transportable*, yaitu minimal 1 (satu) kali setiap bulan per stasiun tetap/*transportable*. Adapun capaian kegiatan tersebut menunjukkan bahwa observasi dan identifikasi telah dilaksanakan secara berkala sepanjang Tahun 2025 terhadap 6 stasiun *transportable* di Provinsi Kalimantan Barat berikut ini:

1. *Site* Kubu Raya (TCI)
2. *Site* Singkawang (TCI)
3. *Site* Sambas (TCI)
4. *Site* Sintang (LSTelecom306)
5. *Site* Ketapang (LSTelecom306)
6. *Site* Kapuas Hulu (LSTelecom306)

Berdasarkan hasil pelaksanaan, seluruh stasiun yang menjadi objek pengamatan telah dilakukan observasi dan identifikasi secara konsisten sepanjang tahun pelaporan. Secara umum, capaian kegiatan telah mendekati dan memenuhi target frekuensi bulanan, meskipun terdapat beberapa penyesuaian jadwal pada bulan tertentu.

Khusus untuk *site* Ketapang, dilaporkan masih dalam status *Off air* akibat kerusakan pada perangkat FMU dan saat ini masih dalam proses perbaikan. Selain itu, terdapat beberapa kegiatan pemeliharaan (*maintenance*) pada *site* Kapuas Hulu (Putussibau), yang telah dilaporkan siap digunakan kembali sejak Mei 2025. Uraian lebih rinci terkait pelaksanaan kegiatan ini akan dijelaskan pada pembahasan Indikator Kinerja 5 (IK-5).

Monitoring Wilayah Perbatasan Indonesia (100%)

Kegiatan monitoring wilayah perbatasan di Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Pontianak dilaksanakan dengan target 100% hasil monitoring SFR yang berasal dari negara lain dapat teridentifikasi. Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh data referensi serta mendukung koordinasi frekuensi antara Indonesia dengan Malaysia, dengan lokasi monitoring pada titik yang merepresentasikan penggunaan spektrum frekuensi radio di kedua negara.

Berdasarkan hasil monitoring, seluruh pancaran frekuensi radio yang berasal dari Malaysia telah berhasil diidentifikasi minimal hingga tingkat *Subservice*, dengan cakupan layanan siaran dan seluler dan berhasil mencapai target identifikasi 100%. Hasil tersebut menjadi bahan pendukung dalam menjaga keteraturan penggunaan spektrum frekuensi radio di wilayah perbatasan.

Tabel 9 Jumlah Frekuensi Termonitor berdasarkan Dinas
dan *Subservice* Wilayah Perbatasan Tahun 2025

Dinas	Subservice	Jumlah
<i>Aeronautical</i>	<i>Ground-To-Air</i>	11
	Navigasi	3
	Total	14
<i>Amateur Radio</i>	<i>AR Standard</i>	1
	Total	1
<i>Broadcast</i>	DVB-T	9
	FM	67
	TV	1
	Total	77
<i>Land Mobile (private)</i>	Standard	86
	Total	86
<i>Land Mobile (public)</i>	GSM	7
	LTE	29

	<i>Trunking</i>	1
	Total	37
<i>Other Services</i>	-	17
	<i>Distress</i>	1
	Total	18
Grand Total	233	

Berdasarkan tabel di atas, hasil monitoring penggunaan spektrum frekuensi radio menunjukkan total 233 pancaran yang teridentifikasi dari berbagai dinas dan *Subservice*. Dinas dengan jumlah pancaran terbanyak berasal dari layanan *Land Mobile (private)* sebanyak 86 pancaran, diikuti oleh dinas *Broadcast* sebanyak 77 pancaran yang didominasi oleh layanan FM. Selanjutnya, *Land Mobile (public)* tercatat sebanyak 37 pancaran dengan mayoritas pada teknologi LTE.

BENCHMARK CAPAIAN KINERJA DENGAN UPT LAINNYA

Telah dilakukan perbandingan capaian kinerja antara Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Pontianak dan Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Denpasar. Kedua UPT memiliki karakteristik wilayah kerja yang berbeda, dimana Balmon Pontianak mencakup 14 kabupaten/kota, sedangkan Balmon Denpasar mencakup 9 kabupaten/kota di Provinsi Bali.

Perbedaan kelas UPT dan cakupan wilayah kerja tersebut tidak mempengaruhi capaian kinerja, dimana kedua Balmon sama-sama berhasil mencapai target sebesar 100%.

Hasil *Benchmark* ini menjadi bahan evaluasi dan pembelajaran dalam upaya peningkatan kualitas pelaksanaan kegiatan, serta sebagai dasar perbaikan untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pada tahun berikutnya.

Tabel 10 *Benchmark* Capaian Kinerja (IK-1) dengan UPT Lain

Indikator Kinerja	UPT Ditjen Infrastruktur Digital	Target %	Capaian %	Keterangan
Persentase (%) Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kab/Kota	Balmon Pontianak	100	100	Persentase Capaian Balmon Pontianak dan Balmon Denpasar sama sama 100%
	Balmon Denpasar	100	100	

c. Inovasi/Strategi Keberhasilan

Pada tahun 2025 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Pontianak melaksanakan kegiatan monitoring spektrum frekuensi radio dengan sejumlah inovasi untuk meningkatkan efektivitas dan akurasi pemantauan. Pemanfaatan dengan berbagai jenis perangkat untuk menjangkau seluruh 14 kabupaten/kota di Kalimantan Barat. Seluruh indikator kinerja dalam kegiatan monitoring telah mencapai target maksimal Monitoring berhasil dilaksanakan di seluruh 14 kabupaten/kota, dengan cakupan 15 pita frekuensi, menjangkau total 8756 frekuensi. Capaian ini menegaskan terpenuhinya indikator monitoring kabupaten/kota sebesar 100%. Kabupaten Kubu Raya menjadi kontributor terbanyak dalam monitoring dengan 5306 frekuensi, menandakan prioritas dan kapasitas lokasi tersebut dalam mendukung kegiatan.

d. Faktor Kendala/Hambatan dan Upaya Percepatan

Dalam pelaksanaan kegiatan monitoring, terdapat beberapa kendala seperti alat yang digunakan tidak merespons dengan baik sehingga tidak dapat digunakan. Namun, kendala tersebut dapat segera ditangani di lapangan sehingga tidak berdampak signifikan terhadap pelaksanaan kegiatan maupun hasil kinerja. Secara umum, pelaksanaan monitoring spektrum frekuensi radio di kabupaten/kota di wilayah Provinsi Kalimantan Barat tidak mengalami kendala yang menyebabkan tidak tercapainya target tahunan, sehingga capaian kinerja dapat diperoleh secara maksimal.

Dalam pelaksanaan kegiatan monitoring spektrum frekuensi radio di kabupaten/kota, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Pontianak melakukan pembagian tugas anggota secara efisien untuk mempercepat dan memperlancar pelaksanaan kegiatan monitoring. Dengan pembagian yang optimal tersebut, target kegiatan dapat tercapai secara maksimal.

e. Tindak Lanjut

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan monitoring spektrum frekuensi radio, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Pontianak akan melakukan beberapa langkah tindak lanjut, antara lain:

1. Peningkatan kapasitas teknis perangkat monitoring, khususnya pada lokasi yang mengalami kendala operasional seperti Ketapang dan Kapuas Hulu.

2. Optimalisasi penggunaan stasiun monitoring *transportable* melalui penjadwalan perawatan serta rotasi penggunaan antar *site* guna meminimalkan potensi kerusakan.
3. Penguatan basis data hasil monitoring, termasuk pelabelan status legalitas frekuensi sebagai dasar dalam pelaksanaan penertiban ke depan.
4. Peningkatan koordinasi dengan instansi teknis terkait dalam penanganan penggunaan frekuensi ilegal atau tidak berizin.
5. Penambahan intensitas hari kerja pemantauan pada periode tertentu untuk menjamin validitas dan kualitas data hasil monitoring.

f. Rekomendasi Capaian

Untuk mencapai target secara maksimal pada tahun berikutnya, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Pontianak perlu meningkatkan koordinasi dalam perencanaan kegiatan monitoring spektrum frekuensi radio di kabupaten/kota. Perencanaan yang lebih terstruktur dan terkoordinasi diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan serta menjaga konsistensi capaian kinerja.

Dengan langkah tersebut, diharapkan kinerja monitoring dapat semakin optimal dan target kinerja tetap dapat tercapai secara maksimal meskipun terdapat kendala dalam pelaksanaannya.

g. Efisiensi

Dari aspek efisiensi, kegiatan monitoring tahun 2025 dapat dikategorikan sangat optimal. Tim PFR yang menggunakan perangkat dilakukan terukur dan berjadwal, menghindari pemborosan waktu dan sumber daya mengingat pemanfaatan Aplikasi ROL yang bersifat *Realtime*. Kegiatan monitoring rutin dimaksimalkan sejak pertengahan tahun dengan menyesuaikan ritme kerja dan kondisi perangkat. Pemeliharaan perangkat dilakukan berbasis kebutuhan dan tidak mengganggu pelaksanaan monitoring secara keseluruhan. Cakupan dan hasil yang luas dicapai tanpa peningkatan signifikan pada anggaran, menunjukkan manajemen kinerja yang efisien dan profesional.

h. Implementasi Budaya Nilai BerAKHLAK

Pencapaian indikator pelaksanaan kegiatan monitoring spektrum frekuensi radio Tahun 2025 tidak terlepas dari penerapan nilai-nilai BerAKHLAK dalam pelaksanaan tugas di UPT. Nilai Berorientasi Pelayanan tercermin dari pelaksanaan pemantauan yang dilakukan secara menyeluruh terhadap wilayah serta penggunaan frekuensi oleh masyarakat dan instansi publik, guna memastikan kualitas layanan komunikasi tetap terjaga. Nilai Akuntabel diwujudkan melalui dokumentasi kegiatan yang sistematis dan terstruktur, antara lain dalam bentuk laporan per kabupaten/kota serta klasifikasi legalitas frekuensi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Nilai Kompeten terlihat dari kemampuan tim teknis dalam melaksanakan pemantauan lintas pita dan lintas wilayah dengan tingkat akurasi yang tinggi, didukung oleh penguasaan perangkat monitoring dan metode analisis yang memadai. Selanjutnya, nilai Harmonis dan Kolaboratif tercermin dari terjalannya kerja sama yang baik antar *site* maupun antar tim lapangan, serta koordinasi dengan unit kerja lain dalam perencanaan dan evaluasi kegiatan monitoring. Nilai Loyal diwujudkan melalui dedikasi seluruh tim dalam menjalankan tugas secara optimal, termasuk dalam kondisi keterbatasan perangkat.

Sementara itu, nilai Adaptif tercermin dari kemampuan tim dalam menyesuaikan strategi pelaksanaan monitoring terhadap dinamika lapangan, seperti penambahan hari monitoring pada wilayah yang berpotensi mengalami gangguan. Penerapan nilai-nilai BerAKHLAK tersebut menjadi landasan penting dalam memastikan kegiatan monitoring spektrum frekuensi radio dapat dilaksanakan secara efektif, optimal, dan memberikan manfaat nyata dalam menjaga ketertiban penggunaan spektrum frekuensi radio.



Gambar 5 Kegiatan monitoring Spektrum Frekuensi Radio

IK-2 Persentase (%) Pemeriksaan Stasiun Radio

a. Latar Belakang

Kegiatan pemeriksaan (inspeksi) stasiun radio merupakan langkah pengawasan yang dilaksanakan oleh Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Pontianak guna memvalidasi kesesuaian operasional perangkat di lapangan dengan data administratif yang tercantum pada Izin Stasiun Radio (ISR). Secara prinsip, kegiatan ini diimplementasikan sebagai wujud nyata pengawasan dan pengendalian untuk menciptakan tata kelola penggunaan spektrum frekuensi radio dan perangkat telekomunikasi yang tertib secara hukum maupun teknis. Tindakan preventif dan korektif ini sangat krusial untuk dilaksanakan, mengingat setiap bentuk pelanggaran teknis di lapangan berpotensi memicu gangguan (*interference*) yang merugikan pengguna frekuensi lainnya. Lebih dari itu, penyimpangan parameter teknis seperti ketidaksesuaian daya pancar dan lebar pita (*bandwidth*) akan berimplikasi langsung pada kerugian negara akibat defisit penerimaan Biaya Hak Penggunaan (BHP) Frekuensi Radio yang merupakan salah satu sumber Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Penerima manfaat utama dari kegiatan pengawasan ini mencakup ekosistem telekomunikasi, yakni lembaga penyiaran, operator jaringan, dan masyarakat umum. Terciptanya ketertiban penggunaan spektrum frekuensi ini akan memberikan dampak positif yang komprehensif bagi seluruh pihak, baik dari sisi ekonomi, operasional, regulasi, maupun manfaat sosial.

Dalam rangka mengukur capaian dan efektivitas kinerja pengawasan secara komprehensif, kegiatan pemeriksaan stasiun radio ini difokuskan pada 3 (tiga) sub-indikator utama, meliputi:

1. Pemeriksaan teknis dan administratif stasiun radio *Microwave link*.
2. Pengukuran parameter teknis dan karakteristik pemancar stasiun siaran Radio FM.
3. Pengukuran parameter teknis dan karakteristik pemancar stasiun siaran Televisi Digital.

b. Capaian Kinerja

Target capaian kinerja yang ditetapkan untuk Pemeriksaan Stasiun Radio (Inspeksi) adalah 100%. Adapun realisasi capaian target kinerja tahun 2025 oleh Balai Monitor SFR Kelas II Pontianak adalah sebagai berikut:

Tabel 11 Capaian Pemeriksaan Stasiun Radio

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban serta pelayanan publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi	Persentase (%) Pemeriksaan Stasiun Radio	100%	100%	100%

Adapun capaian dari indikator kinerja tersebut didapatkan berdasarkan perhitungan berikut:

$$= \frac{\text{Jumlah pemeriksaan st. radio} + \text{TL pelanggaran yang dikenakan sanksi}}{\text{Total data target pemeriksaan} + \text{Total data pelanggaran}} \times 100\%$$

Capaian indikator kinerja dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 12 Perbandingan Target dan Capaian Indikator Kinerja (IK-2) 2022-2025

Indikator Kinerja	2022		2023		2024		2025	
	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
Persentase (%) Pemeriksaan Stasiun Radio	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Berdasarkan rekapitulasi data pada tabel di atas, indikator kinerja pemeriksaan stasiun radio oleh Balmon Pontianak menunjukkan tren kinerja yang sangat konsisten dan prima. Balai Monitor Kelas II Pontianak berhasil mempertahankan persentase capaian secara sempurna di angka 100% selama empat tahun berturut-turut (2022–2025). Dari capaian indikator kinerja Persentase (%) Pemeriksaan Stasiun Radio Tahun 2025 yang telah dilaksanakan dapat dirinci berdasarkan sub indikator sebagai berikut :

Tabel 13 Capaian persentase % pemeriksaan stasiun radio berdasarkan sub indikator

No.	Sub Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.a	Pemeriksaan Stasiun Radio (<i>Microwave link</i>) secara <i>Open shelter</i>	451	451	100%
1.b	Pemeriksaan Stasiun Radio (<i>Microwave link</i>) secara <i>Remote Site</i>	5443	5428	
2	Pengukuran dan pemeriksaan Radio FM	56	56	
3	Pengukuran dan pemeriksaan TV Digital	11	11	
Total		5961	5946	

Berdasarkan tabel capaian indikator di atas, sepanjang tahun 2025 Balai Monitor SFR Kelas II Pontianak telah berhasil memperoleh target capaian kinerja 100% sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Keberhasilan Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Pontianak dalam mencapai target 100% pada kegiatan pemeriksaan stasiun radio di tahun 2025 didorong oleh komitmen sumber daya manusia yang kuat dan manajemen operasional yang efektif. Strategi utama yang diterapkan meliputi:

1. Manajemen Waktu dan Eksekusi Terukur: Penyusunan jadwal dan pemetaan wilayah pelaksanaan inspeksi dilakukan secara sistematis sejak awal tahun. Tim di lapangan menerapkan kedisiplinan yang tinggi untuk menjalankan tugas tepat waktu, sehingga seluruh target stasiun yang tersebar di wilayah geografis Kalimantan Barat dapat diselesaikan sebelum batas waktu yang ditetapkan tanpa mengorbankan kualitas pengukuran.
2. Sinergi dan Kolaborasi Internal yang Solid: Pencapaian ini sangat didukung oleh pengamalan nilai Harmonis dan Kolaboratif di lingkungan internal Balmon Pontianak. Pembagian tugas dan wilayah kerja diatur secara proporsional sesuai dengan kapasitas personel, diiringi dengan komunikasi tim yang solid sehingga hambatan teknis yang terjadi di lapangan dapat diselesaikan dengan cepat melalui diskusi dan kerja sama antar-inspektur.
3. Koordinasi Proaktif dengan Penyelenggara Layanan: Strategi percepatan target juga dilakukan melalui komunikasi dan koordinasi yang intensif

dengan para penyelenggara jaringan telekomunikasi dan lembaga penyiaran. Pendekatan proaktif ini memudahkan tim dalam proses perizinan akses masuk ke *site/shelter* serta memastikan adanya pendampingan teknis saat proses verifikasi dan pengukuran langsung di lokasi.

A. Pemeriksaan stasiun radio *Microwave link*

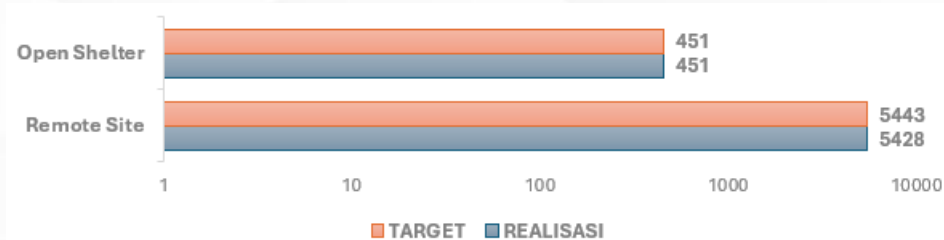
Berdasarkan Pemeriksaan stasiun radio dilakukan dengan tujuan untuk memastikan stasiun radio yang beroperasi telah memiliki izin, sesuai dengan parameter standar teknis, menggunakan perangkat yang telah tersertifikasi, dan beroperasi pada frekuensi radio sesuai peruntukannya sehingga tidak menimbulkan gangguan terhadap pengguna lain. Secara nasional, pelaksanaan Pemeriksaan stasiun radio *Microwave link* menunjukkan bahwa metode pemeriksaan melalui *Open shelter* dan *Remote Site* telah menjadi pola kerja utama UPT dalam memastikan kesesuaian data ISR dengan kondisi riil di lapangan.



Gambar 6 Dokumentasi kegiatan pemeriksaan stasiun radio *Microwave link*

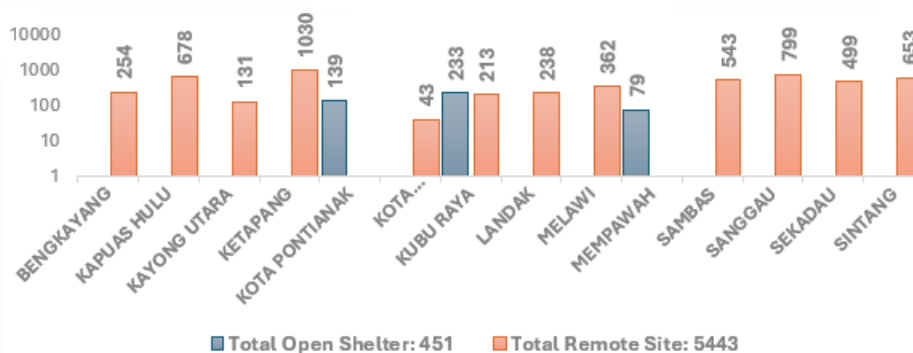
Kegiatan pemeriksaan stasiun radio *Microwave link* dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemeriksaan Stasiun Radio dengan metode pemeriksaan *Remote Site* dan inspeksi lapangan (*Open shelter*).

Target pemeriksaan ditetapkan oleh Direktorat Pengendalian Infrastruktur Digital melalui Aplikasi Pemeriksaan Stasiun Radio (APSTARD).



Gambar 7 Grafik Target Vs Realisasi Pemeriksaan Stasiun Radio *Microwave link* (*Remote Site* Dan *Open shelter*)

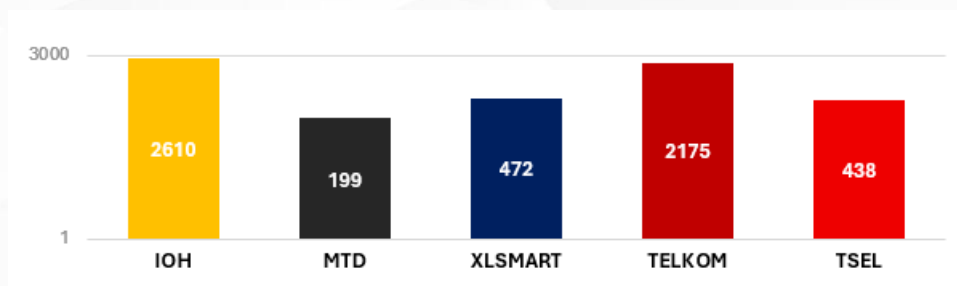
Dalam konteks tersebut, Balmon SFR Kelas II Pontianak telah merealisasikan pemeriksaan 451 *Open shelter* (100%) dari target dan 5.428 *Remote Site* (99.72%) dari target di Kabupaten maupun Kota wilayah layanan Kalimantan Barat, yang mencerminkan proporsi pelaksanaan yang sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Dengan demikian, dari sisi pola pelaksanaan, capaian Balmon SFR Kelas II Pontianak telah merepresentasikan praktik pengawasan yang selaras dengan strategi nasional, yaitu optimalisasi pemeriksaan *Remote Site* yang didukung validasi lapangan (*Open shelter*) untuk mewujudkan tertib penggunaan spektrum frekuensi radio khusus nya pada Stasiun Radio *Microwave link*.



Gambar 8 Grafik Hasil Pemeriksaan Stasiun Radio *Microwave link* *Open shelter* dan *Remote Site* di Kab/Kota Kalbar

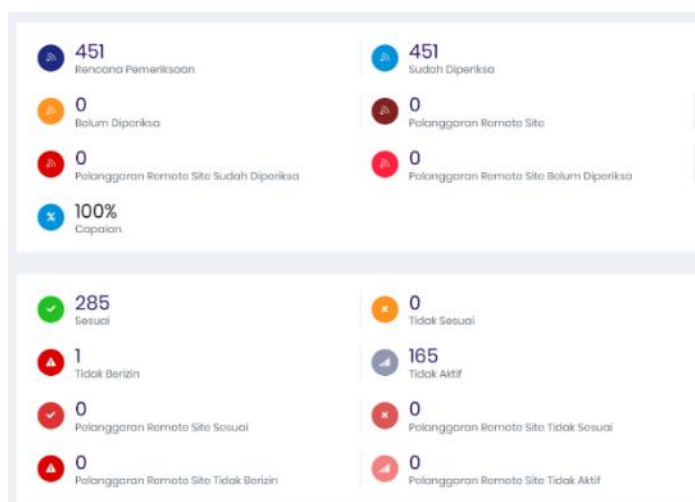
Grafik diatas merupakan sebaran pelaksanaan pemeriksaan stasiun radio *Microwave link* melalui metode *Open shelter* dan *Remote Site* di seluruh kabupaten/kota wilayah kerja Balmon Pontianak, menggambarkan bahwa

pelaksanaan pemeriksaan dilakukan secara proporsional sesuai sebaran dan jumlah *site* di masing-masing wilayah.



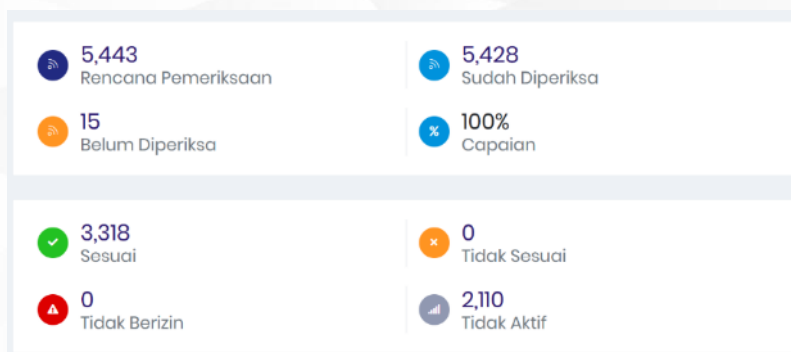
Gambar 9 Grafik Hasil Pemeriksaan Stasiun Radio *Microwave link* per Operator Seluler

Grafik menunjukkan distribusi target pemeriksaan Stasiun Radio *Microwave link* Tahun 2025 berdasarkan masing-masing operator. Perbedaan jumlah ini menunjukkan variasi kepemilikan atau pengelolaan infrastruktur *Microwave link* antar operator. Pelaporan hasil dari kegiatan stasiun radio *Microwave link* dilaporkan melalui aplikasi APSTARD, dengan hasil capture sebagaimana terlampir:



Gambar 10 Pelaporan pemeriksaan stasiun radio *Microwave link* secara *Open shelter* di APSTARD

Berdasarkan hasil pemeriksaan stasiun radio *Microwave link* secara *Open shelter* dengan jumlah target 451, sebanyak 451 stasiun radio *Microwave link* telah diperiksa dan dilaporkan di APSTARD, dimana terdapat 285 stasiun radio sesuai dengan ISR (Izin Stasiun Radio), 1 stasiun radio tidak berizin, dan 165 stasiun radio tidak aktif atau *Off air*.



Gambar 11 Pelaporan pemeriksaan stasiun radio *Microwave link* secara *Remote Site* di APSTARD

Berdasarkan hasil pemeriksaan stasiun radio *Microwave link* secara *Remote Site* dengan jumlah target 5.443, sebanyak 5.428 stasiun radio *Microwave link* telah diperiksa dan dilaporkan di APSTARD, dimana terdapat 3.318 stasiun radio sesuai dengan ISR (Izin Stasiun Radio), 2.110 stasiun radio tidak aktif atau *Off air*, dan 15 stasiun radio *Microwave link* belum diperiksa.

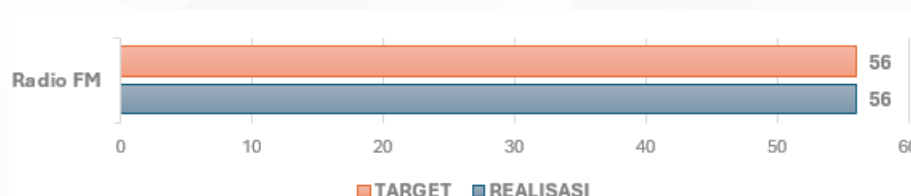
B. Pengukuran Stasiun Radio Penyiaran Radio FM

Guna menjaga kualitas penerimaan siaran di masyarakat dan mencegah terjadinya interferensi antar-frekuensi, telah dilaksanakan monitoring serta pengukuran parameter teknis terhadap seluruh stasiun Radio FM di wilayah Kalimantan Barat untuk memastikan penggunaan frekuensi yang tertib dan sesuai peruntukannya sesuai dengan ISR yang dimiliki. Target pengukuran stasiun Radio FM yang ditetapkan pada perjanjian kinerja tahun 2025 yaitu sebanyak 56 (lima puluh enam) stasiun di seluruh provinsi Kalimantan barat.



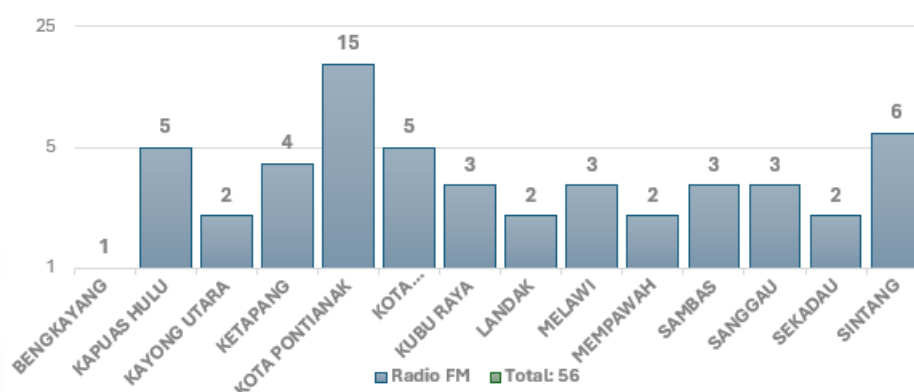
Gambar 12 Dokumentasi Kegiatan Pengukuran Stasiun Radio FM

Adapun data target vs realisasi pemeriksaan stasiun penyiaran Radio FM terlampir pada grafik berikut:



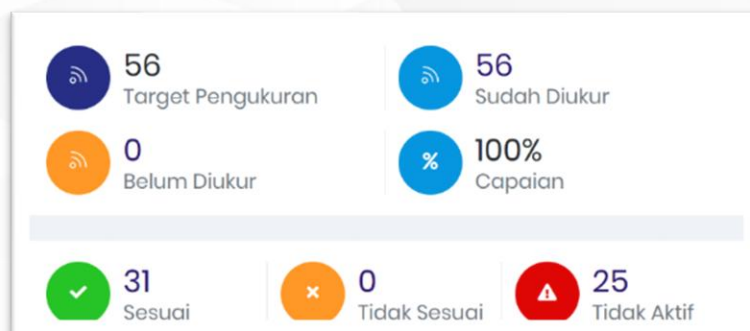
Gambar 13 Grafik Target Vs Realisasi Pemeriksaan Stasiun Radio FM Di Kalimantan Barat

Sepanjang tahun 2025 Balmon Pontianak telah melaksanakan pengukuran stasiun penyiaran Radio FM sebanyak 56 (lima puluh enam) stasiun dengan capaian pengukuran yang diperoleh adalah 100%. Data sebaran stasiun penyiaran Radio FM di provinsi Kalimantan barat tahun 2025 terlampir pada grafik berikut:



Gambar 14 Grafik Sebaran Stasiun Penyiaran Radio FM di Provinsi Kalimantan Barat

Berdasarkan data grafik, sebaran stasiun Radio FM di Provinsi Kalimantan Barat menunjukkan dominasi di Kota Pontianak dengan jumlah 15 stasiun, melampaui wilayah lainnya seperti Sintang yang berada di posisi kedua dengan 6 stasiun. Sementara itu, wilayah seperti Kapuas Hulu dan Kota Singkawang masing-masing memiliki 5 stasiun, diikuti oleh Ketapang dengan 4 stasiun, sedangkan kabupaten lainnya rata-rata hanya memiliki 2 hingga 3 stasiun dengan titik terendah berada di Bengkayang yang hanya memiliki 1 stasiun. Hasil dari kegiatan pemeriksaan stasiun penyiaran Radio FM tahun 2025 dilaporkan melalui aplikasi APSTARD dengan capaian seperti berikut:



Gambar 15 Capaian pengukuran stasiun penyiaran Radio FM Balmon Pontianak di aplikasi APSTARD

Berdasarkan hasil pelaporan pengukuran stasiun penyiaran radio fm dari aplikasi APSTARD, sepanjang tahun 2025 oleh Balmon Pontianak telah mencapai target secara maksimal, di mana dari total 56 target pengukuran yang ditetapkan, seluruhnya telah selesai diperiksa sehingga menghasilkan tingkat capaian sebesar 100%. Dari total yang diukur tersebut, tercatat sebanyak 31 stasiun penyiaran radio fm dinyatakan sesuai dengan parameter teknis dan tidak ditemukan adanya stasiun penyiaran yang tidak sesuai, terdapat 25 stasiun penyiaran radio FM yang berstatus tidak aktif.



Gambar 16 Status Operasional dan Kepatuhan Teknis Stasiun Penyiaran Radio FM Tahun 2025

Seluruh stasiun yang terpantau beroperasi atau *On air* (55%) dinyatakan sesuai tanpa ditemukan adanya pelanggaran teknis (0% Tidak Sesuai). Capaian ini sejalan dengan kinerja positif Balmon Pontianak tahun 2025, di mana pengawasan lapangan dan fungsi monitoring berhasil menjaga kepatuhan penyelenggara penyiaran secara konsisten. Hal ini menunjukkan bahwa

koordinasi teknis dan sosialisasi yang dilakukan Balmon Pontianak efektif dalam menjaga ketertiban spektrum frekuensi radio di wilayah Kalimantan Barat.

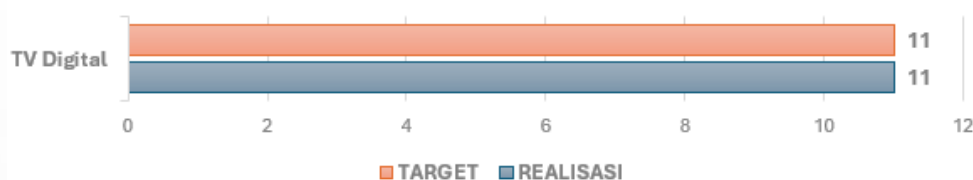
C. Pengukuran Stasiun Penyiaran TV Digital

Sejalan dengan pengawasan pada sektor Radio FM, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Pontianak juga melakukan pemantauan terhadap infrastruktur TV Digital guna memastikan layanan dan kualitas siaran digital di wilayah Kalimantan Barat berjalan optimal sesuai standar teknis. Target pengukuran stasiun Mux TV Digital yang ditetapkan pada perjanjian kinerja tahun 2025 yaitu sebanyak 11 (sebelas) stasiun di seluruh provinsi Kalimantan Barat.



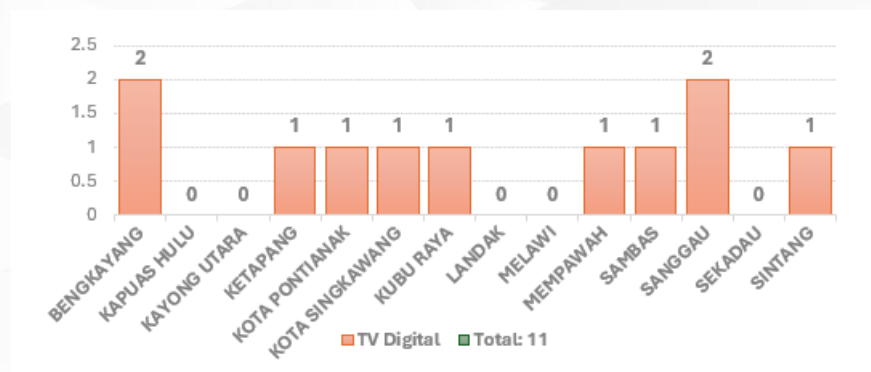
Gambar 17 Dokumentasi Kegiatan Pengukuran Stasiun Penyiaran TV Digital

Adapun data target vs realisasi pemeriksaan stasiun penyiaran TV Digital terlampir pada grafik berikut:



Gambar 18 Grafik Target vs Realisasi Pemeriksaan Stasiun TV Digital di Kalimantan Barat

Sepanjang tahun 2025 Balmon Pontianak telah melaksanakan pengukuran stasiun penyiaran TV Digital sebanyak 11 (sebelas) stasiun Mux dengan capaian pengukuran yang di peroleh adalah 100%. Data sebaran stasiun penyiaran Mux TV Digital di provinsi Kalimantan barat tahun 2025 terlampir pada grafik berikut:



Gambar 19 Grafik Sebaran Stasiun Mux TV Digital di Provinsi Kalimantan Barat

Berdasarkan Grafik diatas, infrastruktur Mux TV Digital telah menjangkau berbagai wilayah, dengan Bengkayang dan Sanggau memimpin sebanyak 2 stasiun, serta wilayah lainnya seperti Pontianak dan Sintang yang masing-masing 1 stasiun Mux. Kinerja Balmon Pontianak sepanjang tahun 2025 dalam menjaga stabilitas operasional ini secara langsung memberikan dampak positif berupa siaran televisi yang lebih bersih, jernih, dan canggih, sekaligus memperluas akses informasi digital yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat di Kalimantan Barat.

BENCHMARK CAPAIAN KINERJA DENGAN UPT LAINNYA

Sebagai upaya untuk mengukur tingkat efektivitas, efisiensi dalam penyelesaian program penertiban data perizinan, berikut disajikan data komparasi (*Benchmarking*) capaian kinerja antara Balai Monitor Kelas II Pontianak dengan Balai Monitor Palembang, secara khusus pada indikator Pemeriksaan Stasiun Radio pada tabel berikut:

Tabel 14 *Benchmark* Capaian Kinerja (IK-2) dengan UPT Lain

Indikator Kinerja	UPT Ditjen Infrastruktur Digital	Target %	Capaian %	Keterangan
Persentase (%) Pemeriksaan Stasiun Radio	Balmon Pontianak	100	100	Persentase Capaian Balmon Pontianak dan
	Balmon Palembang	100	100	Balmon Palembang berhasil mencapai Capaian Target.

Berdasarkan rekapitulasi data *Benchmarking* pada tabel di atas, dapat ditarik analisis perbandingan kinerja antara Balmon Pontianak dan Balmon Palembang dalam Indikator Kinerja Pemeriksaan Stasiun Radio. Secara keseluruhan, kedua Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital tersebut menunjukkan performa operasional yang sangat prima dan seimbang, di mana keduanya berhasil merealisasikan target secara sempurna di angka 100%. Pencapaian yang setara dengan Balmon Palembang ini merepresentasikan bahwa Balmon Pontianak memiliki kapasitas manajerial dan efektivitas eksekusi yang sangat kompetitif di tingkat nasional. Keberhasilan mempertahankan persentase maksimal ini membuktikan bahwa strategi penyelesaian Balmon Pontianak telah berjalan dengan sangat efektif serta memenuhi standar kualitas pengawasan yang tinggi, terlepas dari perbedaan karakteristik wilayah operasional dengan satuan kerja lainnya.

c. Inovasi/Strategi Keberhasilan

Inovasi Keberhasilan Balai Monitor Kelas II Pontianak dalam mencapai target secara penuh pada kegiatan pemeriksaan parameter teknis stasiun radio siaran FM, televisi digital, dan *Microwave link* ditopang oleh implementasi strategi operasional yang integratif dan proaktif. Strategi utama yang menjadi kunci efisiensi di lapangan adalah penerapan sistem pemetaan rute. Melalui pendekatan ini, tim tidak lagi mengeksekusi pemeriksaan secara terpisah berdasarkan jenis layanan perizinan, melainkan secara cerdas menggabungkan target pengukuran stasiun FM, infrastruktur TV digital, dan transmisi *Microwave link* yang berada dalam satu klaster geografis ke dalam satu rangkaian perjalanan sekaligus. Inovasi lapangan ini mengefisienkan waktu operasional di tengah kondisi rentang kendali geografis Kalimantan Barat yang sangat luas. Selain efisiensi rute, capaian ini juga dibentuk oleh strategi pra-verifikasi yang intensif bersama pihak lembaga penyiaran dan operator telekomunikasi sebelum tim diterjunkan ke lokasi. Langkah kolaboratif ini berfungsi krusial untuk mengonfirmasi status operasional pemancar yang mutakhir guna meminimalisir survei fiktif pada stasiun yang berstatus *Off air*, sekaligus memastikan kesiapan pendampingan akses fisik saat memasuki area *site* atau *shelter* yang memiliki protokol keamanan ketat. Sinergi antara inovasi penjadwalan yang terpadu, ketepatan koordinasi eksternal, serta kapasitas teknis personel yang adaptif dalam menggunakan ragam instrumen ukur inilah yang menjamin seluruh target

validasi Izin Stasiun Radio (ISR) dapat diselesaikan secara presisi, komprehensif, dan tepat waktu.

d. Faktor Kendala/Hambatan dan Upaya Percepatan

Dalam pelaksanaan pemeriksaan stasiun radio di lapangan selama tahun 2025, terdapat hambatan operasional utama sebagai berikut:

1. Kondisi Geografis dan Infrastruktur: Wilayah kerja Provinsi Kalimantan Barat yang sangat luas dengan kondisi infrastruktur jalan yang bervariasi mengakibatkan tingginya waktu tempuh dan kendala mobilitas menuju *site/shelter* pemancar di area pelosok.
2. Status Stasiun Tidak Aktif (*Off air*): Tingginya temuan stasiun pemancar dalam kondisi *Off air* saat inspeksi lapangan (khususnya pada *Microwave link* dan Radio FM) mengakibatkan pengukuran parameter teknis pancaran tidak dapat dilakukan seketika.

Untuk mengatasi kendala tersebut dan memastikan target capaian 100% terpenuhi, Balmon Pontianak mengimplementasikan langkah-langkah percepatan operasional berikut:

1. Optimalisasi Pemetaan dan Penjadwalan: Menetapkan manajemen rute (*routing*) dan pemetaan zona pemeriksaan yang presisi agar satu kali perjalanan dinas dapat mencakup beberapa titik target sekaligus secara efisien.
2. Verifikasi Awal (*Pre-verification*): Mengintensifkan koordinasi pendahuluan dengan pihak penyelenggara sebelum tim turun ke lapangan guna memastikan stasiun dalam keadaan aktif beroperasi (*On air*) serta menjamin ketersediaan akses masuk ke lokasi *site*.
3. Sinergi dan Kolaborasi Lapangan: Mengutamakan fleksibilitas dan kerja sama tim internal (penerapan nilai Kolaboratif BerAKHLAK) untuk saling mendukung (*Back-up*) tugas operasional, sehingga hambatan teknis maupun mobilitas di lapangan dapat segera teratasi.

e. Tindak Lanjut

Laporan hasil pemeriksaan stasiun radio tahun 2025 telah dimanfaatkan sebagai basis data utama dalam penyusunan peta kerawanan gangguan frekuensi dan perencanaan strategi pengawasan di wilayah Kalimantan Barat untuk periode mendatang. Data teknis yang dihasilkan digunakan secara

langsung dalam proses sinkronisasi data Izin Stasiun Radio (ISR) guna mengoptimalkan potensi penerimaan PNPB dari Biaya Hak Penggunaan (BHP) Frekuensi Radio.

Sebagai bentuk tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan tahun sebelumnya, Balai Monitor Kelas II Pontianak telah mengimplementasikan penguatan manajemen penjadwalan dan sistem koordinasi pra-inspeksi yang lebih intensif. Langkah ini terbukti efektif meningkatkan efisiensi waktu tempuh di lapangan dan menjadi faktor kunci tercapainya target kinerja sebesar 100% pada tahun 2025.

f. Rekomendasi Capaian

Berdasarkan evaluasi terhadap kendala operasional tahun 2025, direkomendasikan langkah-langkah perbaikan sebagai berikut:

1. Digitalisasi Pengawasan: Mengembangkan aplikasi pangkalan data pencarian frekuensi berbasis *Mobile* (platform *Low-code*) untuk mempermudah tim dalam melakukan pencarian, filtrasi, dan verifikasi data ISR secara instan di lapangan.
2. Sinkronisasi Data Operasional: Meningkatkan frekuensi koordinasi dengan para penyelenggara telekomunikasi dan penyiaran untuk pemutakhiran status operasional stasiun secara berkala, guna meminimalisir inefisiensi akibat temuan stasiun *Off air*.
3. Optimalisasi Sarana Mobilitas: Melakukan penguatan manajemen pemeliharaan kendaraan operasional dan perangkat monitoring *Mobile* untuk memastikan kesiapan teknis dalam menghadapi tantangan geografis yang sulit di wilayah Kalimantan Barat.

g. Efisiensi

Pencapaian target kinerja 100% pada tahun 2025 turut diiringi dengan efisiensi sumber daya operasional yang terukur. Melalui penerapan manajemen rute (routing) terpadu dan sistem verifikasi awal (*Pre-verification*) sebelum tim turun ke lapangan, Balmon Pontianak berhasil menekan frekuensi perjalanan dinas yang tumpang tindih ke wilayah yang sama. Optimalisasi penugasan ini mampu meningkatkan jumlah penyelesaian *site* per keberangkatan. Penurunan durasi dan frekuensi mobilitas ini secara langsung berdampak pada penghematan terukur tanpa mengurangi kualitas dan volume target pemeriksaan fisik di lapangan.

h. Implementasi Budaya Nilai BerAKHLAK

Pencapaian target kinerja dalam pelaksanaan pengukuran parameter teknis (partek) untuk stasiun radio siaran FM, televisi digital, dan stasiun radio *Microwave link* di Kalimantan Barat merupakan wujud nyata kristalisasi budaya kerja BerAKHLAK oleh seluruh jajaran Balai Monitor Kelas II Pontianak. Nilai Berorientasi Pelayanan tercermin dari komitmen teguh pegawai dalam memastikan kualitas spektrum tetap bersih dan bebas gangguan (interferensi), sehingga masyarakat luas dapat menikmati siaran publik (radio dan televisi digital) yang jernih serta jangkauan layanan telekomunikasi yang ditopang oleh *Microwave link* secara optimal. Komitmen tersebut diiringi dengan nilai Akuntabel melalui pelaksanaan inspeksi lapangan yang cermat, jujur, dan penuh tanggung jawab, di mana hasil pengukuran partek dilaporkan secara transparan untuk memvalidasi kesesuaian Izin Stasiun Radio (ISR). Kualitas pelaporan ini terwujud berkat nilai Kompeten yang diaktualisasikan lewat profesionalisme dan keahlian teknis para inspektur dalam mengoperasikan instrumen ukur guna memvalidasi presisi karakteristik pemancar penyiaran maupun transmisi transmisi *Microwave link* di berbagai kondisi medan. Selama pelaksanaan tugas yang intens tersebut, nilai Harmonis terus dijaga lewat lingkungan kerja yang saling peduli, di tengah kelelahan fisik menuju lokasi pemancar, anggota tim senantiasa saling mendukung untuk menjaga moral kerja tetap tinggi. Kekompakan ini memperkuat nilai Loyal, yang dibuktikan melalui dedikasi pantang menyerah dalam menuntaskan keseluruhan target pemeriksaan hingga ke pelosok daerah, mengutamakan penyelesaian tugas negara di atas kenyamanan pribadi. Lebih lanjut, nilai Adaptif diaplikasikan secara nyata melalui ketangkasan tim dalam merespons tantangan geografis yang dinamis serta temuan di lapangan seperti stasiun yang faktanya sudah *Off air*, di mana tim dengan cepat menyesuaikan strategi pemetaan rute agar efisiensi waktu operasional tetap terjaga. Pada akhirnya, seluruh rangkaian tugas teknis ini disempurnakan oleh nilai Kolaboratif, baik melalui sinergi internal tim untuk saling membantu pekerjaan pengujian, maupun lewat kerja sama eksternal yang proaktif bersama lembaga penyiaran (radio/TV) dan operator telekomunikasi, khususnya dalam pendampingan akses fisik ke lokasi *site* atau *shelter* pemancar.

IK-3 Persentase (%) Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio

a. Latar Belakang

Indikator penanganan gangguan spektrum frekuensi radio pada Tahun 2025 ditetapkan untuk memastikan bahwa setiap laporan gangguan dapat ditangani secara cepat, tepat, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini menjadi penting seiring meningkatnya penggunaan spektrum frekuensi radio yang berpotensi menimbulkan interferensi, sehingga dapat mengganggu layanan komunikasi publik, pemerintahan, maupun sektor usaha. Dalam pelaksanaannya, kegiatan penanganan gangguan merupakan fungsi utama UPT dalam menjaga keteraturan dan keandalan penggunaan spektrum di wilayah kerja.

Melalui indikator ini, UPT dapat memantau efektivitas penanganan gangguan sekaligus mendorong peningkatan kapasitas teknis dan operasional, baik melalui optimalisasi perangkat monitoring maupun peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Kegiatan penanganan gangguan juga berperan penting dalam menjaga kestabilan layanan strategis seperti komunikasi penerbangan, maritim, penyiaran, serta layanan darurat, sehingga potensi risiko keselamatan dan kerugian akibat gangguan dapat diminimalisir.

Selain aspek teknis, penanganan gangguan turut memperkuat kepatuhan terhadap regulasi penggunaan spektrum frekuensi radio. Melalui kegiatan penertiban dan sosialisasi, pengguna frekuensi diharapkan semakin memahami pentingnya penggunaan spektrum secara legal dan sesuai izin, sehingga tercipta ekosistem frekuensi yang tertib dan efisien.

Penerima manfaat dari indikator ini meliputi pengguna frekuensi radio berizin, penyelenggara layanan telekomunikasi, instansi pemerintah, serta masyarakat luas yang bergantung pada layanan komunikasi yang andal. Dengan tercapainya kinerja penanganan gangguan secara optimal pada Tahun 2025, diharapkan kualitas layanan komunikasi tetap terjaga, mendukung keselamatan publik, serta memperkuat ekosistem digital yang aman, andal, dan berkelanjutan.

b. Capaian Kinerja

Penanganan gangguan pada tahun 2025 terdapat 1 (satu) aduan gangguan dalam penggunaan spektrum frekuensi radio di luar dinas maritim. Aduan tersebut telah ditangani dan berstatus *Clear* melalui pelaksanaan kegiatan penanganan gangguan serta didukung upaya antisipatif untuk mencegah timbulnya gangguan SFR. Perhitungan capaian menggunakan rumus berikut:

$$\text{Formula} = \frac{\text{Jumlah Gangguan SFR yang Ditangani}}{\text{Jumlah Total Gangguan SFR}}$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, capaian indikator kinerja persentase (%) penanganan gangguan spektrum frekuensi radio pada tahun 2025 di Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Pontianak mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 100% tertangani. Ke depan, upaya preventif seperti sosialisasi dan koordinasi akan terus ditingkatkan guna meminimalkan potensi gangguan.

Tabel 15 Capaian Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban serta pelayanan publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi	Persentase (%) Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio	95%	100%	100%

Capaian indikator kinerja dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 16 Perbandingan Target dan Capaian Indikator Kinerja (IK-3) 2022-2025

Indikator Kinerja	2022		2023		2024		2025	
	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
Persentase (%) Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio	98%	100%	99%	100%	100%	100%	95%	100%

Pada tahun anggaran 2025, Balai Monitor spektrum Frekuensi Radio Kelas II Pontianak dapat menyelesaikan 1 (satu) gangguan frekuensi radio di wilayah Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat dengan target pada perjanjian kinerja

100% aduan/klaim yang diselesaikan, upaya penanganan gangguan frekuensi radio telah diselesaikan 100% terselesaikan atau tidak terjadi lagi *interference* pada aduan yang sama (*Clear*). Komposisi aduan gangguan frekuensi yang terjadi selama tahun 2025 adalah :

Tabel 17 Aduan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio Tahun 2025

No.	Pengaduan	Pihak Terganggu	Frekuensi Radio	Nomor Tiket	Status
1	Selasa, 23 Desember 2025	Badan Meteorologi, Klimatologi Dan Geofisika	5600 MHz	23202512-32	<i>Clear</i>

Target kinerja untuk penanganan gangguan frekuensi radio yang telah ditetapkan adalah sebesar 95% pada tahun 2025. Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Pontianak dapat menyelesaikan seluruh aduan gangguan frekuensi dengan baik dan maksimal, sehingga capaian kinerja adalah 100%.

BENCHMARK CAPAIAN KINERJA DENGAN UPT LAINNYA

Telah dilakukan perbandingan capaian kinerja antara Balmon Pontianak dan Balmon Banjarmasin. Balmon Pontianak dan Balmon Banjarmasin sama-sama memiliki nilai capaian 100% pada kegiatan penanganan gangguan spektrum frekuensi radio.

Adapun dari *Benchmark* ini digunakan untuk upaya dalam peningkatan kualitas dan akan menjadi perbaikan untuk mencapai pencapaian kinerja di tahun yang akan datang.

Tabel 18 *Benchmark* Capaian Kinerja (IK-3) dengan UPT Lain

Indikator Kinerja	UPT Ditjen Infrastruktur Digital	Target %	Capaian %	Keterangan
Persentase (%)				Persentase
Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio	Balmon Pontianak	100	100	Capaian Balmon Pontianak dan Balmon Banjarmasin sama sama 100%
	Balmon Banjarmasin	100	100	

c. Inovasi /Analisa Keberhasilan/Ketidaktercapaian

Laporan capaian Perjanjian Kinerja (PK) UPT untuk kegiatan penanganan gangguan spektrum frekuensi radio mengacu pada PK UPT Tahun 2025 dan Nota Dinas Direktur Pengendalian Ditjen Infrastruktur Digital Nomor: 334/DJID.6/PR.01.02/03/2025. Berdasarkan hasil capaian, kinerja UPT telah mencapai 100%, dengan persebaran gangguan didominasi oleh dinas bergerak darat, diikuti dinas penerbangan dan layanan lainnya. Penanganan pada dinas keselamatan seperti penerbangan dan maritim menjadi prioritas utama karena berdampak langsung terhadap keselamatan masyarakat.

Capaian kinerja tersebut memberikan dampak positif berupa terjaganya kualitas layanan komunikasi serta mendukung keselamatan transportasi publik. Selain itu, keberhasilan penanganan gangguan juga berkontribusi dalam menciptakan ekosistem digital yang aman, andal, dan mendukung kelancaran aktivitas masyarakat.

d. Faktor Kendala/Hambatan dan Upaya Percepatan dalam Mencapai Target

Berdasarkan narasi laporan capaian Perjanjian Kinerja (PK) UPT Tahun 2025, meskipun target penanganan gangguan spektrum frekuensi radio telah tercapai 100%, terdapat dinamika lapangan yang memerlukan perhatian, khususnya pada dominasi gangguan dinas bergerak darat serta potensi gangguan pada dinas keselamatan. Di wilayah Pontianak, kendala utama meliputi luasnya wilayah kerja dengan kondisi geografis yang beragam, termasuk daerah perbatasan dan terpencil, serta gangguan yang bersifat intermiten sehingga sulit terdeteksi saat monitoring berlangsung. Selain itu, keterbatasan infrastruktur pendukung dan laporan aduan yang belum lengkap juga mempengaruhi efektivitas pelacakan sumber gangguan.

Upaya yang dilakukan antara lain peningkatan metode monitoring melalui kombinasi *Mobile* dan pemantauan berulang pada lokasi rawan, optimalisasi penggunaan perangkat monitoring, serta penguatan koordinasi dengan instansi terkait dan pengguna frekuensi. Selain itu, dilakukan perbaikan mekanisme pelaporan agar lebih informatif dan akurat. Ke depan, diperlukan pengembangan sistem monitoring yang lebih kontinu di titik strategis serta peningkatan kapasitas SDM guna mendukung penanganan gangguan yang lebih cepat, tepat, dan efektif.

e. Tindak Lanjut

Berikut adalah faktor utama yang berkontribusi terhadap keberhasilan dalam menangani gangguan frekuensi radio:

- **Adanya website** <https://laporgangguanfr.postel.go.id> yang disediakan oleh Direktorat Pengendalian Ditjen Infrastruktur Digital memudahkan dalam melakukan pelaporan gangguan pada pengguna.
- **Kerjasama tim** dalam melaksanakan tugas penanganan gangguan di UPT dalam segi penggunaan dan pemanfaatan kegiatan tersebut dengan lebih berhati hati dan profesional, sehingga tingkat keberhasilan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sangat tinggi.
- **Ketidaktercapaian target** harus di perhatikan karena kegiatan penanganan gangguan melibatkan masyarakat luas dan ada yang mengerti dan tidak mengerti tentang penggunaan frekuensi radio.
- **Peningkatan Pengawasan:** Implementasi sistem pemantauan spektrum radio berbasis AI memungkinkan deteksi gangguan lebih cepat dan akurat.
- **Koordinasi dengan Pihak Terkait:** Kerja sama dengan operator telekomunikasi, penyedia layanan radio, dan regulator meningkatkan efektivitas dalam menyelesaikan gangguan.
- **Penerapan Teknologi Mitigasi:** Penggunaan filter frekuensi dan perangkat mitigasi lainnya membantu mengurangi gangguan sinyal.
- **Kampanye Edukasi:** Sosialisasi kepada pengguna radio mengenai penggunaan frekuensi yang benar membantu mengurangi interferensi yang tidak disengaja.
- **Respon Cepat terhadap Laporan:** Adanya pusat layanan pengaduan yang responsif mempercepat penyelesaian gangguan.

f. Rekomendasi Capaian

Rekomendasi Capaian yang dapat dilakukan dalam agar dapat membantu dalam capaian 100% tetap berkualitas

- Perpanjangan atau pembaruan perjanjian kerjasama dengan Otoritas Bandara terkait akses darurat jika yang akan berguna apabila ada.

Rekomendasi ini memiliki target untuk dapat membuat keamanan penerbangan yang lebih terjamin.

- Pemetaan persebaran gangguan yang terintegrasi dengan menggunakan GIS secara *real-time*. Dengan target pemetaan titik rawan gangguan secara visual dan *real-time*.

g. Efisiensi

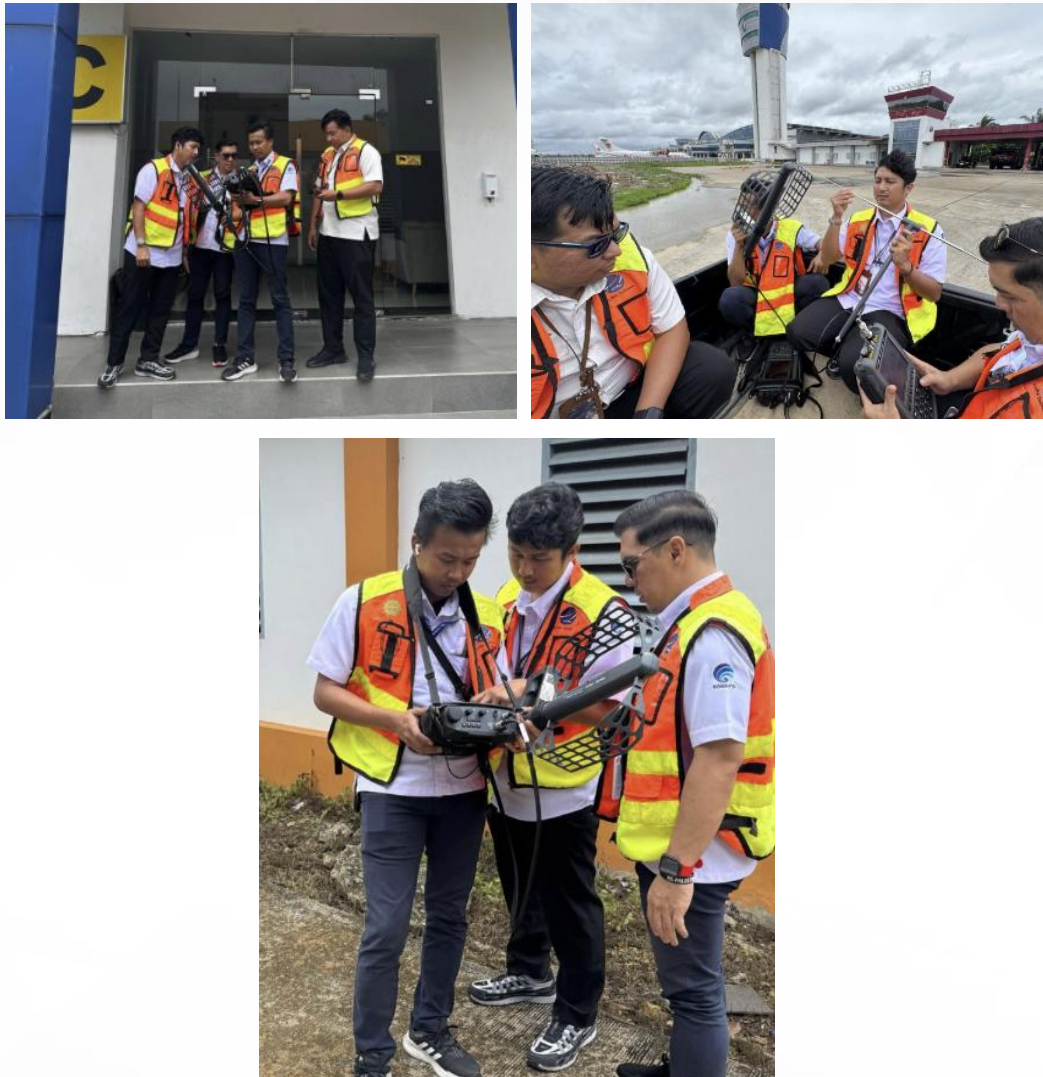
Salah satunya yaitu dibuatnya aplikasi pelaporan aduan gangguan yang disebut Aplikasi *Trouble Ticket*. Aplikasi *Trouble Ticket* ini dibuat bertujuan mempercepat respon penanganan gangguan spektrum frekuensi radio yang terjadi / dilaporkan oleh masyarakat hal ini sudah termasuk efisien dalam hal waktu dan laporan. Berdasarkan penjelasan diatas, diketahui bahwa capaian untuk indikator Persentase (%) Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio telah tercapai sesuai PK yang ditetapkan, karena dapat dilihat dari jumlah aduan dan aduan tertangani pada Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio sehingga dapat disimpulkan bahwa indikator ini tercapai (100%).

h. Implementasi Budaya Nilai BerAKHLAK

Pencapaian indikator penanganan gangguan spektrum frekuensi radio Tahun 2025 tidak terlepas dari penerapan nilai-nilai BerAKHLAK dalam pelaksanaan tugas di UPT. Nilai Berorientasi Pelayanan tercermin dari komitmen petugas dalam merespon setiap aduan gangguan secara cepat, tepat, dan solutif guna menjaga kualitas layanan komunikasi masyarakat. Nilai Akuntabel diwujudkan melalui pelaksanaan penanganan gangguan yang transparan, sesuai prosedur, serta dapat dipertanggungjawabkan. Nilai Kompeten terlihat dari upaya peningkatan kemampuan teknis, penguasaan perangkat monitoring, serta pemanfaatan data dalam proses analisis gangguan.

Selanjutnya, nilai Harmonis dan Kolaboratif tercermin dalam sinergi dengan instansi terkait, operator, serta pengguna frekuensi dalam proses pelacakan dan penyelesaian gangguan. Nilai Loyal diwujudkan melalui komitmen dalam menjalankan tugas sesuai ketentuan serta mendukung kebijakan nasional di bidang pengelolaan spektrum frekuensi radio. Sementara itu, nilai Adaptif terlihat dari kemampuan petugas dalam menyesuaikan diri terhadap perkembangan teknologi dan dinamika gangguan yang semakin kompleks. Penerapan nilai-nilai BerAKHLAK tersebut menjadi fondasi penting dalam memastikan penanganan

gangguan dapat dilaksanakan secara optimal, efektif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.



Gambar 20 Dokumentasi Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio

IK-4 Persentase (%) Tingkat Kepatuhan Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Digital

a. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, pemerintah memiliki kewenangan untuk mengatur, mengawasi, dan mengendalikan penyelenggaraan telekomunikasi, termasuk kewajiban pemenuhan persyaratan teknis terhadap alat dan/atau perangkat telekomunikasi. Ketentuan tersebut bertujuan untuk menjamin terselenggaranya layanan telekomunikasi yang berkualitas, aman, dan bebas dari interferensi yang dapat mengganggu penggunaan spektrum frekuensi radio sebagai sumber daya alam terbatas.

Adanya Indikator Kinerja Tingkat Kepatuhan Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Digital ini menjadi salah satu elemen penting dalam mengukur efektivitas pelaksanaan pengawasan dan pengendalian perangkat telekomunikasi dan digital dan memastikan tingkat kepatuhan terhadap standar teknis dan sertifikasi perangkat terus meningkat. Tingkat Kepatuhan Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Digital mencerminkan keberhasilan Balmon Pontianak dalam menjaga tertib penggunaan perangkat telekomunikasi dan digital, sekaligus mendukung terciptanya ekosistem telekomunikasi yang aman, berkualitas, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Pontianak memiliki peran krusial dalam mengawal kepatuhan standardisasi ini. Mengingat karakteristik wilayah Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan wilayah Internasional, resiko peredaran dan penggunaan perangkat telekomunikasi ilegal atau tidak bersertifikasi menjadi tantangan nyata. Hasil monitoring perangkat di lapangan yang dilakukan oleh Balmon Pontianak menjadi data dasar penting untuk menilai sejauh mana ekosistem digital di daerah telah memenuhi standar teknis yang aman.

b. Capaian Kinerja

Kegiatan monitoring alat dan/atau perangkat telekomunikasi dilakukan terhadap jenis perangkat dengan prioritas yang ditetapkan pada target. Kegiatan monitoring alat/perangkat telekomunikasi dilakukan melalui tahapan sesuai dengan Pedoman Monitoring Alat/Perangkat Telekomunikasi.

Tabel 19 Capaian Tingkat Kepatuhan Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Digital

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban serta pelayanan publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi	Persentase (%) Tingkat Kepatuhan Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Digital	75%	100%	100%

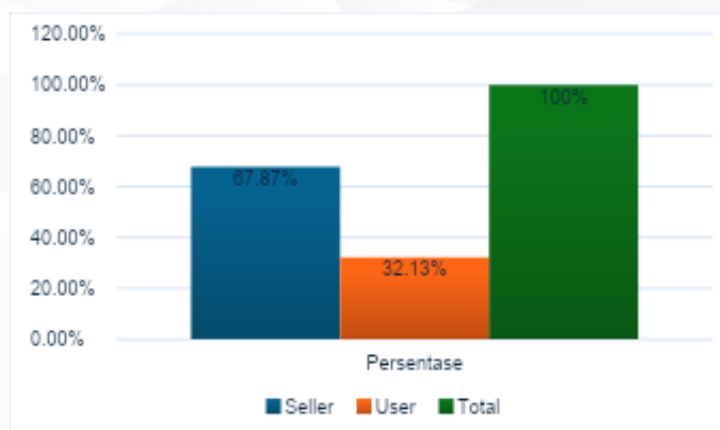
Adapun formula perhitungan adalah sebagai berikut :

$$= \frac{\Sigma \text{Perangkat bersertifikat termonitor} + \Sigma \text{Pelanggaran yg di TL}}{\Sigma \text{Perangkat termonitor}} \times 100\%$$

Tabel 20 Target Jenis Perangkat Prioritas

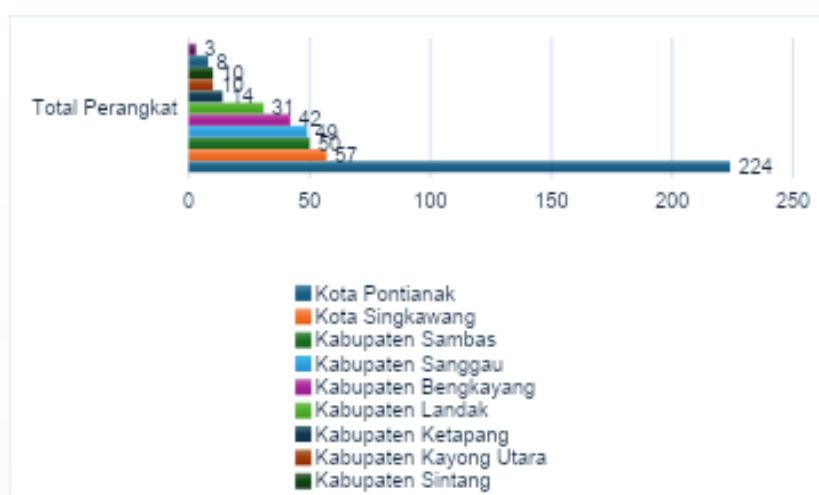
- | | |
|--|---|
| 1. HF All Band Transceiver | 11. Handy Talkie (HT) |
| 2. Mobile Transceiver/Radio Rig | 12. Radio POC |
| 3. Wireless Access Point (Wifi Extender, Wireless Repeater Router) | 13. Set Top Box |
| 4. Pemancar FM | 14. Perangkat Low Power (Wireless Keyboard termasuk Keyboard aksara daerah, True Wireless Sound (TWS), Wireless Microphone, Bluetooth Speaker, Smart Watch) |
| 5. Simbox/Modempool | 15. Optical Line Terminal (OLT) dan Optical Network Terminal (ONT) |
| 6. Fake BTS/IMSI Catcher | 16. Alat Perangkat Telekomunikasi Rakitan |
| 7. Repeater/Penguat Sinyal Seluler | |
| 8. Jammer | |
| 9. GPS Tracker | |
| 10. Microwavelink (IDU/ODU) | |

Balmon Pontianak telah melaksanakan 18 kegiatan pengawasan alat dan/atau perangkat telekomunikasi dan memeriksa total 498 sampel perangkat telekomunikasi telah memiliki sertifikat di sepanjang Tahun 2025.



Gambar 21 Grafik Kategori Pengguna Perangkat

Dari grafik diatas, sebanyak 338 perangkat (67,87%) berasal dari kategori *seller*/penjual perangkat, sedangkan 160 perangkat (32,13%) berasal dari kategori *user*/pengguna perangkat. Dominasi jumlah perangkat pada kategori *seller* menunjukkan bahwa pengawasan lebih banyak difokuskan pada jalur distribusi dan perdagangan perangkat telekomunikasi guna memastikan perangkat yang beredar di masyarakat telah memenuhi persyaratan sertifikasi. Sementara itu, pengawasan terhadap *user* juga tetap dilakukan sebagai upaya memastikan perangkat yang digunakan masyarakat telah sesuai standar teknis dan tidak menimbulkan potensi gangguan frekuensi radio.



Gambar 22 Grafik Sebaran Wilayah Penggunaan Perangkat

Kota Pontianak menjadi wilayah dengan hasil monitoring tertinggi, mencakup 224 perangkat, hasil ini sangat beralasan mengingat Pontianak merupakan Ibu Kota Provinsi sekaligus pusat gerbang perdagangan utama alat/perangkat telekomunikasi di Kalimantan Barat. Jumlah penggunaan perangkat juga cukup

tinggi di beberapa Kabupaten/Kota lainnya. Tiga wilayah strategis yang berbatasan langsung dengan wilayah Internasional, yaitu Kota Singkawang (57 perangkat), Kabupaten Sambas (50 perangkat), dan Kabupaten Bengkayang (42 perangkat), mendapatkan porsi pengawasan yang intensif agar tidak menimbulkan interferensi lintas batas negara.

Sebaran data tersebut menunjukkan bahwa penggunaan alat dan/atau perangkat telekomunikasi dan digital tidak hanya terpusat di perkotaan, tetapi juga telah menjangkau berbagai daerah kabupaten di Kalimantan Barat. Kondisi ini mencerminkan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan telekomunikasi dan perangkat digital dalam mendukung transformasi digital.

Kegiatan monitoring dan penertiban dilakukan terhadap berbagai kategori perangkat telekomunikasi dan digital, baik pada pelaku usaha maupun pengguna perangkat, seperti *Handy Talkie* (HT), *Bluetooth Speaker*, *True Wireless Stereo* (TWS), *Wireless Microphone*, *Wireless Router*, *Set Top Box*, dan perangkat *Low Power*. Seluruh perangkat yang diperiksa telah memenuhi ketentuan sertifikasi teknis sebagaimana diatur dalam regulasi terkait sertifikasi alat/perangkat telekomunikasi, sehingga perangkat yang beredar dan digunakan dinilai telah memenuhi aspek legalitas, keamanan penggunaan dan ketertiban penggunaan spektrum frekuensi radio.

Tabel 21 Pelaksanaan Kegiatan Tingkat Kepatuhan Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Digital

No	Tanggal Awal	Tanggal Akhir	Kabupaten / Kota
1	25-02-2025	01-03-2025	Kab. Landak
2	03-03-2025	07-03-2025	Kab. Sanggau
3	11-03-2025	15-03-2025	Kota Singkawang
4	11-03-2025	15-03-2025	Kab. Sambas
5	26-03-2025	07-04-2025	Kota Pontianak
6	15-04-2025	19-04-2025	Kab. Bengkayang
7	05-05-2025	09-05-2025	Kab. Sambas
8	05-05-2025	09-05-2025	Kota Pontianak
9	05-05-2025	09-05-2025	Kab. Bengkayang
10	16-09-2025	19-09-2025	Kota Pontianak
11	07-10-2025	11-10-2025	Kab. Melawi, Kab Sanggau, Kab Sintang
12	27-10-2025	31-10-2025	Kota Pontianak
13	27-10-2025	31-10-2025	Kab. Kubu Raya
14	27-10-2025	31-10-2025	Kota Singkawang

15	04-11-2025	08-11-2025	Kab. Ketapang
16	04-11-2025	08-11-2025	Kab. Kayong Utara
17	17-11-2025	17-11-2025	Kota Pontianak
18	25-11-2025	29-11-2025	Kota Singkawang
Total		18 Surat Pelaksanaan Tugas	

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui penerbitan 18 Surat Pelaksanaan Tugas yang mencakup monitoring perangkat telekomunikasi dan digital di wilayah Kalimantan Barat. Sebaran pelaksanaan kegiatan tersebut menunjukkan bahwa pengawasan kepatuhan standar teknis perangkat telekomunikasi dan digital dilakukan secara menyeluruh dan merata. Wilayah dengan aktivitas penggunaan perangkat yang tinggi menjadi prioritas dalam pelaksanaan monitoring guna memastikan perangkat yang beredar dan digunakan telah memenuhi standar teknis dan memiliki sertifikasi sesuai ketentuan yang berlaku. Penjadwalan kegiatan tidak menumpuk di satu waktu, serta didukung oleh kemampuan tim untuk melakukan pengawasan yang merata demi menjamin tercapainya target 100% kepatuhan standar teknis perangkat digital di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Barat.

Tabel 22 Perbandingan Target dan Capaian Indikator Kinerja (IK-4) 2022-2025

Indikator Kinerja	2022		2023		2024		2025	
	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
Tingkat Kepatuhan Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Digital	-	-	-	-	-	-	75%	100%

Tingkat kepatuhan Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Digital menyentuh 100% mencerminkan keberhasilan dari kombinasi strategi preventif yang dilakukan secara berkelanjutan oleh Balmon Pontianak. Hal ini membuktikan bahwa para pelaku usaha, distributor dan end user di Kalimantan Barat telah memiliki tingkat disiplin hukum mandiri yang tinggi sehingga hanya mengedarkan perangkat yang memenuhi standar teknis baku sesuai regulasi.

BENCHMARK CAPAIAN KINERJA DENGAN UPT LAINNYATabel 23 *Benchmark* Capaian Kinerja (IK-4) dengan UPT Lain

Indikator Kinerja	UPT Ditjen Infrastruktur Digital	Target %	Capaian %	Keterangan
Persentase (%)Tingkat Kepatuhan Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Digital	Balmon Pontianak	75	100	Persentase Capaian Balmon Pontianak dan Balmon Banjarmasin sama-sama 100%
	Balmon Banjarmasin	75	100	

Hasil komparasi ini merupakan parameter penting untuk mengukur posisi, efektivitas, serta kontribusi mutu pelayanan Balmon Pontianak dalam skala nasional serta mengetahui kelebihan dan kekurangan dalam pelaksanaan tugasnya sehingga mampu meningkatkan kualitas pengawasan, efektivitas kerja, dan capaian indikator kinerja secara berkelanjutan. Perbandingan diatas menunjukkan kedua UPT DJID berhasil melampaui target yang telah ditetapkan.

c. Inovasi/Strategi Keberhasilan

Salah satu strategi utama yang diterapkan adalah pengawasan berbasis data sertifikasi perangkat melalui pemanfaatan database sertifikasi DJID (Aplikasi SIRANI) untuk memastikan alat dan/atau perangkat telekomunikasi yang beredar maupun digunakan telah memenuhi standar teknis sesuai ketentuan yang berlaku. Balmon Pontianak juga menerapkan strategi monitoring terpadu yaitu pengawasan dilakukan pada pusat penjualan perangkat telekomunikasi, lokasi penggunaan perangkat, hingga pemantauan perangkat yang diperdagangkan melalui platform digital dan *Marketplace* online. Pendekatan ini membantu memperluas jangkauan pengawasan serta meminimalisir potensi peredaran perangkat ilegal atau tidak bersertifikat.

Inovasi lain yang mendukung keberhasilan capaian adalah pelaksanaan edukasi dan sosialisasi secara berkelanjutan kepada masyarakat dan pelaku usaha terkait pentingnya penggunaan perangkat bersertifikat. Melalui pendekatan persuasif dan komunikasi aktif, tingkat kesadaran dan kepatuhan terhadap standar teknis perangkat telekomunikasi semakin meningkat. Strategi

keberhasilan juga diperkuat melalui koordinasi dan kolaborasi lintas instansi, termasuk dengan pemerintah daerah, pelaku usaha, serta pihak terkait lainnya dalam mendukung pengawasan perangkat telekomunikasi dan digital. Sinergi tersebut membantu mempercepat proses identifikasi dan penanganan terhadap perangkat yang tidak memenuhi ketentuan teknis.

d. Faktor Kendala/Hambatan dan Upaya Percepatan

Salah satu kendala utama adalah luasnya wilayah kerja yang mencakup berbagai kabupaten/kota di Kalimantan Barat, termasuk wilayah perbatasan dan daerah dengan akses yang cukup terbatas. Kondisi geografis tersebut menyebabkan pelaksanaan monitoring dan pengawasan perangkat memerlukan waktu, tenaga, dan koordinasi yang lebih optimal. Perkembangan teknologi dan perdagangan digital yang sangat cepat juga menjadi tantangan tersendiri, terutama terkait peredaran perangkat telekomunikasi melalui *Marketplace* dan penjualan online. Masih terdapat potensi masuknya perangkat yang belum memiliki sertifikasi atau belum memenuhi standar teknis sehingga membutuhkan pengawasan yang lebih intensif dan berkelanjutan.

Hambatan lainnya adalah masih adanya pelaku usaha maupun pengguna perangkat yang belum sepenuhnya memahami kewajiban penggunaan perangkat bersertifikat serta pentingnya kepatuhan terhadap standar teknis. Perbedaan tingkat pemahaman masyarakat terkait regulasi perangkat telekomunikasi juga menjadi tantangan dalam pelaksanaan edukasi dan pengawasan.

Sebagai upaya percepatan Balmon Pontianak secara aktif melakukan inspeksi fisik dan pemantauan siber online terhadap pelapak yang berdomisili di Kalimantan Barat. Jika ditemukan penjualan perangkat ilegal, tindakan pembinaan langsung dilakukan. Meningkatkan frekuensi sosialisasi secara daring maupun luring dengan fokus edukasi cara mengecek sertifikasi perangkat secara mandiri melalui SIRANI. Target edukasi diperluas ke komunitas tertentu dan pelaku UMKM digital.

e. Tindak Lanjut

Setiap data yang diperoleh dari hasil pemeriksaan terhadap 498 sampel perangkat melalui 18 Surat Perintah Tugas (SPT) sepanjang tahun 2025 kini sepenuhnya diunggah ke dalam Aplikasi SMART. Tindak lanjut ini mencakup pengarsipan digital nomor sertifikasi DJID, identitas *Seller/User*, serta koordinat

geografis lokasi *User* pemancar yang telah diperiksa. Digitalisasi ini memastikan adanya rekam jejak yang valid, sehingga apabila di masa mendatang data yang dibutuhkan dapat ditarik secara instan oleh sistem.

Aplikasi SMART dimanfaatkan sebagai alat bantu monitoring internal yang mengevaluasi capaian terhadap target secara *real-time*. Dengan sistem ini, fungsi pengawasan dapat langsung memantau skala kepatuhan perangkat. Sebagai bentuk transparansi pelayanan publik, data yang tercatat di dalam aplikasi SMART digunakan sebagai bahan evaluasi. Balmon Pontianak juga terus melakukan optimalisasi penggunaan aplikasi SMART melalui peningkatan pemahaman petugas, pembaruan data pengawasan secara berkala, serta integrasi pelaksanaan monitoring lapangan dengan sistem digital yang telah tersedia.

f. Rekomendasi Capaian

Balmon Pontianak perlu terus mempertahankan dan meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap perangkat telekomunikasi dan digital di wilayah kerja. Salah satu rekomendasi utama adalah penguatan pengawasan berbasis digital melalui optimalisasi pemanfaatan Aplikasi SMART dan sistem data sertifikasi perangkat untuk mendukung proses monitoring, validasi, serta pelaporan hasil pengawasan secara lebih cepat dan terintegrasi.

Rekomendasi lainnya yaitu menggeser pola sosialisasi konvensional menjadi digital yang interaktif dan berbasis komunitas. Balmon Pontianak dapat merangkul komunitas digital lokal, asosiasi UMKM, serta komunitas pengguna radio komunikasi untuk mengedukasi masyarakat mengenai bahaya penggunaan perangkat ilegal serta cara mudah mengecek keaslian sertifikasi perangkat secara mandiri melalui aplikasi SIRANI.

g. Efisiensi

Efisiensi waktu di lapangan didukung penuh oleh pemanfaatan *database* sertifikasi DJID yang terintegrasi secara digital. Saat melakukan *Sampling* di toko ponsel maupun stasiun pemancar, petugas dapat melakukan validasi nomor sertifikasi dan ID pelanggan secara *Real-time* di lokasi. Digitalisasi proses cek silang ini memangkas waktu tunggu birokrasi penindakan, meniadakan kebutuhan dokumen fisik (*paperless*), dan mempercepat penyelesaian laporan hasil pengawasan secara instan.

Efisiensi pengawasan juga dicapai melalui ketepatan penentuan objek *Sampling*. Dibandingkan harus menyisir pengguna akhir (*User*) secara acak yang membutuhkan energi operasional sangat besar, Balmon Pontianak mengalokasikan porsi terbesar pengawasan pada kluster perdagangan hulu (*Seller*) sebesar **67,87% (338 perangkat)**. Dengan memfokuskan pemeriksaan pada distributor dan retail besar di pusat perekonomian seperti Kota Pontianak dan Singkawang, Balmon secara efisien dapat menyaring kepatuhan perangkat dalam jumlah besar sekaligus, sebelum perangkat tersebut tersebar luas ke masyarakat.

h. Implementasi Budaya Nilai BerAKHLAK

Nilai Berorientasi Pelayanan diwujudkan melalui pelaksanaan pengawasan dan monitoring perangkat telekomunikasi yang dilakukan secara responsif, informatif, dan solutif kepada pelaku usaha maupun masyarakat. Petugas memberikan edukasi dan pendampingan terkait kewajiban penggunaan perangkat bersertifikat sehingga masyarakat memperoleh pemahaman yang baik mengenai pentingnya kepatuhan terhadap standar teknis. Nilai Akuntabel diterapkan melalui pelaksanaan pengawasan yang dilakukan secara transparan, terukur, dan sesuai ketentuan regulasi yang berlaku. Pemanfaatan aplikasi SMART serta sistem data sertifikasi perangkat mendukung proses monitoring dan pelaporan hasil pengawasan secara tertib dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam penerapan nilai Kompeten, pegawai Balmon Pontianak terus meningkatkan kemampuan teknis dan pemahaman terhadap perkembangan teknologi telekomunikasi dan digital, termasuk regulasi sertifikasi perangkat dan metode pengawasan berbasis digital. Peningkatan kompetensi ini mendukung efektivitas pelaksanaan monitoring dan validasi perangkat di lapangan. Nilai Harmonis tercermin melalui kerja sama dan komunikasi yang baik antarpegawai maupun koordinasi dengan pelaku usaha, masyarakat, dan instansi terkait dalam mendukung pengawasan perangkat telekomunikasi secara kondusif dan kolaboratif. Selanjutnya, nilai Loyal diwujudkan melalui komitmen pegawai dalam menjalankan tugas pengawasan secara konsisten demi menjaga tertib penggunaan perangkat telekomunikasi dan melindungi masyarakat dari penggunaan perangkat ilegal atau tidak sesuai standar teknis. Nilai Adaptif terlihat dari kemampuan Balmon Pontianak dalam memanfaatkan teknologi digital, seperti penggunaan aplikasi SMART dan pengawasan berbasis data sertifikasi,

guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan monitoring perangkat telekomunikasi dan digital.

Adapun nilai Kolaboratif diterapkan melalui sinergi dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik internal maupun eksternal, dalam mendukung pelaksanaan pengawasan dan peningkatan kepatuhan standar teknis perangkat telekomunikasi dan digital di wilayah kerja Kalimantan Barat. Dengan implementasi budaya kerja BerAKHLAK tersebut, Balmon Pontianak mampu menjaga kualitas pengawasan, meningkatkan tingkat kepatuhan standar teknis perangkat telekomunikasi dan digital, serta mendukung terciptanya ekosistem telekomunikasi yang tertib, aman, dan berkualitas.



Gambar 23 Kegiatan Pemantauan Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Digital

IK-5 Persentase (%) Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring dari Stasiun Monitor Frekuensi Radio di UPT

a. Latar Belakang

Spektrum frekuensi radio merupakan sumber daya alam terbatas yang penggunaannya wajib diawasi dan dikendalikan secara ketat guna mencegah timbulnya interferensi yang dapat merugikan masyarakat, penyelenggara telekomunikasi, serta kepentingan pertahanan dan keamanan negara. Sebagai institusi yang bertanggung jawab atas pengawasan spektrum frekuensi radio di wilayah Kalimantan Barat, Balai Monitor (Balmon) Kelas II Pontianak memiliki kewajiban untuk memastikan seluruh perangkat Sistem Monitoring Frekuensi Radio (SMFR) berfungsi secara optimal setiap saat.

Perangkat monitoring yang meliputi stasiun tetap (TCI dan LS Telcom 2016) serta stasiun bergerak (mobil monitoring) memerlukan kegiatan pemeliharaan yang terencana, terukur, dan berkelanjutan. Tanpa pemeliharaan yang memadai, potensi kegagalan perangkat dapat mengganggu pelaksanaan tugas pengawasan frekuensi, khususnya di wilayah dengan akses terbatas seperti Kabupaten Kapuas Hulu, Sintang, dan Ketapang.

b. Capaian Kinerja

Kinerja operasional stasiun monitoring sepanjang tahun 2025 menunjukkan stabilitas yang sangat baik dengan rata-rata realisasi bulanan mencapai 96,95%.

Tabel 24 Capaian Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring dari Stasiun Monitor Frekuensi Radio di UPT

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban serta pelayanan publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi	Persentase % Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring dari Stasiun Monitor Frekuensi Radio di UPT	85%	96.95%	114.06%

Berdasarkan data realisasi bulanan, rata-rata capaian SLA tahunan seluruh stasiun (tetap dan bergerak) adalah sebesar 96,95% (dibulatkan). Capaian ini melampaui target tahunan yang ditetapkan sebesar 85%, sehingga menunjukkan kinerja pemeliharaan yang sangat baik meskipun terdapat kendala teknis pada

beberapa stasiun, khususnya Stasiun Ketapang. Stasiun Ketapang mengalami kerusakan pada perangkat utama sepanjang tahun 2025 dan telah dilaporkan ke Direktorat Pengendali ID. Meskipun secara fungsional stasiun tersebut tidak dapat digunakan sejak Januari 2025, capaian SLA tetap diperhitungkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Capaian indikator kinerja dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 25 Perbandingan Target dan Capaian Indikator Kinerja (IK-5) 2022-2025

Indikator Kinerja	2022		2023		2024		2025	
	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
Persentase (%) Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring dari Stasiun Monitor Frekuensi Radio di UPT	95%	95.2%	95%	100%	95%	100%	85%	114.06%

Jumlah stasiun yang menjadi objek pemeliharaan dan diperhitungkan dalam pencapaian SLA / Perjanjian Kinerja tahun 2025 adalah sebanyak 6 (delapan) stasiun, dengan rincian sebagai berikut:

a. Stasiun Tetap

Tabel 26 Lokasi Stasiun Tetap Balmon Pontianak

No	Jenis Perangkat	Lokasi	Kabupaten/Kota
1	TCI	Pontianak	Kota Pontianak
2	TCI	Singawang	Kota Singawang
3	TCI	Sambas	Kab. Sambas
4	LS Telcom	Sintang	Kab. Sintang
5	LS Telcom	Ketapang	Kab. Ketapang
6	LS Telcom	Kapuas Hulu	Kab. Kapuas Hulu

b. Stasiun Bergerak

Jumlah stasiun bergerak di Balai Monitor SFR Kelas II Pontianak adalah sebagai berikut :

- Mobil Monitoring *Ford Everest*
- Mobil Monitoring *Toyota Hilux*

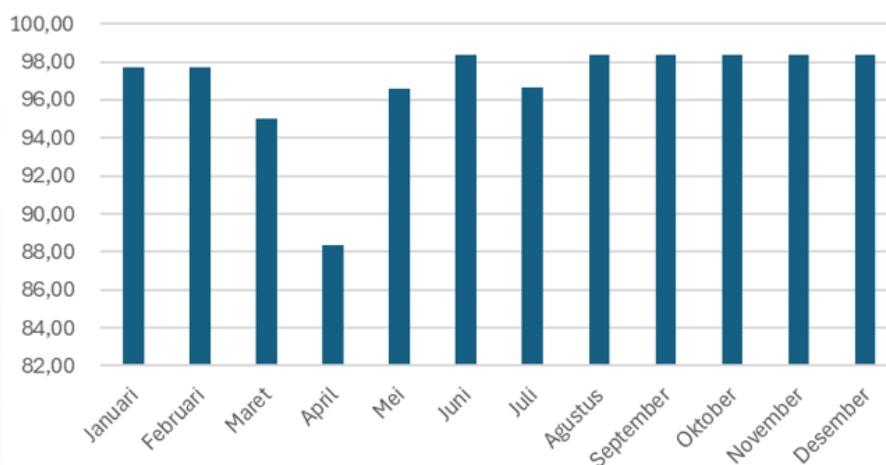
Berdasarkan ketentuan yang berlaku, target SLA untuk pemeliharaan perangkat monitoring spektrum frekuensi radio sesuai dengan Perjanjian Kinerja (PK) "Persentase (%) terjaganya operasional dan fungsi monitoring dari stasiun monitor frekuensi radio di UPT" adalah sebesar **85% setiap bulan**. Ketentuan pencapaian bulanan adalah sebagai berikut:

1. Apabila dalam 1 bulan (minimal 4 minggu) stasiun *transportable* dapat berfungsi dan melakukan monitoring frekuensi dengan frekuensi pengambilan data minimal 1 kali per minggu, maka capaian diberi nilai **100%**.
2. Jika dalam 1 bulan hanya dapat melakukan monitoring selama 3 minggu atau kurang, maka dihitung 0%, kecuali telah dilaporkan ke pusat sejak awal terjadinya kendala, maka akan diberikan nilai **80%**.

Tabel 27 Realisasi Capaian Bulanan terjaganya operasional dan fungsi monitoring dari stasiun monitor frekuensi radio di UPT

Bulan	Capaian SLA/PK (%)	Laporan Kerusakan Bulan Berjalan	Kegiatan Pemeliharaan di Lokasi Stasiun
Januari	97,70	Stasiun <i>Transportable</i> Ketapang tidak dapat difungsikan karena kerusakan pada perangkat utama	Relokasi Stasiun Ketapang dari Kantor Pos ke Gedung Hotel
Februari	97,70	<i>Router</i> Ketapang dinonaktifkan sementara	Pemeliharaan preventif ke Stasiun Sambas & Singkawang
Maret	95,00	Pengambilan data mingguan di beberapa <i>site</i> tidak terpenuhi karena terjadi beberapa kerusakan di <i>site</i>	Pemeliharaan ke Putussibau (penggantian <i>Router & Stabilizer</i>)
April	88,34	Pengambilan data mingguan tidak terpenuhi karena kerusakan perangkat utama dan pendukung	Tidak ada kegiatan ke lokasi <i>site</i>
Mei	96,60	Akses ke <i>site Transportable</i> Ketapang dapat dilakukan, namun masih terdapat kerusakan di perangkat utama	Inspeksi ke Ketapang (penggantian PSU CCTV, PSU <i>Router</i> , PSU DVR)

Juni	98,34	Site Singkawang mengalami gangguan internet (telah normal kembali)	Tidak ada kegiatan ke lokasi <i>site</i>
Juli	96,66	Site Singkawang mengalami gangguan (alarm pada UPS)	Inspeksi preventif ke Kab. Sambas
Agustus	98,34		Inspeksi ke Singkawang (perbaikan UPS, Adaptor Receiver)
September	98,34	Akses ke <i>site Transportable</i> Ketapang dapat dilakukan, namun masih terdapat kerusakan di perangkat utama	Inspeksi ke Ketapang untuk pengecekan kondisi perangkat
Oktober	98,34		Tidak ada kegiatan ke lokasi <i>site</i>
November	98,34		Pemeliharaan preventif ke Sambas & perbaikan CCTV Singkawang
Desember	98,34	Router Ketapang masih dinonaktifkan sementara	Tidak ada kegiatan ke lokasi <i>site</i>



Gambar 24 Grafik capaian SLA pada IK-5

BENCHMARK CAPAIAN KINERJA DENGAN UPT LAINNYA

Guna mengukur tingkat efektivitas, posisi relatif, serta kualitas tata kelola operasional infrastruktur di lingkungan Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Pontianak melakukan evaluasi komparatif (*Benchmarking*) horizontal bersama Unit Pelaksana Teknis (UPT)

sejenis. Analisis perbandingan ini difokuskan pada Indikator Kinerja 5 yaitu Persentase (%) Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring dari Stasiun Monitor Frekuensi Radio di UPT pada tahun anggaran 2025. Berikut adalah tabel perbandingan capaian kinerja antar-UPT:

Tabel 28 *Benchmark* Capaian Kinerja (IK-5) dengan UPT Lain

Indikator Kinerja	UPT Ditjen Infrastruktur Digital	Target %	Capaian %	Keterangan
Persentase (%) Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring dari Stasiun Monitor Frekuensi Radio di UPT	Balmon Pontianak	85	114.06	Persentase Capaian Balmon Pontianak dan Balmon Palembang sama-sama melampaui target
	Balmon Palembang	85	117.65	

Telah dilakukan perbandingan capaian kinerja antar UPT Ditjen Infrastruktur Digital yaitu antara Balmon Pontianak dan Balmon Palembang. Balmon Pontianak memiliki nilai capaian 114.06% dan untuk Balmon Palembang yaitu 117.65% pada SLA Operasional dan Fungsi Monitoring dari Stasiun Monitor Frekuensi Radio. Data *Benchmark* ini digunakan untuk upaya dalam peningkatan kualitas dan akan menjadi perbaikan untuk mencapai pencapaian kinerja di tahun yang akan datang.

c. Inovasi/Strategi Keberhasilan

Inovasi Capaian realisasi sebesar 114,06 % terhadap target menunjukkan bahwa seluruh perangkat monitoring berada dalam kondisi siap operasi sepanjang tahun 2025. Adapun aktor Pendukung Keberhasilan yaitu:

- ✓ Optimalisasi Manajemen Pemeliharaan

Tim Kerja SPML melakukan pemeliharaan preventif secara pada seluruh *site*. Fokus utama dilakukan pada sistem catu daya cadangan (UPS) untuk menjamin kontinuitas suplai listrik saat terjadi gangguan pada jaringan utama dan juga menjaga koneksi internet tetap terhubung antar perangkat dilapangan dan pusat *Remote monitoring*nya berfungsi normal.

- ✓ Inovasi Manajemen Data

Penggunaan sistem pelaporan inventaris digital yang memudahkan teknisi/perawat alat dalam memperbarui kondisi perangkat secara *real-time*, sehingga setiap potensi kerusakan dapat dideteksi dan ditangani lebih awal sebelum menyebabkan *Downtime*.

✓ Koordinasi Tim

Respon cepat dari tim teknis sarana prasarana dalam melakukan perbaikan gangguan pada link komunikasi data maupun masalah kelistrikan di *site* remote

d. Faktor Kendala/Hambatan dan Upaya Percepatan

Dalam menjaga stabilitas operasional stasiun monitoring, terdapat beberapa hambatan teknis dan non-teknis yang memengaruhi tingkat ketersediaan perangkat. Pertama, fluktuasi daya listrik dan risiko sambaran petir di beberapa lokasi stasiun tertentu berpotensi merusak komponen perangkat sensitif. Kedua, kendala pada konektivitas jaringan internet yang kurang stabil di area remote menyebabkan terganggunya pengiriman data hasil monitoring ke pusat data. Ketiga, adanya kendala administratif pada stasiun monitoring yang menggunakan sistem listrik Prabayar (token). Proses pengisian ulang token sering kali memerlukan waktu karena harus berkoordinasi dengan pihak ketiga atau pemilik lahan tempat alat monitoring ditempatkan, sehingga jika terjadi keterlambatan koordinasi, perangkat berisiko mengalami *Downtime* sementara.

Guna mengatasi hambatan tersebut, Balai Monitor Pontianak telah melakukan langkah-langkah strategis, antara lain:

1. Melakukan penguatan perlindungan perangkat melalui penambahan kapasitas Uninterruptible Power Supply (UPS) serta instalasi sistem grounding yang lebih mumpuni.
2. Melakukan koordinasi intensif dan menyusun nota kesepahaman (MoU) atau prosedur komunikasi yang lebih ringkas dengan pihak penyedia lokasi untuk mempercepat proses pengisian token listrik dan pemeliharaan akses internet.
3. Mengusulkan penggunaan sistem monitoring daya jarak jauh agar tim teknis dapat menerima notifikasi dini sebelum saldo token habis atau saat kualitas sinyal internet menurun, sehingga langkah antisipasi dapat diambil lebih cepat guna menjamin ketersediaan layanan tetap di atas standar SLA yang ditetapkan.

e. Tindak Lanjut

Sebagai langkah konkret dalam merespons kendala operasional yang dihadapi, Balai Monitor Pontianak telah menyusun rencana tindak lanjut sebagai berikut:

1. Digitalisasi Monitoring Daya: Melakukan instalasi perangkat sensor atau sistem notifikasi saldo token listrik yang terintegrasi secara daring, sehingga pengisian ulang dapat direncanakan sebelum saldo kritis tanpa harus menunggu perangkat padam.
2. Optimalisasi Jalur Komunikasi: Memperbarui prosedur koordinasi dengan pihak pemilik lahan atau penyedia lokasi penempatan alat melalui pembentukan grup komunikasi siaga untuk memangkas birokrasi waktu dalam proses pengisian token dan perbaikan akses internet.
3. Audit Konektivitas: Melakukan evaluasi teknis terhadap penyedia layanan internet (ISP) di lokasi-lokasi stasiun monitoring yang memiliki sinyal lemah dan mempertimbangkan penggunaan teknologi sinyal seperti *Dual-provider* atau satelit pada titik-titik krusial.

f. Rekomendasi Capaian

Guna mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja di masa mendatang, direkomendasikan beberapa langkah strategis sebagai berikut:

1. Transisi Sistem Kelistrikan: Direkomendasikan untuk mengusulkan perubahan sistem kelistrikan dari prabayar (token) menjadi pascabayar pada lokasi stasiun monitoring tertentu untuk menghilangkan risiko *Downtime* akibat keterlambatan pengisian saldo.
2. Peningkatan Infrastruktur Jaringan: Perlu dilakukan pengadaan perangkat penguat sinyal atau penggantian moda koneksi di wilayah dengan kendala sinyal internet kronis guna memastikan data monitoring terkirim secara *Real-time* dan akurat.
3. Penguatan Kapasitas *Backup*: Menambah kapasitas cadangan daya (UPS) yang mampu menyokong durasi operasional perangkat lebih lama, sebagai antisipasi jika terjadi kendala pada suplai daya utama maupun hambatan dalam proses koordinasi lapangan.

g. Efisiensi

Capaian kinerja pada Indikator Kinerja 5 mencerminkan penggunaan sumber daya yang efisien melalui beberapa aspek strategis, antara lain:

1. Optimalisasi Pemeliharaan Mandiri: Pelaksanaan pemeliharaan rutin dan penanganan gangguan ringan yang dilakukan secara mandiri oleh tim teknis internal Balmon Pontianak telah mengurangi ketergantungan pada jasa pihak ketiga. Strategi ini terbukti mampu menekan biaya belanja jasa pemeliharaan tahunan secara signifikan.
2. Manajemen Waktu Layanan: Dengan diterapkannya prosedur koordinasi yang lebih ringkas terkait pengisian token listrik dan pemulihan jaringan internet, waktu henti perangkat (*Downtime*) dapat ditekan seminimal mungkin. Efisiensi waktu ini memastikan bahwa investasi negara pada perangkat monitoring dapat memberikan nilai manfaat (utilitas) yang maksimal dalam menjaga ketertiban spektrum frekuensi radio selama 24 jam penuh. Kecepatan tim teknis dalam merespon gangguan link komunikasi data pada stasiun remote (seperti pada *site* Ketapang) memastikan durasi *Downtime* tetap berada di bawah ambang batas toleransi SLA.

h. Implementasi Budaya Nilai BerAKHLAK

Dalam upaya mencapai target operasional stasiun monitoring, Tim Kerja SPML secara konsisten menginternalisasi nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK sebagai pondasi pelaksanaan tugas di lapangan:

- Kompeten: Realisasi SLA (melampaui target 85%) merupakan bukti kompetensi teknis tim dalam mendiagnosa gangguan secara cepat. Tim terus meningkatkan kapabilitas diri melalui inovasi digitalisasi pelaporan inventaris guna menjawab tantangan pengelolaan aset yang semakin kompleks dan memerlukan ketelitian tinggi.
- Harmonis: Keberhasilan menjaga operasional 6 *site* stasiun monitor yang tersebar secara geografis tidak lepas dari kerja sama yang harmonis. Tim mengutamakan koordinasi yang inklusif antara personil teknis di kantor induk dengan petugas perawat alat di *site* remote, sehingga setiap kendala teknis dapat diselesaikan tanpa hambatan komunikasi.





Gambar 25 Kegiatan inspeksi dan pemeliharaan stasiun *transportable*

IK-6 Persentase (%) Penanganan Sanksi Denda Administratif**a. Latar Belakang**

Penanganan sanksi denda administratif memiliki peran ganda yang strategis. Pertama sebagai instrumen pengendalian dan pengawasan agar senantiasa patuh pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 sehingga tidak lagi menitikberatkan pada sanksi pidana sebagai langkah utama, melainkan mengedepankan sanksi administratif guna menciptakan kepastian hukum yang kondusif. Kedua sebagai salah satu komponen Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang krusial untuk mendukung pembangunan nasional sesuai Peraturan Direktur Jenderal SDPPI Nomor 03 Tahun 2024 yang menjadi pedoman teknis penagihan guna memastikan setiap denda yang dikenakan dapat terkelola secara optimal sebagai bagian dari penerimaan negara.

Balmon Pontianak sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen Infrastruktur Digital menjadi garda terdepan dalam mendeteksi penggunaan frekuensi yang tidak memiliki Izin Stasiun Radio (ISR) atau perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikat di Wilayah Kalimantan Barat. Hasil dari pemantauan dan penertiban penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan/atau Alat Perangkat Telekomunikasi inilah yang menjadi data utama dalam proses pengenaan sanksi administratif.

Melalui penguatan penanganan sanksi denda administratif ini diharapkan meningkatkan kesadaran semua pihak akan pentingnya legalitas perizinan dan standar teknis perangkat telekomunikasi. Mengingat Kalimantan Barat yang langsung berbatasan dengan Negara Malaysia maka penanganan sanksi denda yang tegas dapat memberikan manfaat berupa perlindungan ekosistem digital serta meminimalisir interferensi penggunaan spektrum frekuensi radio lintas batas di Wilayah Perbatasan RI – Malaysia.

b. Capaian Kinerja

Pelanggaran Izin Stasiun Radio (ISR) adalah fokus utama dari denda administratif yang dicatat oleh Balai Monitor SFR Kelas II Pontianak. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat berupa penggunaan frekuensi tanpa izin dan tidak sesuai parameter teknis.

Tabel 29 Capaian Penanganan Sanksi Denda Administratif

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban serta pelayanan publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi	Persentase (%) Penanganan Sanksi Denda Administratif	80%	99.39%	99.39%

Adapun formula perhitungan adalah sebagai berikut :

$$\frac{\sum \text{Inv. Denda yang terbayar} + (\text{Bobot} \times \text{Tindak Lanjut Inv. Denda Belum terbayar}) + \text{Inv. Baru Belum Jatuh Tempo}}{\sum \text{Inv Denda Administratif}} \times 100\%$$

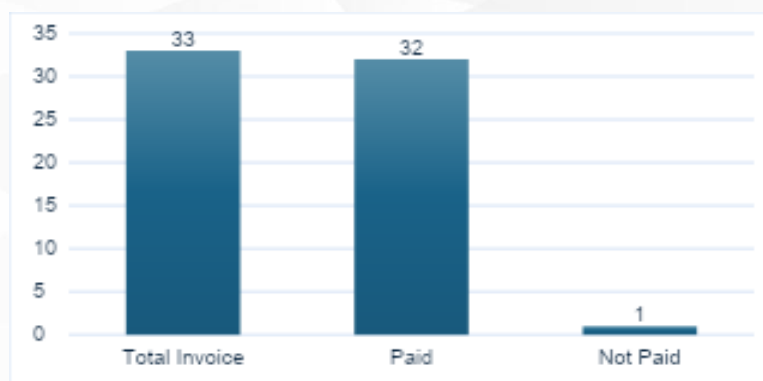
Pelanggaran Total *Invoice* Denda Administratif:

- *Invoice* Aktif
- Exclude *Invoice* Expired dan Canceled

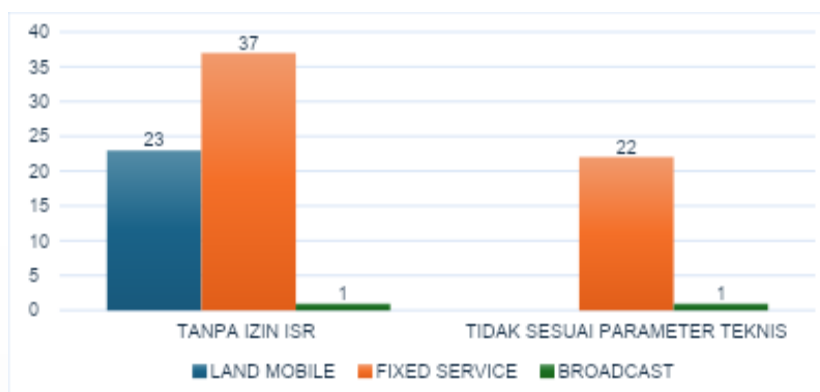
Tindak Lanjut *Invoice* Denda Belum Terbayar berupa:

- Penyampaian Surat Reminder
- Hasil Klarifikasi dengan UPT untuk Denda Belum Terbayar
- Bobot Tindak Lanjut *Invoice* Berdasarkan Surat Reminder
 - a. Reminder 1: 0,9
 - b. Reminder 2: 0,8
 - c. Reminder 3: 0.7
 - d. Pelimpahan KPKNL: 0.6

Pada Tahun 2025 ditetapkan Perjanjian Kinerja untuk Indikator Kinerja Penanganan Sanksi Denda Administratif dengan Target 80% dan Balmon Pontianak mencapai realisasi sebesar 99.39%. Berdasarkan rekapitulasi data, total denda administratif yang berhasil diterbitkan dan ditagihkan sepanjang Tahun 2025 adalah 33 *Invoice* dengan nominal tagihan mencapai Rp186.253.284 yang berasal dari berbagai kegiatan Pemantauan SFR/APT dan Penertiban Nasional di sejumlah Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat.

Gambar 26 Grafik *Invoice Sanksi Denda Tahun 2025*

Melihat data yang terlampir, Total 33 *Invoice* sanksi denda administratif yang diterbitkan oleh Balai Monitor SFR Kelas II Pontianak, sebanyak 32 *Invoice* berstatus *Paid* (Lunas), sementara 1 *Invoice* yang berstatus *Not Paid* (Belum Lunas) hingga Tahun 2025 berakhir. Terhadap 1 *Invoice* yang masih berstatus *Not Paid*, saat ini sedang berjalan program keringanan pembayaran dengan cara diangsur setiap bulan sesuai dengan prosedur pada regulasi yang berlaku. Hal ini menjadi fokus kedepan untuk dapat terselesaikan 100%.

Gambar 27 Jenis Pelanggaran Pada *Sub Service*

Balai Monitor SFR Kelas II Pontianak telah melakukan identifikasi terhadap jenis pelanggaran di Wilayah Kalimantan Barat. Data pelanggaran diklasifikasikan menjadi dua jenis utama yaitu Tanpa Izin ISR dan Tidak Sesuai Parameter Teknis. Pelanggaran pada *Sub Service Fixed Service*, *Land Mobile* dan *Broadcast* menunjukkan bahwa dibutuhkan peningkatan pengawasan terhadap pemantauan penggunaan SFR secara lebih merata dan menyeluruh. Setiap jenis pelanggaran adalah prioritas untuk ditindaklanjuti proses penegakan sanksi denda administratif guna menekan angka pelanggaran penggunaan frekuensi SFR.

Tabel 30 Data Periode Tagihan Sanksi Denda Administratif

Tahun	Periode	Total Tagihan / Invoice (Rp)
2025	Januari s/d Maret	12,012,000
	April s/d Juni	114,283,200
	Juli s/d September	26,545,320
	Oktober s/d Desember	33,412,764
Total		186,253,284

Terdapat lonjakan signifikan nilai tagihan pada Periode April s/d Juni mencapai Rp 114.283.200. Angka ini merepresentasikan periode dengan volume penindakan tertinggi. Seluruh tagihan yang diterbitkan melalui proses validasi teknis sesuai dengan mekanisme penanganan sanksi dalam dasar aturan yang berlaku. Hal ini memastikan bahwa setiap nominal denda yang dibebankan kepada pelanggar memiliki landasan hukum yang kuat dan transparansi perhitungan yang akuntabel. Pada Juli s/d Desember angka tagihan kurang lebih stabil sehingga hal ini menunjukkan efektivitas fungsi pencegahan yang dijalankan Balmon Pontianak. Meskipun penindakan tetap dilakukan, kepatuhan masyarakat mulai terbentuk sehingga frekuensi pelanggaran berat dengan denda tinggi cenderung terkendali.

Pelaksanaan kegiatan Penanganan Sanksi Denda Administratif di Wilayah Kalimantan Barat pada Tahun 2025 tersebar di beberapa lokasi sebagai berikut:

Tabel 31 Lokasi Pelaksanaan Penanganan Sanksi Denda Administratif

No	Tanggal Kegiatan	Lokasi Kegiatan
1	25 Februari s/d 1 Maret 2025	Kota Singkawang dan Kab. Sambas
2	5 s/d 9 Mei 2025	Kab. Bengkayang, Kab. Sambas dan Kab. Kubu Raya
3	4 s/d 8 Agustus 2025	Kab. Mempawah, Kab. Landak dan Kab. Kubu Raya
4	27 s/d 31 Oktober 2025	Kota Pontianak dan Kab. Kubu Raya
5	27 s/d 31 Oktober 2025	Kota Singkawang

Pelaksanaan kegiatan pada Kabupaten/Kota tersebut menunjukkan upaya pemerataan penanganan sanksi denda administratif secara menyeluruh di wilayah kerja Balmon Pontianak, guna meningkatkan kepatuhan serta efektivitas pelaksanaan ketentuan yang berlaku.

Tabel 32 Perbandingan Capaian Tagihan Sanksi Denda Administratif

Indikator	Capaian Nasional (2025)	Capaian Balmon Pontianak (2025)
Total Nilai Tagihan	Rp23,202,232,930	Rp186,253,284
Jumlah Surat Tagihan/ <i>Invoice</i>	846 <i>Invoice</i>	33 <i>Invoice</i>
Rata-rata Nilai per-Tagihan	± Rp27.425.807	± Rp5.644.038

Ditinjau dari nilai tagihan Balmon Pontianak berkontribusi sebesar 0,80% yang mana secara langsung mendukung target penerimaan negara non-pajak di sektor pemanfaatan SFR. Dari sisi jumlah penindakan terbitnya surat tagihan denda, Balmon Pontianak menyumbang 3,90% dari total Surat Tagihan Nasional, hal ini menunjukkan intensitas pengawasan pengendalian yang tinggi dalam mendeteksi pelanggaran SFR dan APT di Wilayah Kalimantan Barat.

Kontribusi ini merupakan hasil dari implementasi sistem manajemen *Invoice* yang disiplin, di mana Balmon Pontianak berhasil menyelaraskan data pemantauan lokal dengan sistem penagihan nasional. Capaian Penanganan Sanksi Denda Administrasi Balmon Pontianak di Tahun 2025 menegaskan peran UPT daerah dalam rantai penegakan hukum nasional. Dengan keberhasilan administrasi dalam mengidentifikasi temuan pelanggaran menjadi instrumen hukum yang sah, Balmon Pontianak menjadi salah satu penggerak dalam mewujudkan tata kelola penggunaan spektrum frekuensi radio yang sesuai peruntukannya dan tidak saling mengganggu.

Tabel 33 Perbandingan Target dan Capaian Indikator Kinerja (IK-6) 2022-2025

Indikator Kinerja	2022		2023		2024		2025	
	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
Persentase (%) Penanganan Sanksi Denda Administratif	-	-	-	-	-	-	80%	99.39%

Meskipun di Tahun 2022 s/d 2024 belum tercantum indikator kinerja tersendiri untuk Penanganan Sanksi Denda Administratif tetapi hasil kegiatan pemantauan, pengawasan dan pengendalian yang menjadi tugas pokok fungsi Balmon Pontianak adalah dasar paling utama yang sudah lama dimiliki berupa data dukung yang valid sehingga di Tahun 2025 Penanganan Sanksi Denda Administratif dapat diimplementasikan optimal terutama dari aspek teknis penerbitan tagihan kepada pihak yang terbukti melanggar.

BENCHMARK CAPAIAN KINERJA DENGAN UPT LAINNYA

Tabel 34 *Benchmark* Capaian Kinerja (IK-6) dengan UPT Lain

Indikator Kinerja	UPT Ditjen Infrastruktur Digital	Target %	Capaian %	Keterangan
Persentase (%) Penanganan Sanksi Denda Administratif	Balmon Pontianak	80	99.39	Persentase Capaian Balmon Pontianak dan Balmon Banjarmasin
	Balmon Banjarmasin	80	100	terdapat perbedaan 0.61%

Hasil perbandingan menunjukkan bahwa capaian kinerja kedua UPT berada pada kategori sangat baik karena telah melampaui target yang ditetapkan. Sedikit selisih capaian antara Balmon Pontianak dan Balmon Banjarmasin sebesar 0,61%, sehingga menunjukkan bahwa performa pelaksanaan penanganan sanksi denda administratif di kedua UPT relatif setara dan berjalan optimal. *Benchmark* ini menggambarkan bahwa Balmon Pontianak mampu mempertahankan tingkat

kinerja yang kompetitif sekaligus menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan kualitas pelaksanaan kegiatan pada periode selanjutnya.

c. Inovasi/Strategi Keberhasilan

Keberhasilan capaian Indikator Kinerja Penanganan Sanksi Denda Administratif di Balmon Pontianak didukung oleh berbagai inovasi dan strategi pelaksanaan yang dilakukan secara terencana dan berkelanjutan. Salah satu strategi utama yang diterapkan adalah penguatan koordinasi dan komunikasi aktif kepada para pengguna frekuensi radio melalui pendekatan persuasif, sosialisasi, serta pemberian edukasi terkait kewajiban administrasi dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

Balmon Pontianak juga menerapkan monitoring dan pemetaan data wajib bayar secara berkala guna memastikan setiap potensi sanksi administratif dapat teridentifikasi lebih cepat. Pemanfaatan data monitoring tersebut mempermudah proses tindak lanjut, pengiriman pemberitahuan, hingga percepatan penyelesaian kewajiban administrasi oleh pengguna layanan. Inovasi utama selanjutnya terletak pada sinkronisasi *Real-time* antara hasil pemantauan spektrum frekuensi radio di lapangan dengan sistem penerbitan *Invoice*. Strategi ini memastikan bahwa setiap temuan pelanggaran bisa langsung divalidasi secara digital. Hal ini meminimalisir kesalahan input data dan mempercepat waktu tunggu penerbitan Surat Tagihan.

Strategi keberhasilan lainnya adalah pelaksanaan kegiatan lapangan secara langsung di berbagai kabupaten/kota wilayah kerja sehingga proses penanganan dapat dilakukan lebih efektif, tepat sasaran, dan menjangkau pengguna secara menyeluruh. Pendekatan jemput bola ini mampu meningkatkan respons pengguna serta mempercepat penyelesaian sanksi administratif.

Keberhasilan juga didukung oleh optimalisasi koordinasi antar tim, evaluasi capaian secara rutin, serta komitmen pegawai dalam menjaga kualitas pelayanan dan pengawasan. Dengan kombinasi strategi tersebut, Balmon Pontianak mampu mencapai realisasi kinerja yang melampaui target yang telah ditetapkan.

d. Faktor Kendala/Hambatan dan Upaya Percepatan

Balmon Pontianak menghadapi beberapa kendala dan hambatan yang mempengaruhi proses penyelesaian penerbitan surat tagihan. Salah satu kendala utama adalah masih adanya wajib bayar tagihan denda administratif frekuensi radio yang kurang responsif terhadap pemberitahuan maupun tindak lanjut

penyelesaian kewajiban. Selain itu, terdapat pula kendala berupa perubahan lokasi operasional wajib bayar yang tersebar di berbagai wilayah Kabupaten/Kota dan keterbatasan waktu dalam menjangkau seluruh objek pengawasan. Hambatan lainnya berasal dari masih rendahnya pemahaman terkait mekanisme sanksi administratif dan kewajiban pembayaran sehingga diperlukan proses komunikasi dan pendampingan yang lebih intensif

Sebagai bentuk upaya percepatan, Balmon Pontianak melakukan penguatan koordinasi dan komunikasi aktif melalui penyampaian notifikasi, surat tagihan, dan dilakukan pemutakhiran data pengguna secara berkala agar proses penyampaian informasi serta tindak lanjut dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

Balmon Pontianak juga menerapkan strategi jemput bola melalui pelaksanaan kegiatan lapangan di berbagai Kabupaten/Kota guna mempercepat penyelesaian kewajiban administratif. Di sisi internal, dilakukan monitoring capaian secara rutin, pembagian tugas yang lebih terarah, serta evaluasi berkala terhadap progres penanganan sanksi administratif.

e. Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dalam meningkatkan efektivitas indikator kinerja Penanganan Sanksi Denda Administratif, Balmon Pontianak memanfaatkan Aplikasi Denda Administratif yang terintegrasi dengan Aplikasi New ROL. Integrasi sistem ini menjadi salah satu langkah strategis dalam mendukung proses pengawasan, monitoring, dan penyelesaian kewajiban administratif secara lebih cepat, akurat dan terukur. Pemanfaatan aplikasi terintegrasi juga membantu mempercepat proses validasi data, meminimalisir kesalahan administrasi serta meningkatkan efisiensi dalam penyusunan laporan dan evaluasi capaian kinerja. Dengan sistem yang terhubung langsung ke New ROL, pengendalian tindak lanjut dapat dilakukan secara lebih optimal dan terdokumentasi dengan baik.

Selanjutnya Balmon Pontianak terus melakukan optimalisasi penggunaan aplikasi melalui monitoring rutin, pembaruan data pengguna, serta peningkatan pemahaman petugas terhadap pemanfaatan sistem digital dalam mendukung pelaksanaan tugas pengawasan dan penanganan sanksi administratif. Dengan adanya inovasi berupa integrasi aplikasi Denda Administratif dengan New ROL, diharapkan proses penanganan sanksi administratif menjadi lebih efektif, transparan, dan mampu meningkatkan tingkat kepatuhan pengguna frekuensi radio terhadap ketentuan yang berlaku.

f. Rekomendasi Capaian

Rekomendasi utama adalah optimalisasi pemanfaatan Aplikasi Denda Administratif yang terintegrasi dengan New ROL guna mendukung proses monitoring, validasi data, dan tindak lanjut penanganan sanksi secara lebih cepat dan akurat. Selain itu, diperlukan peningkatan kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada pengguna frekuensi radio terkait kewajiban administrasi dan konsekuensi sanksi yang berlaku. Upaya ini penting untuk meningkatkan kesadaran serta kepatuhan pengguna sehingga potensi pelanggaran dan keterlambatan pembayaran dapat diminimalisir.

Rekomendasi lainnya adalah melakukan pemutakhiran database pengguna secara berkala serta meningkatkan intensitas monitoring lapangan, khususnya pada wilayah dengan tingkat kepatuhan yang masih rendah atau memiliki potensi denda administratif. Penguatan koordinasi internal antar tim serta evaluasi capaian secara berkala perlu terus dilakukan guna menjaga konsistensi dan kualitas pelaksanaan kegiatan.

g. Efisiensi

Efisiensi ini bukan hanya dinilai dari percepatan waktu, melainkan upaya memastikan setiap tahapan penanganan sanksi denda administratif memberikan dampak maksimal dengan beban kerja yang terukur. Strategi utama efisiensi dilakukan melalui integrasi data hasil monitoring lapangan ke dalam sistem pelaporan elektronik. Efisiensi juga bisa dilakukan dengan mengklasifikasikan pelanggaran berbasis dampak interferensinya maka difokuskan terlebih dahulu pada pelanggaran yang memiliki risiko keselamatan publik paling tinggi di wilayah Kalimantan Barat.

h. Implementasi Budaya Nilai BerAKHLAK

Implementasi budaya kerja BerAKHLAK dalam pelaksanaan indikator kinerja Penanganan Sanksi Denda Administratif di Balmon Pontianak menjadi landasan penting dalam mendukung terciptanya pelayanan optimal. Nilai Berorientasi Pelayanan diwujudkan melalui upaya memberikan pelayanan yang responsif, komunikatif, dan solutif kepada pengguna frekuensi radio dalam proses penyelesaian kewajiban administratif. Nilai Akuntabel diterapkan melalui pelaksanaan monitoring, pendataan, dan tindak lanjut penanganan sanksi administratif yang dilakukan secara transparan, tertib, dan sesuai ketentuan yang

berlaku. Pemanfaatan aplikasi Denda Administratif yang terintegrasi dengan New ROL juga mendukung proses kerja yang lebih terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam penerapan nilai Kompeten, pegawai Balmon Pontianak terus meningkatkan kemampuan dan pemahaman terkait regulasi, pengawasan, serta pemanfaatan sistem digital guna mendukung efektivitas penanganan sanksi administratif. Sementara itu, nilai Harmonis tercermin melalui koordinasi dan kerja sama yang baik antar pegawai maupun komunikasi yang positif dengan para pengguna layanan. Nilai Loyal diwujudkan melalui komitmen pegawai dalam menjalankan tugas pengawasan dan penegakan ketentuan secara konsisten demi mendukung terciptanya pengelolaan spektrum frekuensi radio yang tertib dan optimal.

Nilai Adaptif terlihat dari kemampuan Balmon Pontianak dalam memanfaatkan teknologi dan inovasi digital untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan. Adapun nilai Kolaboratif diterapkan melalui sinergi antar tim internal serta koordinasi dengan pihak terkait dalam mendukung kelancaran proses penanganan sanksi administratif. Dengan implementasi budaya kerja BerAKHLAK tersebut, Balmon Pontianak mampu menjaga kualitas pelayanan serta mencapai capaian indikator kinerja yang optimal dan melampaui target yang telah ditetapkan.



Gambar 28 Kegiatan pengenalan sanksi denda administratif

IK-7 Persentase (%) Tersedianya Data Hasil Pengukuran Kualitas Layanan

a. Latar Belakang

Tersedianya Data Hasil Pengukuran Kualitas Layanan Infrastruktur Digital ditetapkan berdasarkan mandat Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Dalam Pasal 4, 20, dan 21 ditegaskan bahwa penyelenggaraan telekomunikasi harus menjamin terselenggaranya layanan secara efisien, wajar, dan merata, di mana setiap penyelenggara wajib memenuhi standar kualitas layanan yang telah ditetapkan. Sebagai unit pelaksana teknis, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Pontianak memiliki peran strategis dalam melaksanakan pengukuran teknis guna memverifikasi tingkat kualitas layanan telekomunikasi dan jaringan *Mobile Broadband* seluler di seluruh wilayah Kalimantan Barat.

Indikator ini sangat penting karena jaringan *Mobile Broadband* telah menjadi tulang punggung aktivitas digital masyarakat, mulai dari sektor ekonomi, pendidikan, hingga pelayanan publik. Melalui pengukuran parameter teknis seperti kecepatan unduh (*download*), unggah (*upload*), latensi, dan kestabilan koneksi, Balmon Pontianak dapat menyediakan basis data akurat untuk mengevaluasi kinerja operator seluler serta mengidentifikasi kendala teknis yang berdampak pada kualitas pengalaman pengguna (*quality of service*). Data ini menjadi dasar krusial dalam penyusunan kebijakan peningkatan infrastruktur digital demi mewujudkan konektivitas yang berkualitas di seluruh pelosok daerah.

Penerima manfaat dari tercapainya indikator ini mencakup spektrum yang luas di masyarakat Kalimantan Barat. Di sektor ekonomi, kualitas jaringan yang stabil memperluas akses pasar bagi pelaku UMKM melalui pemasaran online yang lebih efektif, sehingga meningkatkan daya saing dan pendapatan daerah. Di bidang pendidikan, konektivitas yang andal sangat mendukung program pemerintah seperti "Sekolah Rakyat", memfasilitasi akses ke sumber belajar daring, serta menjamin kelancaran pembelajaran jarak jauh (*e-learning*).

Selain itu, manfaat ini menyentuh sektor kesehatan melalui layanan *telemedicine* dan konsultasi pasien jarak jauh, serta meningkatkan efisiensi pemerintahan melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang lebih transparan. Pengukuran yang dilakukan melalui metode *Static test* di titik strategis dan *Drive test* di sepanjang jalur transportasi utama memastikan bahwa daerah-daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal) di Kalimantan Barat juga mendapatkan perhatian khusus guna mengurangi kesenjangan digital. Secara

keseluruhan, ketersediaan data kualitas layanan ini berdampak langsung pada peningkatan produktivitas, kualitas hidup masyarakat, dan percepatan pertumbuhan ekonomi digital nasional.

b. Capaian Kinerja

Sepanjang tahun 2025, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Pontianak menunjukkan performa yang sangat impresif dengan berhasil melampaui target pengukuran Kualitas Layanan Infrastruktur Digital yang ditetapkan yaitu minimal 11 Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat terukur dari 14 Kabupaten/Kota:

Tabel 35 Capaian Tersedianya Data Hasil Pengukuran Kualitas Layanan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban serta pelayanan publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi	Persentase (%) Tersedianya Data Hasil Pengukuran Kualitas Layanan	100%	116.07%	116.07%

Adapun capaian indikator kinerja tersebut diperoleh berdasarkan perhitungan sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Jumlah Kab Kota yang sudah di ukur}}{\text{Jumlah 80\% Kab Kota}} \times 100\%$$

Keberhasilan pencapaian target tahun 2025 didorong oleh implementasi strategi manajerial dan operasional oleh Balai Monitor Kelas II Pontianak. Langkah pertama adalah penerapan manajemen penjadwalan yang presisi melalui distribusi beban kerja yang proporsional pada setiap bulannya. Strategi penyelesaian empat kabupaten/kota pada triwulan pertama dan kedua, yang disusul dengan tiga kabupaten/kota pada triwulan ketiga dan keempat, terbukti sangat efektif dalam mencegah terjadinya penumpukan realisasi kegiatan di akhir tahun anggaran. Untuk menghadapi tantangan bentang geografis yang luas dan kondisi infrastruktur yang bervariasi di Kalimantan Barat, tim mengkombinasikan penjadwalan tersebut dengan strategi pemetaan rute terpadu. Melalui pendekatan ini, pelaksanaan pengukuran di beberapa wilayah yang berada pada

satu garis lintasan geografis dieksekusi sekaligus dalam satu rangkaian perjalanan dinas guna meminimalisir inefisiensi waktu tempuh antar-wilayah.

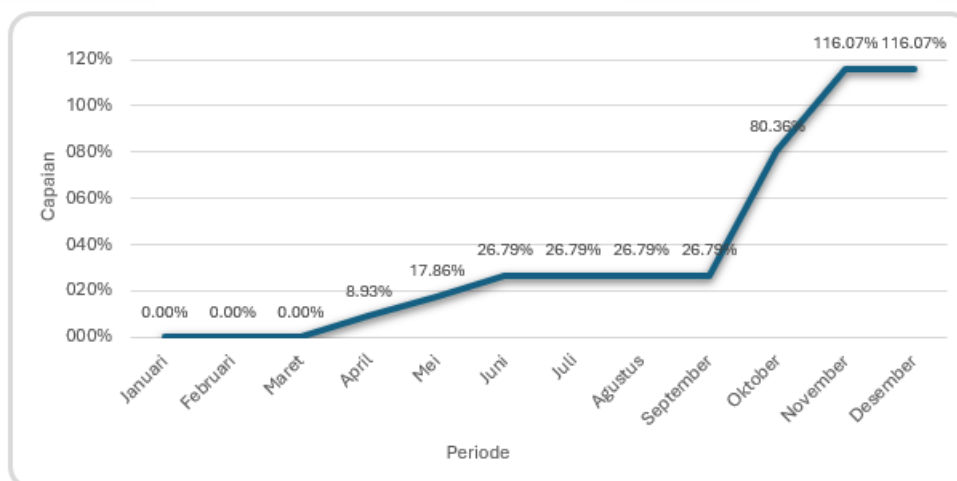
Efisiensi pergerakan tim di lapangan turut didukung oleh kedisiplinan dalam melakukan koordinasi teknis pendahuluan guna menetapkan titik-titik uji strategis (*Point of Interest*), seperti pusat pelayanan publik, fasilitas kesehatan, dan sentra pendidikan secara cermat. Kualitas dan validitas data yang dihasilkan di titik-titik tersebut merupakan buah dari penerapan metodologi pengukuran komprehensif yang memadukan metode *Drive test* dan *Static test* secara paralel. Tim memaksimalkan metode *Drive test* untuk menguji cakupan jaringan secara dinamis, memetakan potensi *blank spot*, dan memantau kelancaran transisi sinyal (*handover*) di sepanjang jalur transportasi. Sementara itu, metode *Static test* dieksekusi secara presisi pada tiga titik strategis di tiap kabupaten/kota untuk mendapatkan parameter mendalam terkait kecepatan unduh (*download*), kecepatan unggah (*upload*), latensi, dan kestabilan koneksi secara riil.

Seluruh rangkaian kegiatan ini sangat bertumpu pada ketahanan fisik dan soliditas tim di lapangan. Rotasi peran antar-personel teknis selama proses pengukuran berjalan dengan sangat harmonis, sehingga setiap hambatan mobilitas maupun kendala jaringan dapat diatasi dengan cepat tanpa menunda agenda di wilayah berikutnya. Sinergi antara perencanaan waktu yang matang, ketepatan metodologi, dan kekompakan tim ini memastikan bahwa potret kualitas layanan seluler yang dilaporkan sangat akurat, terukur, serta representatif dalam merefleksikan pengalaman pengguna (*quality of service*) masyarakat di seluruh wilayah Kalimantan Barat.

Tabel 36 Pelaksanaan Kegiatan Pengukuran Kualitas Layanan Infrastruktur Digital
UPT Balmon Pontianak Tahun 2025

No	Periode Pelaksanaan Pengukuran Tahun 2025	Jumah Kab/Kota Terukur	Keterangan	Realisasi %
1	Januari	0	Tidak ada pengukuran	0%
2	Februari	0	Tidak ada pengukuran	0%
3	Maret	0	Tidak ada pengukuran	0%
4	April	1	Kabupaten Landak	8,93%
5	Mei	1	Kabupaten Sekadau	17,86%
6	Juni	1	Kota Pontianak	26,79%

7	Juli	0	Tidak ada pengukuran	26,79%
8	Agustus	0	Tidak ada pengukuran	26,79%
9	September	0	Tidak ada pengukuran	26,79%
10	Oktober	6	Kab. Kubu Raya, Kab. Melawi, Kab. Kab. Sambas, Kab. Sanggau, Kab. Kab. Sintang, dan Kota Singkawang	80,36%
11	November	4	Kab. Bengkayang, Kab. Kab. Kayong Utara, Kab. Ketapang, dan Kab. Mempawah	116,07%
12	Desember	0	Tidak ada pengukuran	116,07%
Total		13		116,07%



Gambar 29 Grafik Pelaksanaan Pengukuran Kualitas Layanan Infrastruktur Digital Wilayah Kalimantan Barat Sepanjang Tahun 2025

Tersedianya data hasil pengukuran dari 13 Kabupaten/Kota secara tuntas ini memberikan gambaran yang komprehensif dan representatif mengenai potret riil kualitas layanan jaringan *Mobile Broadband* di seluruh wilayah Kalimantan Barat. Data ini memastikan bahwa pemerintah memiliki peta kualitas konektivitas yang akurat, baik di kawasan perkotaan yang padat penduduk maupun di kawasan 3T, sehingga langkah evaluasi terhadap operator seluler dapat dilakukan secara objektif dan berbasis data.

Sebagai gambaran progres keberhasilan pelaksanaan program dari tahun ke tahun, berikut disajikan tabulasi data capaian kinerja berkesinambungan terkait indikator Tersedianya Data Hasil Pengukuran Kualitas Layanan:

Tabel 37 Perbandingan Target dan Capaian Indikator Kinerja (IK-7) 2022-2025

Indikator Kinerja	2022		2023		2024		2025	
	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
Persentase (%) Tersedianya Data Hasil Pengukuran Kualitas Layanan	-	-	-	-	-	-	100%	116.07%

Pada tahun 2025, Balai Monitor Kelas II Pontianak mencatatkan performa yang sangat memuaskan dengan tingkat realisasi menembus 116,07%, melampaui target basis 100% yang telah ditetapkan. Pelampauan target ini merepresentasikan tingginya efektivitas operasional dan dedikasi tim di lapangan dalam mengeksekusi perluasan cakupan wilayah pengukuran.

BENCHMARK CAPAIAN KINERJA DENGAN UPT LAINNYA

Sebagai bentuk evaluasi komparatif guna mengukur tingkat efektivitas, inovasi, dan daya saing kinerja instansi, berikut disajikan data *Benchmarking* (tolok ukur) capaian kinerja Balai Monitor Kelas II Pontianak yang disandingkan dengan Balai Monitor Palembang, secara khusus pada indikator pengukuran kualitas layanan infrastruktur digital:

Tabel 38 *Benchmark* Capaian Kinerja (IK-7) dengan UPT Lain

Indikator Kinerja	UPT Ditjen Infrastruktur Digital	Target %	Capaian %	Keterangan
Persentase (%) Tersedianya Data Hasil Pengukuran Kualitas Layanan	Balmon Pontianak	100	116.07	Persentase Capaian Balmon Pontianak dan Balmon Palembang sama2 Melebihi Capaian Target.
	Balmon Palembang	100	107.14	

Berdasarkan data *Benchmarking* pada tabel di atas, dapat ditarik analisis perbandingan kinerja antara Balmon Pontianak dan Balmon Palembang dalam mengeksekusi indikator pengukuran kualitas layanan. Secara umum, kedua Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital tersebut menunjukkan performa operasional yang sangat prima, terbukti dari keberhasilan keduanya dalam melampaui target basis 100% yang telah ditetapkan.

c. Inovasi/Strategi Keberhasilan

Inovasi Keberhasilan pencapaian target 100% pada indikator pengukuran kualitas layanan infrastruktur digital di 14 Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat didorong oleh serangkaian inovasi manajerial dan strategi operasional yang sangat adaptif. Strategi fundamental yang menjadi kunci keberhasilan adalah penerapan manajemen pemetaan rute terpadu. Melalui pendekatan strategis ini, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Pontianak meninggalkan metode penugasan parsial per wilayah, dan beralih menggabungkan beberapa kabupaten atau kota yang berada pada satu garis lintasan geografis ke dalam satu rangkaian pengujian yang berkesinambungan. Strategi lapangan ini terbukti sangat krusial dalam memangkas inefisiensi waktu tempuh, menghemat sumber daya operasional, serta mereduksi tingkat kelelahan fisik tim saat harus menaklukkan ekstremnya jarak dan medan geografis.

Selain efisiensi rute, keberhasilan capaian ini juga ditopang oleh inovasi analitis pada tahap pra-pelaksanaan yang komprehensif. Sebelum tim diberangkatkan ke lapangan, dilakukan pemetaan titik-titik uji strategis (*Point of Interest*) secara presisi menggunakan instrumen pemetaan digital. Langkah inovatif ini memastikan bahwa pelaksanaan *static test* di pusat keramaian, fasilitas kesehatan, dan sentra pendidikan dapat langsung dieksekusi dengan cepat dan tepat sasaran tanpa membuang waktu untuk survei lokasi secara manual. Dari sisi pengembangan pengawasan, instansi juga mulai menginisiasi strategi pelibatan partisipasi publik melalui pengenalan aplikasi SIGMON buatan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Strategi inovatif yang mendorong masyarakat untuk melakukan uji kualitas jaringan secara mandiri ini menjadi langkah awal yang sangat berharga untuk memperkaya basis data kualitas sinyal secara *real-time*. Sinergi antara keandalan pemetaan rute, ketepatan penentuan titik uji, dan inisiatif pemanfaatan teknologi digital terpadu inilah yang membentuk

fondasi keberhasilan Balmon Pontianak dalam memotret kualitas layanan infrastruktur digital secara presisi, komprehensif, dan tepat waktu di sepanjang tahun berjalan.

d. Faktor Kendala/Hambatan dan Upaya Percepatan

Pelaksanaan pengukuran kualitas layanan jaringan *Mobile Broadband* seluler di 14 Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat pada tahun 2025 secara spesifik dihadapkan pada kendala operasional yang bersumber dari tantangan geografis dan jarak tempuh antarwilayah. Luasnya Provinsi Kalimantan Barat menuntut tim teknis untuk mengalokasikan porsi waktu perjalanan yang sangat besar hanya untuk mobilitas antar-kabupaten dan kecamatan. Kondisi ini semakin menantang dengan adanya variasi kualitas infrastruktur jalan darat yang belum sepenuhnya memadai, terutama pada rute-rute penghubung menuju kawasan pedalaman serta daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T). Karakteristik medan yang terjal, jalanan belum beraspal, dan aksesibilitas yang terbatas secara langsung menghambat kelancaran laju kendaraan operasional saat mengeksekusi metode *drive test* di sepanjang jalur transportasi. Lebih dari itu, rentang jarak yang sangat jauh antar-titik uji strategis (*Point of Interest*) menyulitkan tim dalam menyelesaikan metode *static test* secara cepat. Hambatan mobilitas di perjalanan ini mengharuskan tim lapangan untuk menerapkan manajemen waktu operasional yang sangat ketat agar seluruh target pengukuran di wilayah-wilayah dengan akses tersulit tetap dapat direalisasikan tanpa mengurangi durasi dan validitas pengambilan sampel data kualitas jaringan.

Untuk mengatasi kendala geografis dan ekstremnya jarak tempuh antarwilayah di Kalimantan Barat, Balai Monitor Kelas II Pontianak mengimplementasikan sejumlah upaya percepatan yang berfokus pada efisiensi mobilitas dan manajemen waktu operasional. Upaya utama yang dilakukan adalah penerapan strategi pemetaan rute, di mana pelaksanaan pengukuran pada beberapa kabupaten/kota yang berada dalam satu jalur lintasan darat dieksekusi sekaligus ke dalam satu rangkaian perjalanan secara terpadu. Pendekatan ini terbukti efektif mereduksi waktu yang terbuang di perjalanan. Langkah tersebut turut didukung oleh upaya pra-identifikasi yang komprehensif sebelum tim diberangkatkan ke lapangan. Melalui pemanfaatan peta digital, tim menetapkan koordinat titik-titik uji strategis (*Point of Interest*) untuk pelaksanaan *static test* secara presisi sejak awal, sehingga proses pencarian lokasi di daerah pedalaman dapat dilakukan dengan

cepat dan tepat sasaran. Selain itu, guna menghadapi medan jalan yang menantang dan mencegah kelelahan fisik personel akibat durasi *drive test* yang panjang, diterapkan rotasi tugas secara dinamis antar-anggota tim di dalam kendaraan serta dilakukan inspeksi ketat terhadap kesiapan teknis armada operasional sebelum keberangkatan. Sinergi dari berbagai langkah adaptif ini memastikan seluruh target pengukuran kualitas layanan di 14 kabupaten/kota dapat diselesaikan secara tepat waktu, efektif, dan menyeluruh tanpa mengurangi validitas pengambilan sampel data di lapangan.

e. Tindak Lanjut

Laporan hasil pengukuran kualitas layanan jaringan *Mobile Broadband* seluler di 14 Kabupaten/Kota sepanjang tahun 2025 telah dimanfaatkan sebagai dokumen referensi utama dan basis data dalam mengevaluasi tingkat pemenuhan standar pelayanan oleh para penyelenggara telekomunikasi di wilayah Kalimantan Barat. Data teknis yang memuat parameter kecepatan unduh, kecepatan unggah, latensi, dan cakupan *drive test* ini digunakan secara langsung untuk memetakan area *blank spot* serta titik-titik degradasi layanan, yang selanjutnya menjadi landasan penyusunan rekomendasi teknis bagi percepatan pemerataan infrastruktur digital, termasuk dukungan konektivitas bagi program "Sekolah Rakyat" dan layanan publik. Di sisi lain, sebagai bentuk tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja dari tahun sebelumnya, Balai Monitor Kelas II Pontianak telah berhasil mengimplementasikan penyempurnaan manajemen penjadwalan terpadu dan pemetaan *Point of Interest* (POI) secara presisi sebelum tim ditugaskan ke lapangan. Langkah perbaikan strategis ini terbukti sangat efektif dalam mengatasi inefisiensi akibat jarak tempuh geografis yang ekstrem, sehingga menjadi faktor penentu keberhasilan terealisasinya 100% target pengukuran secara tepat waktu, komprehensif, dan akurat di seluruh wilayah operasional.

f. Rekomendasi Capaian

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pengukuran kualitas layanan jaringan *Mobile Broadband* seluler sepanjang tahun 2025, direkomendasikan sejumlah langkah perbaikan strategis guna meningkatkan efisiensi dan kualitas capaian kinerja pada periode mendatang. Untuk menyiasati tingginya beban mobilitas fisik akibat ekstremnya jarak tempuh dan medan

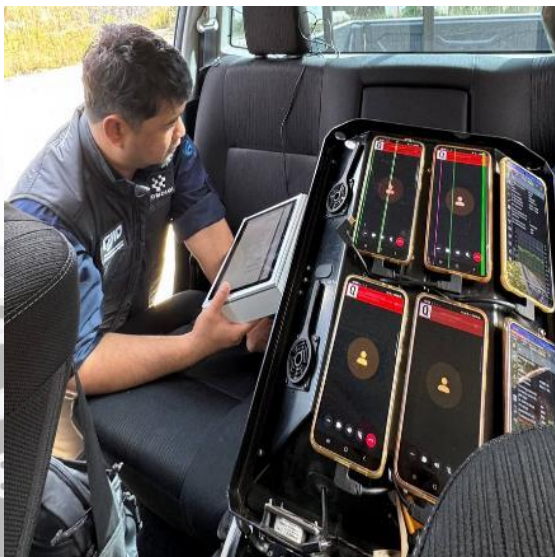
geografis di Kalimantan Barat, disarankan adanya penguatan metode pengumpulan data pendamping berbasis partisipasi publik melalui penggunaan aplikasi SIGMON buatan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Dengan mengedukasi dan mendorong masyarakat luas untuk mengunduh serta melakukan uji kualitas jaringan secara mandiri (layaknya fitur *speed test*) melalui aplikasi SIGMON, Balai Monitor Kelas II Pontianak dapat menghimpun, memantau, dan menganalisis potret riil kecepatan serta kestabilan sinyal dari berbagai titik lokasi pengguna secara langsung. Basis data partisipatif ini akan sangat efektif dalam memvalidasi dan melengkapi hasil *drive test* maupun *static test* konvensional tanpa harus mengandalkan kunjungan fisik ke setiap lokasi. Selain itu, guna mendukung kelancaran operasional tim yang tetap harus turun ke lapangan, atensi terhadap pemeliharaan armada operasional serta perluasan sinergi informasi dengan Dinas Kominfo di tingkat daerah tetap harus diintensifkan agar pemetaan area *blank spot* dan perencanaan rute pengukuran pada tahun berikutnya dapat dirancang secara lebih adaptif, efisien, dan komprehensif.

g. Efisiensi

Dalam Pencapaian target 100% pada kegiatan pengukuran kualitas layanan di 14 Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat turut diiringi dengan efisiensi penggunaan sumber daya operasional yang terukur. Melalui penerapan strategi pemetaan rute berbasis klaster spasial yang menggabungkan beberapa kabupaten/kota dalam satu rangkaian perjalanan terpadu, serta optimalisasi pra-identifikasi titik uji, Balai Monitor Kelas II Pontianak berhasil menekan frekuensi keberangkatan tim ke lapangan yang sifatnya parsial. Optimalisasi penugasan terpadu ini mampu mengefisienkan waktu operasional dibandingkan dengan proyeksi metode penugasan konvensional per wilayah. Penurunan durasi dan frekuensi mobilitas fisik di medan geografis yang ekstrem ini secara langsung berdampak positif pada penghematan. Dengan demikian, seluruh target pengukuran kualitas layanan seluler dapat tereksekusi secara komprehensif dan presisi dalam batas alokasi anggaran yang telah ditetapkan sejak awal tahun, dan pengelolaan anggaran instansi terwujud dengan sangat optimal tanpa mengurangi kualitas data yang dihasilkan

h. Implementasi Budaya Nilai BerAKHLAK

Pencapaian target 100% pada indikator Tersedianya Data Hasil Pengukuran Kualitas Layanan merupakan wujud nyata implementasi nilai-nilai dasar BerAKHLAK dalam setiap tahapan operasional Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Pontianak. Nilai Berorientasi Pelayanan tercermin dari komitmen kuat pegawai dalam memastikan ketersediaan jaringan yang andal bagi seluruh masyarakat, termasuk di wilayah 3T, guna mendukung digitalisasi layanan publik, pergerakan UMKM, dan kelancaran program "Sekolah Rakyat". Nilai Akuntabel diwujudkan melalui pelaksanaan *drive test* dan *static test* secara obyektif dan penuh tanggung jawab, sehingga menghasilkan potret data kualitas jaringan yang valid untuk evaluasi kebijakan. Nilai Kompeten terlihat dari penguasaan kapasitas teknis personel dalam mengoperasikan instrumen ukur serta ketelitian menganalisis parameter kecepatan dan latensi secara presisi di lapangan. Selanjutnya, nilai Harmonis dan Kolaboratif tampak nyata pada soliditas internal tim yang saling peduli dan mem-*Back-up* tugas saat menghadapi kelelahan fisik di perjalanan panjang, serta kesiapan bersinergi dengan pemerintah daerah setempat. Nilai Loyal dibuktikan melalui dedikasi pantang menyerah para pegawai dalam menuntaskan target pengukuran di 14 kabupaten/kota, menempatkan kewajiban penyelesaian tugas negara di atas kenyamanan pribadi meskipun dihadapkan pada ekstremnya jarak tempuh dan medan jalan. Sementara itu, nilai Adaptif diterapkan melalui kemampuan tim merespons tantangan geografis secara tangkas lewat strategi pemetaan rute terpadu serta inisiatif mendorong adopsi aplikasi SIGMON berbasis partisipasi publik untuk efisiensi ke depannya. Penerapan ketujuh nilai ini menjadi fondasi kokoh dalam menjamin keberhasilan pemetaan kualitas infrastruktur digital secara komprehensif di wilayah Kalimantan Barat.



Gambar 30 Kegiatan pengukuran kualitas layanan Infrastruktur Digital

IK-8 Persentase (%) Penyelenggaraan layanan Sertifikasi Operator Radio (UNAR-MOTS-IKRAN)

a. Latar Belakang

Indikator Kinerja ini merupakan parameter utama untuk mengukur efektivitas dan keberhasilan Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Pontianak dalam menyelenggarakan pelayanan sertifikasi kecakapan amatir radio di wilayah Kalimantan Barat. Pelaksanaan Ujian Negara Amatir Radio (UNAR) bukan sekadar rutinitas pelayanan administratif, melainkan sebuah instrumen krusial untuk memastikan bahwa setiap individu yang mengudara memiliki kompetensi teknis, pemahaman regulasi, serta etika berkomunikasi yang memadai. Dengan tersertifikasinya para operator radio, potensi pelanggaran penggunaan frekuensi dan risiko timbulnya interferensi berbahaya di udara dapat ditekan sejak dini, sehingga spektrum frekuensi radio sebagai kekayaan sumber daya alam terbatas dapat dimanfaatkan secara tertib, aman, dan berdaya guna.

b. Capaian Kinerja

Pada tahun 2025, target penyelenggaraan UNAR ditetapkan sebanyak 6 kali kegiatan. Dalam realisasinya, Balai Monitor Pontianak berhasil menyelenggarakan ujian sebanyak 7 kali untuk memenuhi permohonan sertifikasi dari masyarakat, adapun capaian dijabarkan sebagai berikut.

Tabel 39 Capaian Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Operator Radio

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban serta pelayanan publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi	Persentase (%) Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Operator Radio (UNAR, MOTS- IKRAN)	100%	116.67%	116.67%

Adapun capaian indikator kinerja tersebut diperoleh berdasarkan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Formula} = \frac{(\text{Jumlah kegiatan UNAR}/6) + (\text{Jumlah kegiatan Sertifikasi SRC/LRC, IKRAN}/1)}{2} \times 100\%$$

Dengan catatan, hasil pembagian yang melebihi nilai 1 dibulatkan menjadi 1. Adapun capaian indikator kinerja dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 40 Perbandingan Target dan Capaian Indikator Kinerja (IK-8) 2022-2025

Indikator Kinerja	2022		2023		2024		2025	
	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
Persentase (%) Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Operator Radio (UNAR, MOTS-IKRAN)	100%	480%	100%	197.5%	100%	193%	100%	116.67%

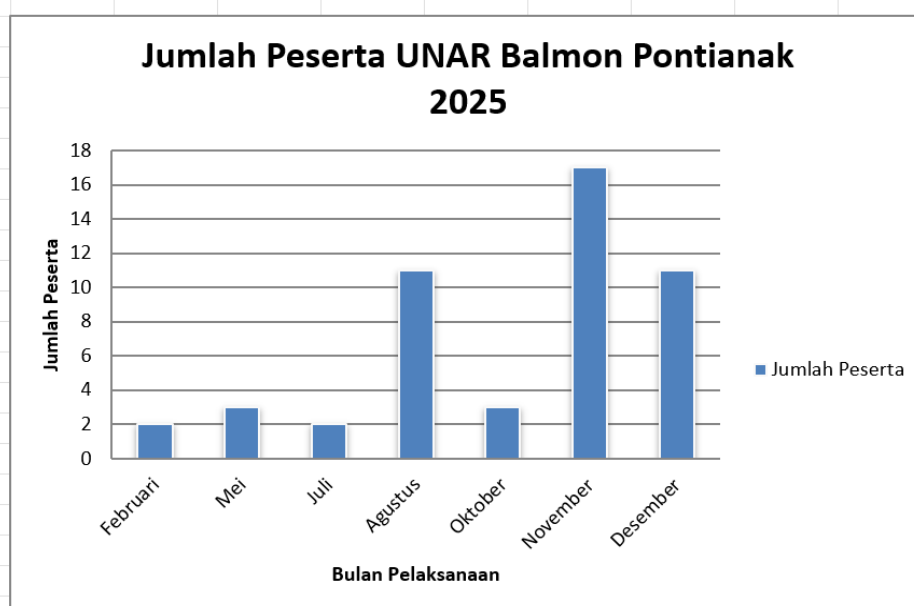
Setelah melihat perbandingan data dari tahun ke tahun, sekarang kita lihat bagaimana pelaksanaan UNAR di tahun 2025 secara lebih detail. Capaian kinerja kita yang berhasil melampaui target (mencapai 116,67%) tentu tidak lepas dari jadwal pelaksanaan ujian yang diatur dengan baik sepanjang tahun.

Melihat rincian data ini penting agar kita tahu kapan saja ujian diadakan, berapa banyak peserta yang ikut, dan bagaimana antusiasme masyarakat di setiap bulannya. Berikut adalah rincian data pelaksanaan Ujian Negara Amatir Radio (UNAR) di Balai Monitor Pontianak sepanjang tahun 2025:

Tabel 41 Rincian Peserta UNAR Tahun 2025 Balmon Pontianak

No	Bulan	Lokasi	Jumlah Peserta
1	Februari	Balmon Pontianak	2
2	Mei	Balmon Pontianak	3
3	Juli	Balmon Pontianak	2
4	Agustus	Balmon Pontianak	11
5	Oktober	Balmon Pontianak	3
6	November	Balmon Pontianak	17

7	Desember	Balmon Pontianak	11
Total			49 Peserta



Gambar 31 Grafik jumlah peserta UNAR Tahun 2025

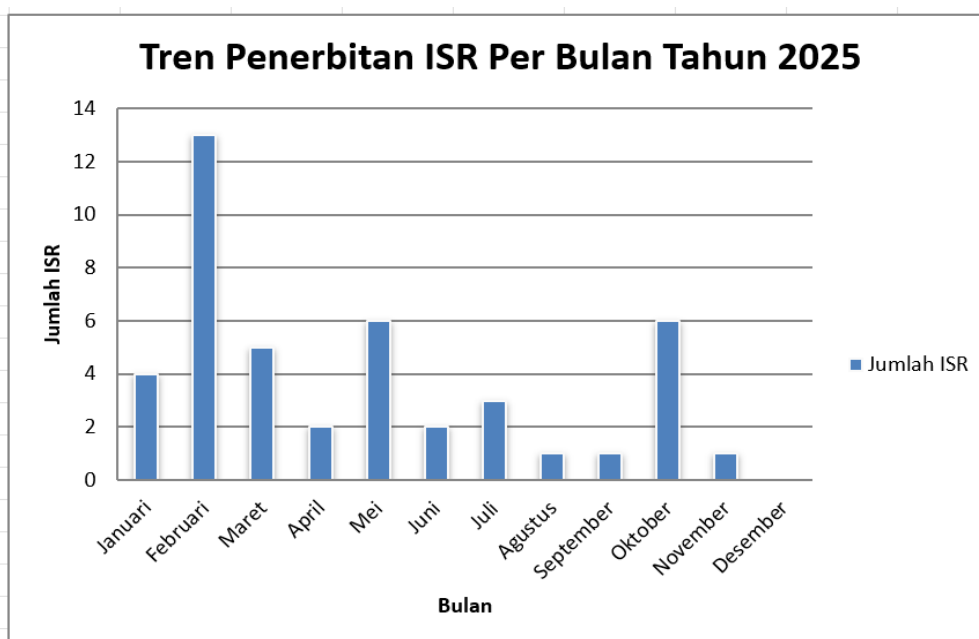
Berdasarkan grafik di atas, pelaksanaan UNAR sepanjang tahun 2025 menunjukkan tren yang dinamis dengan total akumulasi peserta sebanyak 49 orang. Puncak jumlah peserta terjadi pada bulan November dengan 17 peserta, yang menunjukkan tingginya minat masyarakat terhadap sertifikasi amatir radio di akhir tahun. Penambahan frekuensi ujian hingga 7 kali pelaksanaan (melampaui target 6 kali) terbukti efektif dalam mengakomodasi animo pendaftar, sehingga tidak terjadi penumpukan antrean pemohon sertifikasi di wilayah Kalimantan Barat. Penggunaan sistem *Computer Assisted Test* (CAT) selama pelaksanaan memastikan bahwa seluruh peserta mendapatkan hasil ujian secara transparan dan akuntabel.

Selain keberhasilan pada layanan sertifikasi operasional amatir radio (UNAR), akselerasi performa pelayanan publik pada Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Pontianak juga ditunjukkan secara nyata melalui pelaksanaan program MOTS (*Maritime On The Spot*). Program ini merupakan inovasi pelayanan prima bermetode "jemput bola" langsung dari pemerintah ke lapangan guna memfasilitasi, mempermudah, dan mempercepat pengurusan Izin Stasiun Radio (ISR) bagi para pemilik kapal laut dan nelayan di wilayah Kalimantan Barat. Melalui langkah proaktif ini, Balmon Pontianak berkomitmen memastikan legalitas

perangkat komunikasi maritim terpenuhi demi mendukung keselamatan pelayaran (*safety of life at sea*).

Tabel 42 Rincian Jumlah ISR Tahun 2025 Balmon Pontianak

No.	Bulan	Jumlah ISR	Total
1	Januari	4	44
2	Februari	13	
3	Maret	5	
4	April	2	
5	Mei	6	
6	Juni	2	
7	Juli	3	
8	Agustus	1	
9	September	1	
10	Oktober	6	
11	November	1	
12	Desember	-	



Gambar 32 Grafik Tren Penerbitan ISR Per Bulan Tahun 2025

Data penerbitan ISR di atas menunjukkan keberhasilan Balai Monitor Pontianak dalam mendorong legalitas penggunaan perangkat radio pasca-ujian. Tercatat sebanyak 44 ISR telah terbit sepanjang tahun 2025, dengan intensitas tertinggi pada bulan Februari (13 ISR). Hal ini mengindikasikan bahwa para peserta UNAR memiliki kesadaran hukum yang tinggi untuk segera melegalkan

stasiun radionya setelah mendapatkan sertifikat kecakapan. Pencapaian ini berkontribusi langsung pada tertib administrasi spektrum frekuensi radio, di mana setiap perangkat yang beroperasi telah terdata secara resmi dalam database nasional, sehingga memudahkan fungsi pengawasan dan pengendalian di lapangan.

Secara keseluruhan, Balmon Pontianak berhasil memenuhi indikator kinerja yang ditetapkan dalam penyelenggaraan layanan sertifikasi berbasis digital dan kolaboratif. Ke depan, keberhasilan ini menjadi modal strategis untuk menjaga keberlanjutan kinerja, memperluas jangkauan layanan, serta memastikan kontribusi nyata terhadap pengelolaan spektrum frekuensi radio yang tertib, aman, dan berdaya guna bagi masyarakat.

BENCHMARK CAPAIAN KINERJA DENGAN UPT LAINNYA

Guna mengukur tingkat efektivitas, posisi relatif, serta konsistensi jangkauan pelayanan publik di lingkungan Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Pontianak melakukan evaluasi komparatif (*Benchmarking*) horizontal bersama Unit Pelaksana Teknis (UPT) sejenis. Analisis perbandingan ini difokuskan pada hasil frekuensi pelaksanaan Ujian Negara Amatir Radio (UNAR) pada tahun anggaran 2025 dengan parameter target batas minimal yang seragam.

Tabel 43 *Benchmark* Capaian Kinerja (IK-8) dengan UPT Lain

Indikator Kinerja	UPT Ditjen Infrastruktur Digital	Target %	Capaian %	Keterangan
Persentase (%)				
Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Operator Radio (UNAR, MOTS-IKRAN)	Balmon Pontianak	100	116.67	Persentase Capaian Balmon Pontianak dan Balmon Palembang sama-sama melampaui target
	Balmon Palembang	100	217	

Melalui data komparatif tersebut, terlihat bahwa kedua UPT menorehkan performa yang sangat bagus karena berhasil menuntaskan realisasi di atas ambang batas minimal target yang diamanatkan oleh pusat. Meskipun bergerak dari basis target yang seragam, terdapat perbedaan dinamika besaran angka

realisasi di lapangan yang dipengaruhi oleh karakteristik wilayah kerja dan responsivitas masing-masing organisasi. Balai Monitor Kelas II Pontianak mencatatkan capaian progresif sebesar 116,67 persen melalui 7 kali pelaksanaan ujian, di mana penambahan 1 sesi ekstra dari target awal ini diambil sebagai langkah taktis dan adaptif untuk langsung mengakomodasi lonjakan permohonan dari masyarakat Kalimantan Barat yang memuncak pada kuartal akhir tahun anggaran, sehingga pelayanan dapat dituntaskan tanpa menunda antrean ke tahun berikutnya.

c. Inovasi/Strategi Keberhasilan

Kunci utama di balik tercapainya target kinerja ini adalah konsistensi pemanfaatan teknologi digital melalui sistem *Computer Assisted Test* (CAT) yang terintegrasi. Inovasi ini memangkas seluruh birokrasi ujian konvensional. Keberhasilan strategi ini terletak pada aspek transparansi dan akuntabilitas: peserta ujian dapat langsung melihat lembar hasil kelulusan dan nilai mereka secara *Real-time* di layar monitor sesaat setelah menyelesaikan ujian. Selain memberikan kepastian hukum yang cepat, transparansi ini berhasil membangun reputasi positif dan meningkatkan kepercayaan publik (*Public trust*) terhadap integritas sistem pelayanan yang diselenggarakan oleh Balai Monitor Pontianak.

d. Faktor Kendala/Hambatan dan Upaya Percepatan

Tantangan utama yang dihadapi tim kerja di lapangan adalah ketidakpastian atau fluktuasi jumlah pendaftar yang sangat dinamis antar-tahap. Distribusi pendaftar tidak merata di awal tahun, namun mengalami lonjakan yang sangat tajam dan masif pada akhir tahun (puncaknya pada bulan November dengan 17 peserta dalam satu kali tahapan). Lonjakan mendadak ini menimbulkan tantangan tersendiri bagi kesiapan sarana prasarana, manajemen waktu petugas, serta pengaturan kapasitas ruang ujian di Ruang Unar Balmon Pontianak agar tetap menjaga kenyamanan dan kondusivitas ujian.

Menyikapi dinamika tersebut, Balai Monitor Pontianak mengambil langkah taktis berupa penguatan jalinan komunikasi dan koordinasi yang proaktif bersama organisasi amatir radio setempat (ORARI). Melalui koordinasi ini, dilakukan pemetaan berkala terhadap basis calon anggota baru yang akan mengikuti ujian. Selain itu, petugas mengoptimalkan manajemen ujian pada sistem CAT dan menyediakan device cadangan, sehingga lonjakan peserta pada tahapan kritis

dapat diakomodasi seluruhnya dengan tertib tanpa ada penumpukan antrean pemohon.

e. Tindak Lanjut

Sebagai langkah konkret untuk mempertahankan mutu pelayanan, rencana aksi ke depan difokuskan pada pemeliharaan rutin dan audit teknis terhadap perangkat keras maupun jaringan lokal yang menyokong sistem CAT. Selain itu, Balmon Pontianak akan menjadwalkan forum koordinasi berkala dengan pengurus organisasi radio guna menyinkronkan kalender pelaksanaan ujian dengan dinamika kebutuhan lapangan, sehingga persiapan logistik ujian pada tahun berikutnya dapat direncanakan secara lebih presisi.

f. Rekomendasi Capaian

Guna menjaga keberlanjutan performa capaian kinerja yang tinggi ini, direkomendasikan beberapa poin strategis berikut:

1. Mempertahankan keandalan sarana dan prasarana sistem CAT serta bersikap fleksibel dalam menyediakan alokasi sesi ujian cadangan jika tren pendaftaran di aplikasi menunjukkan indikasi lonjakan kuota.
2. Mengintensifkan dan memperluas jangkauan sosialisasi jadwal pelaksanaan ujian secara berkala melalui media sosial resmi dan kanal digital lainnya untuk memastikan akses informasi pelayanan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat di pelosok Kalimantan Barat.
3. Mengembangkan program edukasi pra-ujian berbasis digital (seperti simulasi mandiri) agar tingkat kelulusan peserta dapat terus dioptimalkan.

g. Efisiensi

Penerapan sistem ujian CAT daring berhasil menciptakan efisiensi yang komprehensif pada proses bisnis pelayanan. Dari segi efisiensi waktu, hilangnya proses koreksi lembar jawaban secara manual menghemat waktu kerja pegawai secara signifikan, sehingga SDM yang ada dapat dialokasikan untuk fungsi pengawasan lainnya. Dari segi efisiensi anggaran, peralihan ke sistem pendaftaran dan pelaksanaan yang bersifat elektronik berhasil meminimalkan penggunaan berkas fisik (*Paperless policy*), yang berdampak langsung pada penghematan anggaran belanja alat tulis kantor (ATK) serta biaya logistik penggandaan soal.

h. Implementasi Budaya Nilai BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan diwujudkan melalui komitmen penuh seluruh petugas dalam menyediakan fasilitas ujian yang transparan, adil, ramah, dan responsif terhadap kebutuhan informasi para peserta ujian dari berbagai daerah.

Adaptif ditunjukkan oleh kemampuan tim pelaksana dalam bersikap gesit (*agile*) dan responsif menghadapi lonjakan kuota peserta di bulan November melalui penyesuaian tata kelola sesi dan waktu ujian secara cepat demi kelancaran pelayanan publik.



Gambar 33 Pelaksanaan UNAR di Balmon Pontianak

IK-9 Persentase (%) Pelaksanaan Penanganan Piutang BHP Frekuensi Radio**a. Latar Belakang**

Biaya Hak Penggunaan (BHP) Frekuensi Radio merupakan salah satu sumber Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang krusial bagi negara. Penanganan piutang BHP bertujuan untuk memastikan kepatuhan para pengguna frekuensi terhadap kewajiban keuangannya serta mengamankan penerimaan negara dari potensi kerugian. Indikator ini mengukur sejauh mana Balai Monitor Kelas II Pontianak secara aktif melakukan penagihan dan penyelesaian piutang yang menunggak. Agar penanganan piutang ini dapat berjalan dengan efektif dan terukur, ditetapkan sebuah mekanisme kerja bulanan yang wajib dipenuhi sebagai tolok ukur tercapainya target kinerja.

Dalam pelaksanaannya, target penanganan piutang pada setiap bulannya dinyatakan tercapai apabila memenuhi dua tahapan utama. Tahap pertama dimulai dengan penarikan data atau laporan berkala dari aplikasi penunjang piutang yang dilakukan minimal satu kali dalam sebulan untuk memetakan daftar pengguna yang memiliki tunggakan. Tahap kedua yang menjadi langkah krusial adalah tindak lanjut berupa komunikasi proaktif kepada para pengguna tersebut. Melalui komunikasi ini, petugas memberikan informasi yang jelas mengenai rincian piutang, batas waktu pembayaran, serta prosedur penyelesaian yang harus dilakukan. Dengan terlaksananya koordinasi dan penyampaian informasi yang intensif ini, fungsi pengawasan piutang di setiap bulannya dapat dinilai berjalan dengan optimal sesuai dengan target yang diharapkan.

Indikator Kinerja ini merupakan parameter penting dalam menilai efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Pontianak dalam melakukan penatausahaan serta optimalisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Penanganan piutang Biaya Hak Penggunaan (BHP) Frekuensi Radio bertujuan untuk menegakkan regulasi, meminimalisir potensi kerugian negara akibat penunggakan kewajiban, serta memastikan kepatuhan para pengguna spektrum. Melalui aktivitas penagihan, verifikasi dokumen, dan penelusuran lapangan (penelitian lapangan PPNT0), Balmon Pontianak berkomitmen menjaga tata kelola keuangan negara yang tertib, bersih, dan berkepastian hukum di wilayah Kalimantan Barat.

b. Capaian Kinerja

Capaian kinerja Pelaksanaan Penanganan Piutang BHP Frekuensi Radio tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 44 Capaian Pelaksanaan Penanganan Piutang BHP Frekuensi Radio

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban serta pelayanan publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi	Persentase (%) Pelaksanaan Penanganan Piutang BHP Frekuensi Radio	100%	100%	100%

Adapun Mekanisme Perhitungan Capaian adalah sebagai berikut :

$$\text{Persentase Capaian (\%)} = \left(\frac{\text{Jumlah Piutang Dihubungi}}{\text{Jumlah Target Piutang}} \right) \times 100\%$$

Capaian dinilai sebesar 100% apabila terdapat kegiatan koordinasi penanganan piutang, seperti koordinasi dengan KPKNL, pengumpulan dokumen penghapusan mutlak, dan PPNTD, minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

Dalam hal tidak terdapat kegiatan yang dilakukan, maka dapat diisi nihil disertai keterangan pendukung, dengan bukti koordinasi dapat berupa hasil koordinasi atau rekonsiliasi data.

Realisasi kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Pontianak dalam melakukan penanganan piutang BHP Frekuensi Radio pada tahun anggaran 2025 berhasil mencapai target mutlak sebesar 100%. Secara umum, capaian sempurna ini menunjukkan bahwa tata kelola dan pengelolaan piutang di wilayah Kalimantan Barat telah dilaksanakan secara efektif melalui pendekatan penanganan yang konsisten setiap bulannya. Keberhasilan ini tidak hanya berfokus pada aspek penagihan aktif terhadap tunggakan yang ada, melainkan juga menyentuh aspek pencegahan munculnya piutang baru guna memperkuat kepastian hukum administrasi negara.

Dalam konteks makro, pengelolaan piutang pada sektor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Balmon Pontianak telah sejalan dengan prinsip nasional yang menekankan pada optimalisasi penagihan serta peningkatan kepatuhan

wajib bayar. Keberhasilan mempertahankan angka 100% ini diraih berkat kedisiplinan tim kerja dalam mengimplementasikan sistem peringatan dini (*early reminder system*) melalui penarikan data aplikasi secara berkala minimal satu kali sebulan, yang kemudian ditindaklanjuti dengan komunikasi digital secara proaktif kepada para pengguna. Melalui penyampaian informasi yang intensif terkait detail kewajiban dan tata cara penyelesaian sebelum masa jatuh tempo, Balmon Pontianak berhasil menekan pertumbuhan angka piutang negara sekaligus mengedepankan pelayanan yang solutif bagi masyarakat.

Untuk memberikan gambaran komparatif yang lebih menyeluruh mengenai stabilitas kinerja, komitmen, serta perkembangan hasil penanganan piutang dari waktu ke waktu, berikut disajikan data pasang surut pencapaian indikator kinerja penanganan piutang BHP Frekuensi Radio sepanjang periode tahun anggaran 2022 sampai dengan tahun 2025:

Tabel 45 Perbandingan Target dan Capaian Indikator Kinerja (IK-9) 2022-2025

Indikator Kinerja	2022		2023		2024		2025	
	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
Pelaksanaan Penanganan Piutang BHP Frekuensi Radio	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Guna melihat bagaimana distribusi, perkembangan, serta jumlah dokumen wajib bayar BHP Frekuensi Radio yang telah berhasil diproses hingga mendapatkan status optimal sepanjang tahun anggaran 2025, dinamika data tersebut direkapitulasi secara berkala di setiap bulannya. Adapun rincian mengenai jumlah dokumen dan pergerakan administrasi PPNTD tersebut disajikan secara komprehensif pada tabel di bawah ini:

Tabel 46 Rekap Laporan BHP Piutang PPNT0 2025

NO	NAMA PERUSAHAAN	ALAMAT PERUSAHAAN	TANGGAL PELAKSANAAN KEGIATAN PENGUMPULAN DOKUMEN	DOKUMEN BERITA ACARA	KETERANGAN
1	RADIO RITME TIGA MEDIA, PT	JL. Yos Sudarso No.18 - Singkawang	Surat Perintah Tugas Nomor: 064/Balmon.61/KP.01.06/05/2025	Berita Acara Penelitian Lapangan Nomor: BAPL-001/BSPML_PNK/05/2025	Berdasarkan Berita Acara Penelitian Lapangan, yang di tandatangani oleh Ketua RT. 001 RW. 001 dan Surat Keterangan Kelurahan Kuala Nomor : Nomor: 500/227/PM, Tanggal 8 Mei 2025 bahwa Perusahaan PT.Radio Ritme Tiga Media yang beralamat di Jl.Yos Sudarso
	Nomor ID : 00100446	Kelurahan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, Kalimantan Barat	Tanggal : 6 Mei 2025	Tidak ditemukan dilokasi dimana Izin diselenggarakan.	No.18 Singkawang sudah tidak ditemukan lagi.
2	ENERSI KAPUAS.PT	JL. Tanjungpura NO.95 Pontianak Selatan,Kalimantan Barat, 78123	Surat Perintah Tugas Nomor : 087/Balmon.61/KP.01.06/07/2025	Berita Acara Penelitian Lapangan Nomor: BAPL-002/BSPML_PNK/07/2025	Berdasarkan Surat Berita Acara Penelitian Lapangan yang di tandatangani oleh Ketua RT. 01 RW. 18 dan dilegalisir Lurah Melayu Darat Nomor: 48/PMD/IIV/2025, bahwa PT. Ersi Kapuas yang beralamat di JL.Tanjungpura NO.95 Pontianak Selatan sudah tidak ditemukan lagi.
	Nomor ID : 7410	Kelurahan Benua Melayu Darat, Kec. Pontianak Selatan,Kalimantan Barat.	Tanggal : 7 Juli 2025	Tidak ditemukan dilokasi dimana Izin diselenggarakan akan	
3	RADIO BIMAREKSA DIRGANTARA. PT	JL. Sultan Syahrir N0.12 RT 21 Sanggau.	Surat Perintah Tugas Nomor : 096/Balmon.61/KP.01.06/07/2025	Berita Acara Penelitian Lapangan Nomor: BAPL-003/BSPML_PNK/07/2025	Berdasarkan Berita Acara Penelitian Lapangan, yang di tandatangani oleh Ketua RT. 020 RW. 007 dan Surat Keterangan Kelurahan Beringin, Nomor : Nomor: 500/73/Pem, Tanggal 23 Juli 2025 bahwa Perusahaan PT.Radio Bima Reksa Dirgantara
	Nomor ID : 5657	Sanggau, Kalimantan Barat, 78512	Tanggal : 21 Juli 2025	Perusahaan tidak ditemukan dilokasi	

				Sesuai dengan Izin Stasiun Radio.	yang beralamat di Jl. Sultan Syahrir N0.12 RT 21 Sanggau sudah tidak ditemukan lagi dan tidak beroperasi lagi dalam waktu yang lama.
4	RADIO ARIES SANGGAU PERKASA,PT	Jl.Jend.Sudirman No.43-D Sanggau	Surat Perintah Tugas Nomor : 096/Balmon.61/KP.01.06/07/2025	Berita Acara Penelitian Lapangan Nomor: BAPL-004/BSPML_PNK/07/2025	Berdasarkan Berita Acara Penelitian Lapangan, yang di tandatangani oleh Ketua RT. 024 RW. 008 dan Surat Keterangan Kelurahan Beringin, Nomor : Nomor: 500/72/Pem, Tanggal 23 Juli 2025 bahwa Perusahaan PT.Radio Aries Sanggau Perkasa yang beralamat di Jl. Jend.Sudirman No.43-D Sanggau sudah tidak ditemukan lagi dan tidak beroperasi lagi dalam waktu yang lama.
	Nomor ID CLIAN: 6873	Sanggau, Kalimantan Barat, 78512	Tanggal : 21 Juli 2025	Perusahaan tidak ditemukan dilokasi Sesuai dengan Izin Stasiun Radio.	
5	RADIO DELTA PAWAN INDAH, PT.	Jl. H.Samanhudi No.15 Ketapang	Surat Perintah Tugas Nomor : 157/Balmon.61/KP.01.06/07/2025	Berita Acara Penelitian Lapangan Nomor: BAPL-005/BSPML_PNK/10/2025	Berdasarkan Berita Acara Penelitian Lapangan, yang di tandatangani oleh Ketua RT. 01 RW. 01 dan dilegalisir Mengetahui Kelurahan Banjar, Tanggal 30 Oktober 2025 bahwa Perusahaan PT. Radio Delta Pawan Indah, beralamat di Jl. H.Samanhudi No.15 Ketapang. sudah tidak beroperasi lagi dan Pemilik telah meninggal dunia.
	Nomor ID : 5776	Kelurahan Banjar Benua Kayong Ketapang, Kalimantan Barat, 78851,	Tanggal : 27 Oktober 2025	Perusahaan ditemukan dilokasi Sesuai dengan Izin Stasiun Radio. Dan sudah tidak beroperasi lagi. Dan Pemilik telah Meninggal Dunia	

BENCHMARK CAPAIAN KINERJA DENGAN UPT LAINNYA

Telah dilakukan Guna mengukur tingkat efektivitas, posisi relatif, serta konsistensi tata kelola keuangan negara di lingkungan Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Pontianak melakukan evaluasi komparatif (*Benchmarking*) horizontal bersama Unit Pelaksana Teknis (UPT) sejenis. Analisis perbandingan ini difokuskan pada hasil persentase pelaksanaan penanganan piutang BHP Frekuensi Radio pada tahun anggaran 2025 dengan parameter target capaian yang seragam. Berdasarkan target makro yang ditetapkan oleh pusat, baik Balai Monitor Kelas II Pontianak maupun Balai Monitor Kelas II Palembang sama-sama dibebankan target penanganan piutang yang mutlak, yaitu sebesar 100 persen di akhir tahun anggaran.

Tabel 47 *Benchmark* Capaian Kinerja (IK-9) dengan UPT Lain

Indikator Kinerja	UPT Ditjen Infrastruktur Digital	Target %	Capaian %	Keterangan
Persentase (%)				Persentase
Pelaksanaan Penanganan Piutang BHP Frekuensi Radio	Balmon Pontianak	100	100	Capaian Balmon Pontianak dan Balmon Palembang sama-sama 100%
	Balmon Palembang	100	100	

c. Inovasi/Strategi Keberhasilan

Strategi utama yang diterapkan dalam menyukseskan indikator ini adalah metode "Jemput Bola" Verifikasi Lapangan Proaktif. Alih-alih hanya mengandalkan surat penagihan administratif secara pasif, Balmon Pontianak mengerahkan tim PPNTD secara langsung ke alamat terdaftar pemegang izin. Keberhasilan strategi ini didukung oleh sinergi lintas instansi di tingkat akar rumput, di mana tim lapangan berkolaborasi aktif dengan pihak Kelurahan dan Ketua RT setempat untuk menerbitkan Berita Acara Penelitian Lapangan (BAPL) yang sah demi mendapatkan status hukum wajib bayar yang valid dan akurat.

d. Faktor Kendala/Hambatan dan Upaya Percepatan

Tantangan dan dinamika utama yang dihadapi tim penanganan piutang di lapangan adalah tingginya angka ketidaksesuaian antara data administratif wajib

bayar dengan realitas fisik di lokasi tujuan. Saat dilakukan penelusuran dan pengecekan fisik, banyak ditemukan badan usaha/stasiun radio penunggak BHP yang sudah lama tidak aktif, berhenti beroperasi, atau telah berpindah lokasi tanpa melaporkan perubahan alamat kantor kepada pihak Balmon. Kendala ini diperumit oleh hilangnya kontak pengurus perusahaan, sehingga proses konfirmasi penagihan terhambat secara signifikan dan memerlukan waktu investigasi tambahan untuk menelusuri keberadaan aset atau ahli waris wajib bayar.

Sebagai langkah percepatan, Balmon Pontianak melakukan simplifikasi birokrasi pembuktian dengan langsung menggandeng perangkat desa/kelurahan setempat guna menerbitkan Surat Keterangan Kelurahan resmi yang menyatakan bahwa perusahaan tersebut memang sudah tidak beroperasi lagi di lokasi asal. Selain itu, Balmon Pontianak mengoptimalkan pengkinian data (*Data cleansing*) pada sistem database perizinan untuk menandai akun-akun bermasalah ini, sehingga piutang macet yang disebabkan oleh perusahaan yang telah bubar dapat segera diusulkan ke pusat untuk diproses sesuai mekanisme penghapusan atau penyelesaian piutang negara yang berlaku.

e. Tindak Lanjut

Melakukan inventarisasi dan rekapitulasi secara berkala terhadap seluruh Berita Acara Penelitian Lapangan (BAPL) yang telah ditandatangani bersama perangkat kelurahan. Data hasil temuan lapangan ini kemudian ditindaklanjuti dengan mengajukan usulan pemutakhiran status piutang atau pelimpahan pengelolaan piutang macet kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)/KPKNL, guna memberikan kepastian hukum terhadap piutang yang secara nyata sudah tidak dapat ditagih lagi.

f. Rekomendasi Capaian

1. Direkomendasikan untuk memperketat persyaratan administrasi awal dan melakukan verifikasi faktual lapangan yang lebih ketat sebelum ISR atau alokasi frekuensi resmi diterbitkan, guna memitigasi risiko adanya perusahaan fiktif atau tidak akuntabel di masa depan.
2. Meningkatkan frekuensi koordinasi dan sinkronisasi data piutang secara periodik dengan Direktorat Jenderal Pajak atau instansi perizinan terpadu di daerah guna melacak keberadaan entitas bisnis wajib bayar yang berpindah tempat.

3. Mengusulkan pemanfaatan sistem pemantauan piutang berbasis notifikasi digital otomatis kepada wajib bayar sebelum memasuki masa jatuh tempo, guna menekan persentase piutang baru.

g. Efisiensi

Penanganan piutang melalui klasterisasi wilayah penelitian lapangan (misalnya menyatukan rute penelusuran wajib bayar di area geografis yang berdekatan) terbukti mampu meningkatkan **efisiensi waktu** dan **efisiensi biaya perjalanan dinas**. Penggunaan dokumen digital dan koordinasi terintegrasi via saluran komunikasi instan dengan aparat desa juga memangkas durasi birokrasi penentuan status keberadaan wajib bayar, sehingga menghemat belanja operasional kantor.

h. Implementasi Budaya Nilai BerAKHLAK

Implementasi nilai BerAKHLAK diwujudkan melalui penerapan nilai Berorientasi Pelayanan, dimana petugas penagihan tetap mengedepankan sikap persuasif, ramah, dan profesional saat melakukan konfirmasi kepada pihak terkait. Selain itu, petugas juga memberikan edukasi mengenai tata cara penyelesaian kewajiban sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Nilai Akuntabel diterapkan melalui setiap penemuan di lapangan yang dibuktikan secara hukum dengan pembuatan Berita Acara Penelitian Lapangan (BAPL). Dokumen tersebut ditandatangani oleh pejabat berwenang dan saksi lingkungan setempat, seperti RT atau pihak kelurahan, sehingga seluruh proses dapat dipertanggungjawabkan secara sah dan mutlak.





Gambar 34 Pelaksanaan Penanganan Piutang BHP Frekuensi Radio

IK-10 Persentase (%) Sosialisasi Pelayanan Publik**a. Latar Belakang**

Pemanfaatan spektrum frekuensi radio di wilayah Kalimantan Barat telah menjadi kebutuhan mendasar bagi berbagai sektor, mulai dari penyiaran, telekomunikasi seluler, hingga dukungan komunikasi vital di sektor penerbangan dan maritim. Sebagai unit pelaksana teknis, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Pontianak memiliki tanggung jawab untuk memastikan penggunaan sumber daya alam terbatas ini berjalan tertib dan bebas dari gangguan (interferensi). Hal ini selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang menuntut instansi pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Namun, pesatnya perkembangan teknologi komunikasi seringkali tidak sebanding dengan pemahaman regulasi yang memadai oleh para pengguna frekuensi. Munculnya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2023 membawa perubahan signifikan, khususnya mengenai pengenaan denda administratif terhadap pelanggaran penggunaan frekuensi radio. Perubahan ini membuat edukasi kepada masyarakat menjadi mendesak, agar para pengguna baik dari kalangan instansi pemerintah, pelaku usaha layanan internet, penyelenggara telekomunikasi seluler, penyelenggara *Broadcasting*, hingga komunitas radio amatir tidak hanya sekedar menggunakan frekuensi, tetapi juga memahami aspek legalitas dan prosedur perizinan yang berlaku.

Guna menjembatani kebutuhan informasi tersebut, Balmon SFR Kelas II Pontianak menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Pelayanan Publik sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada bulan Juli dan bulan November 2025. Melalui kegiatan ini, diharapkan dapat memberikan kemudahan asistensi dan konsultasi bagi masyarakat agar setiap perangkat dan frekuensi yang digunakan memiliki izin yang sah (legal). Dengan terciptanya pemahaman yang merata, diharapkan kualitas pelayanan publik Balmon Pontianak semakin meningkat, risiko interferensi dapat diminimalisir, dan seluruh pengguna frekuensi di Kalimantan Barat dapat menikmati konektivitas yang lancar serta aman dari sanksi hukum.

b. Capaian Kinerja

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Pontianak menyelenggarakan sosialisasi pelayanan publik sebagai bagian dari komitmen berkelanjutan dalam meningkatkan pemahaman serta kepatuhan masyarakat terhadap aturan penggunaan spektrum frekuensi radio.

Seiring berkembangnya teknologi, permintaan terhadap layanan frekuensi radio di tingkat nasional pun terus bertumbuh. Hal ini mendorong Balmon Pontianak untuk mengedepankan edukasi publik demi menjaga keteraturan spektrum frekuensi radio sebagai sumber daya alam terbatas. Sejalan dengan tata kelola yang baik dan mengutamakan pencegahan melalui peningkatan pemahaman pengguna, transparansi layanan, serta kemudahan dalam mengakses informasi perizinan maupun pengawasan alat dan/atau perangkat telekomunikasi.

Tabel 48 Capaian Pelaksanaan Sosialisasi Pelayanan Publik

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban serta pelayanan publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi	Persentase (%) Sosialisasi Pelayanan Publik	100%	100%	100%

Adapun ketentuan capaian indikator kinerja Sosialisasi Pelayanan Publik adalah sebagai berikut:

1. Dilaksanakan minimal 1 (satu) kali secara tatap muka atau daring;
2. Jumlah peserta minimal 30 orang.

Persentase capaian dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:

- Poin 1 terpenuhi = 50%;
- Poin 1 dan poin 2 terpenuhi = 100%.

Target kinerja sosialisasi pelayanan publik pada tahun 2025 ini ditetapkan sebesar 100%, dengan kriteria keberhasilan yaitu minimal satu kali pelaksanaan dalam satu tahun, dan kehadiran peserta paling sedikit 30 orang. Balmon Kelas II Pontianak berhasil memenuhi target tersebut secara optimal melalui pelaksanaan kegiatan sosialisasi dengan total peserta sebanyak 126 orang peserta. Dengan realisasi tersebut, capaian kinerja tercapai sebesar 100%.

Tabel 49 Hasil Capaian Pelaksanaan Sosialisasi Publik

No	Target	Realisasi		Persentase Capaian	Capaian
1	Dilaksanakan minimal 1x secara tatap muka atau online	1. Sosialisasi Permen Komdigi Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penggunaan SFR Berdasarkan Izin Kelas Dilaksanakan di Kantor Balmon Pontianak tanggal 15 Juli 2025	2. Sosialisasi Penggunaan SFR dan APT dengan Tema Pengawasan SFR dalam Mendukung Transformasi Digital dan Konektivitas Dilaksanakan di Kota Pontianak tanggal 13 November 2025	100%	100%
2	Minimal 30 peserta	26 orang peserta	100 orang peserta	100%	

Tabel tersebut menggambarkan capaian pelaksanaan kegiatan sosialisasi yang telah dilakukan Balmon Pontianak dalam rangka memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan. Pada indikator pertama, target yang ditentukan adalah terselenggaranya kegiatan sosialisasi minimal satu kali secara tatap muka atau melalui media daring (online). Target ini telah berhasil direalisasikan dengan pelaksanaan dua kegiatan sosialisasi yang dilakukan secara terpisah, masing-masing dengan judul, tema, waktu, dan lokasi yang berbeda.

Sosialisasi pertama dilaksanakan dengan fokus pada penyampaian materi mengenai Peraturan Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2025 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2023 terkait penggunaan Spektrum Frekuensi Radio (SFR) berdasarkan izin

kelas. Kegiatan ini diselenggarakan di Kantor Balmon Pontianak pada tanggal 15 Juli 2025. Pelaksanaan sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada peserta khususnya para penyelenggara jasa internet dan pemilik usaha yang tergabung kedalam APJII wilayah Kalimantan Barat, mengenai ketentuan terbaru dalam penggunaan spektrum frekuensi radio yang berkaitan dengan mekanisme perizinan berbasis izin kelas.



Gambar 35 Sosialisasi Permen Komdigi No. 2 Tahun 2025 bersama APJII dan Penyelenggara Jasa Internet di Kalimantan Barat

Sementara itu, sosialisasi kedua dilaksanakan di Kota Pontianak pada tanggal 13 November 2025, dengan mengangkat tema pengawasan Spektrum Frekuensi Radio (SFR) dan Alat Perangkat Telekomunikasi (APT) Dalam Mendukung Transformasi Digital Dan Konektivitas. Sosialisasi kedua. Fokus utama kegiatan ini adalah memberikan pemahaman mengenai pentingnya pengawasan dan pengendalian penggunaan frekuensi serta perangkat telekomunikasi dalam mendukung ekosistem digital yang andal dan berkelanjutan.



Gambar 36 Sosialisasi Pengawasan SFR dan APT di Kota Pontianak, 13 November 2025

Dari sisi capaian, indikator pertama menunjukkan tingkat realisasi sebesar 100%, yang berarti target minimal pelaksanaan satu kegiatan sosialisasi telah terlampaui dengan terlaksananya dua kegiatan. Hal ini menunjukkan kinerja yang optimal dalam penyelenggaraan program sosialisasi sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan. Pada indikator kedua, target yang ditetapkan adalah jumlah peserta minimal sebanyak 30 orang. Pada sosialisasi pertama diikuti oleh 26 orang peserta, sedangkan pada sosialisasi kedua diikuti oleh 100 orang peserta, sehingga capaian realisasi tercapai 100%. Secara umum, tabel tersebut menunjukkan bahwa seluruh target kinerja yang telah ditetapkan berhasil dicapai dengan baik.

Tabel 50 Perbandingan Target dan Capaian (IK-10) Sosialisasi Pelayanan Publik

Indikator Kinerja	2022		2023		2024		2025	
	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
Sosialisasi Pelayanan Publik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Berdasarkan data capaian periode 2022 hingga 2025, data tersebut menunjukkan tren performa yang stabil dan terjaga pada indikator Sosialisasi Pelayanan Publik selama periode empat tahun terakhir, mulai dari tahun 2022 hingga 2025. Dalam kurun waktu tersebut, dari target yang ditetapkan sebesar 100%, Balmon Pontianak secara konsisten berhasil merealisasikannya dengan capaian yang juga mencapai 100% setiap tahunnya tanpa ada penurunan. Hal ini mencerminkan komitmen berkelanjutan dan efektivitas yang maksimal dalam menjalankan program sosialisasi kepada masyarakat secara menyeluruh dan tepat sasaran sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan.

BENCHMARK CAPAIAN KINERJA DENGAN UPT LAINNYA

Telah dilakukan perbandingan capaian kinerja antar UPT Ditjen Infrastruktur Digital yaitu antara Balmon Pontianak dan Balmon Banjarmasin. Keduanya sama-sama memiliki nilai capaian 100% pada kegiatan pelaksanaan Sosialisasi Pelayanan Publik. Data *Benchmark* ini digunakan untuk upaya dalam peningkatan kualitas dan akan menjadi perbaikan untuk mencapai pencapaian kinerja di tahun yang akan datang.

Tabel 51 *Benchmark* capaian kinerja (IK-10) dengan UPT lain

Indikator Kinerja	UPT Ditjen Infrastruktur Digital	Target %	Capaian %	Keterangan
Persentase (%) Sosialisasi Pelayanan Publik	Balmon Pontianak	100	100	Persentase Capaian Balmon Pontianak dan Balmon
	Balmon Banjarmasin	100	100	Banjarmasin sama- sama 100%

c. Inovasi/Strategi Keberhasilan

Strategi keberhasilan tahun ini terletak pada penerapan segmentasi audiens yang tepat sasaran. Balmon Pontianak memisahkan pelaksanaan sosialisasi terkait materi teknis regulasi (untuk APJII/ISP) dengan materi pengawasan umum. Inovasi dalam metode penyampaian ini memastikan bahwa pesan yang diterima setiap kelompok peserta menjadi lebih relevan dan tidak tumpang tindih. Serta keberhasilan mencapai angka 126 total peserta (melampaui target minimal)

mencerminkan efektivitas komunikasi lembaga dalam membangun urgensi di masyarakat terkait pentingnya legalitas penggunaan frekuensi radio

d. Faktor Kendala/hambatan dan Upaya Percepatan

Dalam upaya mewujudkan tertib penggunaan spektrum frekuensi radio di wilayah Kalimantan Barat, Balmon SFR Kelas II Pontianak menghadapi beberapa tantangan, salah satu kendala utama adalah luasnya wilayah kerja yang mencakup area geografis yang menantang termasuk wilayah perbatasan, yang belum sepenuhnya sebanding dengan jumlah SDM serta dukungan infrastruktur monitoring yang ada. Selain itu, dinamika perubahan regulasi—seperti masa transisi ke peraturan yang baru—sering kali belum dipahami sepenuhnya oleh masyarakat, sehingga tingkat kepatuhan terhadap kewajiban perizinan dan penggunaan perangkat yang tersertifikasi masih perlu ditingkatkan. Untuk mengatasi hambatan tersebut, Balmon Pontianak telah melaksanakan optimalisasi layanan digital dengan cara mendorong pemanfaatan sistem e-Licensing untuk memangkas birokrasi, sehingga masyarakat di luar Kota Pontianak dapat mengurus perizinan dengan lebih cepat, mudah, transparan, dimanapun dan kapanpun tanpa terkendala jarak.

e. Tindak Lanjut

Setelah terlaksananya dua kegiatan sosialisasi di tahun 2025 dan tercapainya target capaian, ada beberapa tindak lanjut yang dapat dilaksanakan yaitu dengan melakukan pemantauan tingkat kepatuhan perizinan secara berkala, khususnya bagi para ISP yang telah mendapatkan asistensi terkait Permen Komdigi Nomor 2 Tahun 2025, serta menjadikan data pertanyaan dari peserta sosialisasi sebagai bahan evaluasi untuk menyusun materi sosialisasi tahun berikutnya agar lebih relevan dengan kebutuhan lapangan.

f. Rekomendasi Capaian

Berdasarkan capaian target tahun 2025 dan sasaran tahun 2026, terdapat beberapa prioritas utama dalam pelayanan publik, yaitu penguatan pengawasan frekuensi ilegal, optimalisasi teknologi digital, serta percepatan respons layanan. Langkah strategis yang dilakukan meliputi peningkatan penertiban frekuensi yang tidak sesuai izin (ISR), sosialisasi berkelanjutan, serta percepatan penanganan gangguan melalui aplikasi *Trouble Ticket* dan pengujian alat telekomunikasi.

g. Efisiensi

Untuk memastikan target kinerja tercapai secara optimal dengan penggunaan sumber daya yang tepat guna, Balmon Pontianak menerapkan langkah efisiensi seperti optimalisasi teknologi digital dengan memaksimalkan penggunaan teknologi informasi dalam operasional pelaksanaan sosialisasi pelayanan publik, salah satunya melalui pemanfaatan *QR Code*. Inovasi ini mempermudah akses masyarakat terhadap materi narasumber yang dipaparkan, pengisian formulir daftar hadir peserta, dan pengisian survey kepuasan masyarakat.

h. Implementasi Budaya Nilai BerAKHLAK

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan Balmon Pontianak telah sejalan dengan budaya nilai BerAKHLAK, yaitu Berorientasi Pelayanan dengan memberikan edukasi dan asistensi kepada masyarakat sehingga masyarakat merasa puas dengan pelayanan yang diberikan. Akuntabel dengan penyelenggaraan sosialisasi pelayanan publik sesuai dengan target peserta. Kompeten dengan menghadirkan narasumber yang kompeten sesuai bidang keahliannya. Kolaboratif dengan membangun kerja sama yang harmonis dengan organisasi dan berbagai pihak pengguna frekuensi di Kalimantan Barat. Serta Adaptif dengan responsif terhadap perubahan regulasi (Permen Komdigi No. 2/2025) dan menyesuaikan strategi kegiatan demi mencapai target kinerja.

IK-11 Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelayanan Publik (IKM/IPKP)**a. Latar Belakang**

Penyelenggaraan pelayanan publik yang prima, transparan, dan akuntabel merupakan tujuan utama dalam pelaksanaan pelayanan publik di lingkungan Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Pontianak. Guna memastikan kualitas layanan senantiasa selaras dengan harapan masyarakat, diperlukan mekanisme evaluasi yang komprehensif dan terukur. Dalam kaitan tersebut, Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dilaksanakan sebagai instrumen objektif untuk menilai efektivitas serta efisiensi layanan yang diberikan secara berkala.

Pelaksanaan survei ini berfungsi untuk memetakan indeks kepuasan serta menjangkau aspirasi dari para pengguna layanan Balmon Pontianak. Hasil yang diperoleh tidak hanya dimanfaatkan sebagai indikator capaian kinerja organisasi, namun juga menjadi landasan dalam melakukan analisis efektivitas dan perbaikan terhadap standar pelayanan yang ada. Melalui data survei, upaya perbaikan layanan bagi seluruh pengguna spektrum frekuensi radio di wilayah Kalimantan Barat dapat dilakukan secara lebih terarah dan berkelanjutan.

Penerima manfaat dari pelaksanaan survei kepuasan masyarakat mencakup pemegang Izin Stasiun Radio (ISR), penyelenggara telekomunikasi, lembaga penyiaran, instansi pemerintah, hingga pelaku usaha. Secara internal, hasil survei memberikan kontribusi signifikan bagi Balmon Pontianak dalam review standar operasional prosedur (SOP), peningkatan kompetensi sumber daya manusia dalam memberikan pelayanan yang lebih responsif, serta penguatan integritas sistem pelayanan guna mewujudkan tata kelola frekuensi radio yang tertib dan bertanggung jawab.

b. Capaian Kinerja

Indikator Kinerja Utama yang menjadi salah satu tolak ukur efektivitas pelayanan publik adalah Persentase (%) Pelaksanaan Survei Kepuasan Pelayanan Publik (IKM/IPKP). Secara teknis, indikator ini diukur melalui formulasi perbandingan antara hasil nilai survei riil yang diperoleh terhadap nilai target indeks sebesar 3.2 pada skala 4. Pelaksanaan survei ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Untuk menjamin validitas data, ditetapkan ambang batas jumlah responden minimal sebanyak 30 orang sebagai

representasi sampel yang akuntabel dalam menggambarkan kualitas layanan secara objektif.

Berdasarkan sasaran kegiatan yang telah direncanakan, target pelaksanaan survei kepuasan untuk periode tahun 2025 ditetapkan pada angka 100%. Target tersebut merepresentasikan komitmen instansi dalam melakukan monitoring serta evaluasi secara menyeluruh terhadap setiap aspek layanan yang diberikan kepada publik. Melalui perolehan data survei yang mencapai nilai target minimum 3.2, upaya peningkatan kualitas pelayanan terus dijaga agar selaras dengan ekspektasi masyarakat dan standar mutu yang telah ditetapkan.

Tabel 52 Capaian Pelaksanaan Survei Kepuasan Pelayanan Publik (IKM / IPKP)

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban serta pelayanan publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi	Persentase (%) Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelayanan Publik (IKM/IPKP)	100%	100%	100%

Persentase capaian indikator kinerja dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase (\%)} = \frac{\text{Hasil Survei IKM/IPKP}}{3,2} \times 100\%$$

Dengan ketentuan sebagai berikut:

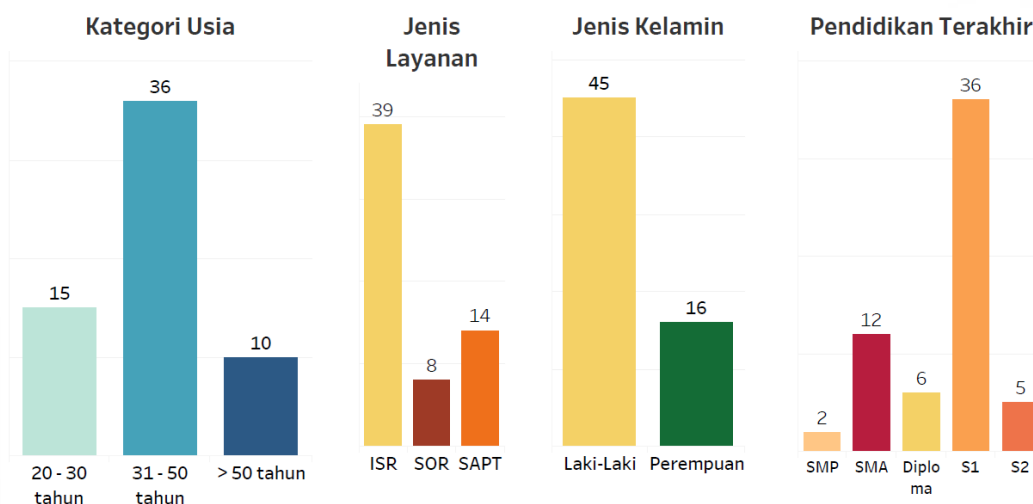
- Target nilai IKM/IPKP sebesar 3,2 dari skala 4;
- Jumlah responden minimal 30 orang.

Realisasi kinerja Balmon Pontianak tahun 2025 terkait Pelaksanaan Survei IKM menunjukkan angka 100% dari target yang telah ditentukan, sehingga persentase capaian kinerja akhir adalah sebesar 100%. Capaian ini mengindikasikan bahwa seluruh tahapan pelaksanaan survei, mulai dari pengumpulan data responden hingga analisis indeks kepuasan masyarakat, telah terlaksana secara optimal. Dengan terpenuhinya ambang batas minimal responden dan tercapainya nilai indeks yang ditargetkan, kinerja instansi dalam memberikan pelayanan publik termasuk dalam kategori memuaskan.

Tabel 53 Hasil Capaian Pelaksanaan Survei IKM / IPKP Tahun 2025

No	Survei	Target	Realisasi
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	3.20	3.73
2	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP)	3.20	3.73

Berdasarkan hasil evaluasi pelayanan publik yang telah dilaksanakan, parameter keberhasilan diukur melalui nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Target nilai yang ditetapkan untuk periode ini adalah sebesar 3.20 pada skala 4. Target tersebut merupakan standar minimal yang harus dicapai guna memastikan kualitas pelayanan tetap terjaga sesuai dengan ekspektasi pengguna layanan dan ketentuan yang berlaku. Pada realisasinya, nilai Indeks Kepuasan Masyarakat yang berhasil dicapai menunjukkan angka 3.73. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan berada pada kategori yang sangat baik.



Gambar 37 Distribusi responden berdasarkan usia, jenis kelamin, jenis layanan, dan pendidikan terakhir

Berdasarkan hasil survei yang telah dilaksanakan, karakteristik responden didominasi oleh kelompok usia produktif 31-50 tahun sebanyak 36 orang, diikuti oleh kelompok usia 20-30 tahun sebanyak 15 orang, dan usia di atas 50 tahun sebanyak 10 orang. Dari sisi gender, mayoritas responden adalah laki-laki dengan jumlah 45 orang, sementara responden perempuan berjumlah 16 orang. Meninjau latar belakang pendidikan, profil pengguna layanan didominasi oleh lulusan Strata 1 (S1) sebanyak 36 orang, diikuti oleh lulusan SMA (12 orang), Diploma (6 orang), Strata 2 (S2) (5 orang), dan SMP (2 orang). Distribusi jenis layanan yang diakses

menunjukkan bahwa layanan Izin Stasiun Radio (ISR) merupakan layanan yang paling banyak digunakan dengan jumlah 39 responden, disusul oleh layanan Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi (SAPT) sebanyak 14 responden, dan Sertifikat Operator Radio (SOR) sebanyak 8 responden.

Tabel 54 Capaian Nilai Indeks pada 9 Kategori Survei IKM

No	Kategori Survei IKM	Indeks
1	Biaya/tarif	3.69
2	Kompetensi Pelaksana	3.79
3	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3.74
4	Perilaku Pelaksana	3.82
5	Persyaratan	3.67
6	Produk Sertifikasi Jenis Pelayanan	3.77
7	Sarana dan Prasara	3.72
8	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	3.67
9	Waktu Penyelesaian	3.72

Bila ditinjau secara mendalam berdasarkan sembilan unsur pelayanan, kategori "Perilaku Pelaksana" mendapatkan apresiasi tertinggi dengan nilai indeks mencapai 3.82, disusul oleh "Kompetensi Pelaksana" sebesar 3.79. Hal ini mengindikasikan bahwa aspek sumber daya manusia dalam memberikan layanan memiliki integritas dan kemampuan teknis yang sangat mumpuni. Unsur lain seperti "Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan" (3.77) dan "Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan" (3.74) juga menunjukkan performa di atas rata-rata nilai total, yang mempertegas bahwa transparansi dan responsivitas instansi terhadap masukan masyarakat telah berjalan secara efektif.

Selain aspek manajerial, aspek operasional juga menunjukkan hasil yang konsisten dan stabil. Kategori "Waktu Penyelesaian" serta "Sarana dan Prasarana" masing-masing memperoleh nilai 3.72, sementara aspek "Biaya/Tarif" berada pada angka 3.69. Nilai terendah terdapat pada unsur "Persyaratan" serta "Sistem, Mekanisme, dan Prosedur" yang keduanya mencatatkan angka 3.67. Meskipun angka tersebut berada di atas target minimal (3.20), hasil ini menjadi catatan strategis bagi instansi untuk menyederhanakan alur birokrasi dan persyaratan layanan demi meningkatkan efisiensi di masa mendatang. Keberhasilan mempertahankan nilai tinggi pada seluruh kategori ini membuktikan

komitmen berkelanjutan dalam mewujudkan tata kelola pelayanan publik yang prima.

Tabel 55 Perbandingan Target dan Capaian (IK-11) Survei (IKM/IPKP)

Indikator Kinerja	2022		2023		2024		2025	
	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
Persentase (%) Pelaksanaan Survei Kepuasan Pelayanan Publik (IKM/IPKP)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Berdasarkan data capaian periode 2022 hingga 2025, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Pontianak secara konsisten berhasil mempertahankan kinerja optimal dalam pelaksanaan survei kepuasan pelayanan. Target persentase (%) Pelaksanaan Survei Kepuasan Pelayanan Publik (IKM/IPKP) sebesar 100% selalu tercapai setiap tahun. Hal ini membuktikan bahwa mekanisme evaluasi pelayanan publik telah menjadi instrumen manajerial yang stabil dan berkelanjutan dalam mengukur kualitas pelayanan publik. Capaian tahun 2025, kualitas pelayanan publik yang diukur melalui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mencatat nilai realisasi sebesar 3.73 dari target 3.20 pada skala 4.

BENCHMARK CAPAIAN KINERJA DENGAN UPT LAINNYA

Telah dilakukan perbandingan capaian kinerja antar UPT Ditjen Infrastruktur Digital yaitu antara Balmon Pontianak dan Balmon Banjarmasin. Keduanya sama-sama memiliki nilai capaian 100% pada kegiatan pelaksanaan survei kepuasan Masyarakat (IKM/IPKP). Data *Benchmark* ini digunakan untuk upaya dalam peningkatan kualitas dan akan menjadi perbaikan untuk mencapai pencapaian kinerja di tahun yang akan datang.

Tabel 56 *Benchmark* capaian kinerja (IK-11) dengan UPT lain

Indikator Kinerja	UPT Ditjen Infrastruktur Digital	Target %	Capaian %	Keterangan
Persentase (%) Pelaksanaan Survei Kepuasan Pelayanan Publik (IKM/IPKP)	Balmon Pontianak	100	100	Persentase Capaian Balmon Pontianak dan Balmon Banjarmasin sama-sama 100%

c. Inovasi/Strategi Keberhasilan

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Pontianak mengutamakan modernisasi layanan melalui pemanfaatan teknologi digital dan kolaborasi lintas unit. Dengan dukungan Direktorat Pelayanan Infrastruktur Digital, sistem survei berbasis *QR Code* telah diterapkan pada seluruh kanal layanan dan produk perizinan.

Metode ini mempermudah pengumpulan data kepuasan masyarakat secara langsung dan berkelanjutan. Dampaknya, evaluasi kualitas pelayanan menjadi lebih dinamis dan akurat karena didasarkan pada data terkini yang diperoleh sepanjang tahun.

d. Faktor Kendala/Hambatan dan Upaya Percepatan

Sistem pengambilan data kepuasan masyarakat sebelumnya dinilai kurang efektif karena hanya dilakukan dalam periode tahunan dan terbatas pada peserta sosialisasi. Hal ini menyebabkan dinamika kebutuhan pengguna layanan di lapangan belum terpotret secara menyeluruh.

Guna memperbaiki kondisi tersebut, diterapkan digitalisasi survei menggunakan *QR Code* pada setiap titik layanan dan dokumen perizinan. Melalui kolaborasi dengan Direktorat Pelayanan Infrastruktur Digital, pengumpulan data kini berlangsung secara kontinu sepanjang tahun.

Evaluasi hasil survei dilakukan setiap triwulan sebagai acuan untuk membenahi prosedur serta fasilitas agar lebih sesuai dengan harapan publik. Upaya ini bertujuan menjaga kualitas pelayanan tetap prima serta memperkuat implementasi Zona Integritas di Balmon Pontianak.

e. Tindak Lanjut

Meskipun capaian indeks secara keseluruhan berada pada kategori sangat baik, hasil evaluasi menunjukkan bahwa unsur "Persyaratan" serta unsur "Sistem, Mekanisme, dan Prosedur" memperoleh nilai indeks terendah, yaitu masing-masing sebesar 3.67. Sebagai langkah tindak lanjut untuk mempertahankan tren kinerja positif, perlu dilakukan simplifikasi pada alur birokrasi dan persyaratan administratif tanpa mengesampingkan regulasi yang berlaku. Upaya perbaikan akan difokuskan pada peningkatan literasi digital bagi pengguna layanan serta penguatan sistem informasi pelayanan agar prosedur dapat dipahami dengan lebih mudah, cepat, dan transparan oleh seluruh lapisan masyarakat.

f. Rekomendasi Capaian

Guna mengoptimalkan hasil Survei Kepuasan Pelayanan Publik di masa mendatang, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Pontianak menetapkan langkah-langkah perbaikan yang terencana dan berkesinambungan. Fokus utama diarahkan pada penguatan mutu layanan, pembenahan fasilitas pendukung sesuai standar operasional, serta pemanfaatan sistem survei digital untuk menjamin validitas data.

Evaluasi secara khusus akan diprioritaskan pada kategori dengan skor terendah sebagai acuan pembenahan yang lebih mendalam. Selain itu, frekuensi pelaksanaan survei akan ditambah untuk mendapatkan gambaran persepsi masyarakat yang lebih menyeluruh, sehingga data tersebut dapat menjadi fondasi yang kuat dalam perumusan kebijakan instansi yang lebih efektif.

g. Efisiensi

Dari sisi kuantitatif, pelaksanaan survei kepuasan masyarakat periode ini mencerminkan optimalisasi anggaran yang sangat baik melalui strategi integrasi program. Dengan menyatukan pengambilan data survei ke dalam agenda sosialisasi pelayanan publik dan asistensi pelayanan di Loker Pelayanan Balmon Pontianak, Balmon Pontianak mampu menekan biaya operasional khusus survei hingga 0% (nol rupiah).

Hal ini dapat tercapai karena komponen biaya operasional seperti perjalanan dinas, penyewaan tempat, serta konsumsi telah terakomodasi dalam anggaran kegiatan utama. Melalui metode penggabungan kegiatan tersebut, organisasi

tidak lagi memerlukan alokasi anggaran tambahan untuk proses pengumpulan data di lapangan.

h. Implementasi Budaya Nilai BerAKHLAK

Implementasi nilai budaya BerAKHLAK dalam pelaksanaan survei pelayanan publik di Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Pontianak diwujudkan melalui komitmen yang berorientasi pada pelayanan, di mana hasil survei dijadikan landasan evaluasi untuk meningkatkan kualitas layanan secara berkelanjutan. Aspek akuntabel dijaga dengan menjamin integritas pengelolaan data survei secara jujur dan transparan, sementara nilai kompeten tecermin dari pembekalan kemampuan teknis dan literasi digital bagi petugas dalam memanfaatkan perangkat survei berbasis teknologi. Dalam menjaga harmonisasi, seluruh responden diberikan kesempatan dan perlakuan yang setara tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, maupun tingkat pendidikan. Dedikasi dan loyalitas pegawai diwujudkan melalui kerja profesional yang mengutamakan keberhasilan organisasi secara menyeluruh di atas kepentingan pribadi atau tim. Selain itu, sikap adaptif ditunjukkan melalui penggunaan inovasi digital seperti *QR Code* dalam pengumpulan data serta optimalisasi media sosial untuk penyebaran informasi. Terakhir, nilai kolaboratif diimplementasikan melalui pembangunan kerja sama yang sinergis dengan instansi pusat guna memastikan kelancaran dan akurasi pelaksanaan survei.



Gambar 38 Pelayanan di Kantor Balai Monitor SFR Kelas II Pontianak

IK-12 Persentase (%) Pelaksanaan Survey Integritas Pelayanan Publik (IIPP/IPAK)**a. Latar Belakang**

Penerapan Indeks Integritas Pelayanan Publik (IIPP) serta Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) menjadi pilar utama bagi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Pontianak dalam membangun birokrasi yang bersih dari praktik KKN. Sebagai garda terdepan dalam pengelolaan spektrum frekuensi radio di wilayah Kalimantan Barat, Balmon Pontianak menitikberatkan pada penguatan aspek moralitas dalam setiap lini operasional. Hal ini memastikan bahwa proses perizinan, pemantauan sertifikasi perangkat, hingga tindakan pengawasan di lapangan benar-benar bersih, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Dampak positif dari tegaknya integritas ini menciptakan tren yang sehat bagi operator telekomunikasi dan pelaku bisnis melalui penyediaan layanan yang adil dan bebas dari pungutan liar. Selain itu, lembaga penyiaran serta instansi pemerintah dapat menjalankan fungsinya dengan dukungan teknis yang kredibel. Secara lebih luas, masyarakat umum dapat menikmati kualitas konektivitas yang stabil dan minim gangguan, yang merupakan dasar penting bagi kemajuan ekonomi digital serta efisiensi layanan publik di sektor kesehatan dan pendidikan.

Keberhasilan dalam mempertahankan indeks integritas yang tinggi bukan sekadar pencapaian administratif, melainkan bukti nyata transformasi Balmon Pontianak dalam mengamankan kedaulatan digital. Melalui tata kelola yang jujur, optimalisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dapat dilakukan secara maksimal tanpa kebocoran. Pada akhirnya, hal ini memperkuat kepercayaan masyarakat (*Public trust*) terhadap komitmen pemerintah dalam mengelola sumber daya alam terbatas berupa spektrum frekuensi radio demi kesejahteraan rakyat yang berkelanjutan.

b. Capaian Kinerja

Pelaksanaan survei ini secara hukum berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik serta Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017, yang mewajibkan penyelenggara layanan melakukan evaluasi berkala melalui Survei Kepuasan Masyarakat atau Survei Integritas. Dalam teknis penghitungannya, indikator kinerja ini menggunakan formula bagi-rata terhadap target nilai IKM/IPKP sebesar 3,6 pada skala 4, serta mensyaratkan pemenuhan jumlah responden minimal sebanyak 30 orang.

Tabel 57 Capaian Pelaksanaan Survei Integritas Pelayanan Publik (IIPP / IPAK)

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban serta pelayanan publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi	Persentase (%) Pelaksanaan Survey Integritas Pelayanan Publik (IIPP/IPAK)	100%	100%	100%

Persentase capaian indikator kinerja dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase (\%)} = \frac{\text{Hasil Survei IIPP/IPAK}}{3,6} \times 100\%$$

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Target nilai IIPP/IPAK sebesar 3,6 dari skala 4;
- Jumlah responden minimal 30 orang.

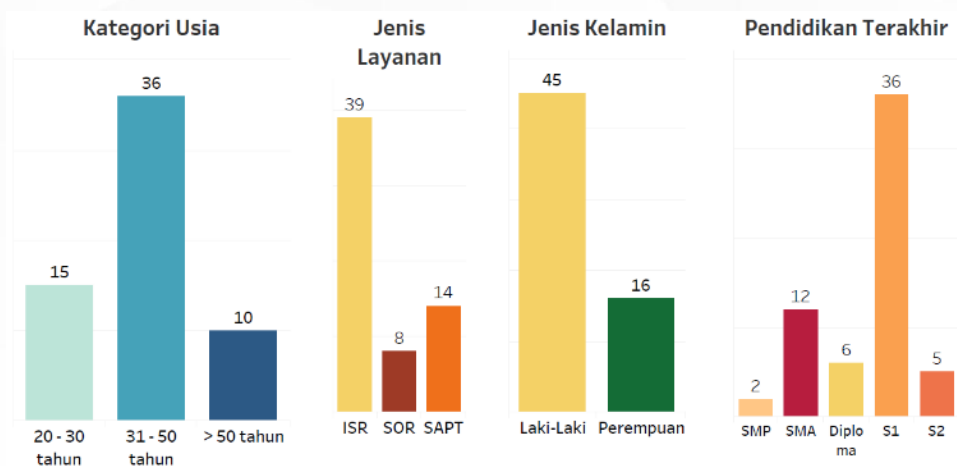
Capaian menunjukkan hasil kinerja yang sangat memuaskan dengan target kinerja sebesar 100%, Balmon Pontianak berhasil mencapai realisasi di angka 100%, sehingga nilai capaian akhir adalah 100%. Seluruh parameter survei telah terpenuhi secara objektif, membuktikan bahwa pelayanan publik di sektor pengawasan spektrum frekuensi radio dan alat dan/atau perangkat telekomunikasi di wilayah Kalimantan Barat telah berjalan sesuai dengan koridor hukum dan standar kualitas yang ditetapkan.

Tabel 58 Hasil Capaian Pelaksanaan Survei IIPP / IPAK Tahun 2025

No	Survei	Target	Realisasi
1	Indeks Integritas Pelayanan Publik (IIPP)	3.60	3.77
2	Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	3.60	3.77

Berdasarkan hasil evaluasi pelayanan publik yang telah dilaksanakan, parameter keberhasilan diukur melalui nilai Indeks Integritas Pelayanan Publik (IIPP). Target nilai yang ditetapkan adalah sebesar 3.60 pada skala 4. Target tersebut merupakan standar minimal yang harus dicapai guna memastikan integritas pelayanan tetap terjaga sesuai dengan ekspektasi pengguna layanan

dan ketentuan yang berlaku. Pada realisasinya, nilai Indeks Integritas Pelayanan Publik yang berhasil dicapai menunjukkan angka 3.77. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap integritas yang dimiliki oleh petugas pelayanan berada pada kategori yang sangat baik.



Gambar 39 Distribusi responden berdasarkan kategori usia, jenis layanan, jenis kelamin, dan pendidikan terakhir

Berdasarkan hasil survei yang telah dilaksanakan, karakteristik responden didominasi oleh kelompok usia produktif 31-50 tahun sebanyak 36 orang, diikuti oleh kelompok usia 20-30 tahun sebanyak 15 orang, dan usia di atas 50 tahun sebanyak 10 orang. Dari sisi gender, mayoritas responden adalah laki-laki dengan jumlah 45 orang, sementara responden perempuan berjumlah 16 orang. Meninjau latar belakang pendidikan, profil pengguna layanan didominasi oleh lulusan Strata 1 (S1) sebanyak 36 orang, diikuti oleh lulusan SMA (12 orang), Diploma (6 orang), Strata 2 (5 orang), dan SMP (2 orang). Distribusi jenis layanan yang diakses menunjukkan bahwa layanan Izin Stasiun Radio (ISR) merupakan layanan yang paling banyak digunakan dengan jumlah 39 responden, disusul oleh layanan Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi (SAPT) sebanyak 14 responden, dan Sertifikat Operator Radio (SOR) sebanyak 8 responden.

Tabel 59 Capaian Nilai Indeks pada 5 Kategori Survei IIPP

No	Kategori Survei IIPP	Indeks
1	Diskriminasi Pelayanan	3.78
2	Pelayanan Di Luar Prosedur	3.75
3	Penerimaan Imbalan	3.77

4	Percaloan/Perantara Tidak Resmi	3.77
5	Pungutan Liar (Pungli)	3.78

Tabel tersebut menyajikan hasil Survei Indeks Integritas Pelayanan Publik (IIPP) yang mencakup lima kategori utama dengan capaian nilai yang tergolong tinggi. Seluruh indikator menunjukkan skor pada rentang 3.75 hingga 3.78 dari skala 4.00, di mana kategori Diskriminasi Pelayanan dan Pungutan Liar (Pungli) mendapat nilai tertinggi sebesar 3.78. Sementara itu, kategori Penerimaan Imbalan serta Percaloan masing-masing meraih skor 3.77, dan kategori Pelayanan Di Luar Prosedur berada di angka 3.75.

Secara keseluruhan, hasil ini menggambarkan persepsi masyarakat yang sangat positif terhadap integritas layanan yang diberikan. Tingginya angka pada setiap parameter menunjukkan bahwa Balmon Pontianak telah berhasil menjalankan prosedur layanan secara bersih, transparan, dan profesional. Keberhasilan menjaga indeks di atas angka 3.70 mencerminkan komitmen kuat dalam menolak praktik gratifikasi, meniadakan peran perantara tidak resmi, serta memastikan keadilan pelayanan bagi seluruh pengguna layanan tanpa adanya diskriminasi.

Tabel 60 Perbandingan Target dan Capaian (IK-12) Survei IIPP/IPAK

Indikator Kinerja	2022		2023		2024		2025	
	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
Persentase (%) Pelaksanaan Survei Integritas Pelayanan Publik (IIPP/IPAK)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Berdasarkan data capaian periode 2022 hingga 2025, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Pontianak secara konsisten berhasil mempertahankan kinerja optimal dalam pelaksanaan survei integritas pelayanan. Target persentase (%) Pelaksanaan Survei Indeks Integritas Pelayanan Publik (IIPP/IPAK) sebesar 100% selalu tercapai setiap tahun. Hal ini membuktikan bahwa mekanisme evaluasi integritas pelayanan publik telah menjadi instrumen manajerial yang stabil dan berkelanjutan dalam mengukur integritas pelayanan. Capaian tahun

2025, integritas pelayanan publik yang diukur melalui Indeks Integritas Pelayanan Publik (IIPP) mencatat nilai realisasi sebesar 3.77 dari target 3.60 pada skala 4.

BENCHMARK CAPAIAN KINERJA DENGAN UPT LAINNYA

Telah dilakukan perbandingan capaian kinerja antar UPT Ditjen Infrastruktur Digital yaitu antara Balmon Pontianak dan Balmon Banjarmasin. Keduanya sama-sama memiliki nilai capaian 100% pada kegiatan pelaksanaan Survei Integritas Pelayanan Publik (IIPP/IPAK). Data *Benchmark* ini digunakan untuk upaya dalam peningkatan kualitas dan akan menjadi perbaikan untuk mencapai pencapaian kinerja di tahun yang akan datang.

Tabel 61 *Benchmark* capaian kinerja (IK-12) dengan UPT lain

Indikator Kinerja	UPT Ditjen Infrastruktur Digital	Target %	Capaian %	Keterangan
Persentase (%) Pelaksanaan Survei Integritas Pelayanan Publik (IIPP / IPAK)	Balmon Pontianak	100	100	Persentase Capaian Balmon Pontianak dan Balmon Banjarmasin sama-sama 100%
	Balmon Banjarmasin	100	100	

c. Inovasi/Strategi Keberhasilan

Upaya Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Pontianak dalam menegakkan integritas layanan dilakukan melalui penguatan tata kelola berbasis digital dan kemitraan antarunit kerja. Dengan dukungan teknis dari Direktorat Pelayanan Infrastruktur Digital, instansi telah mengimplementasikan mekanisme umpan balik berbasis pemindaian *QR Code* yang tersedia pada loket layanan Balmon.

Penerapan inovasi ini memfasilitasi penghimpunan data survei integritas yang berlangsung secara *Real-time* dan berkesinambungan tanpa terbatas oleh periode waktu tertentu. Transformasi dari metode konvensional ke sistem digital ini menghasilkan data yang lebih akurat, dinamis, dan representatif. Hasil analisis tersebut kemudian dimanfaatkan oleh organisasi sebagai instrumen evaluasi yang kredibel untuk memastikan setiap proses bisnis berjalan sesuai dengan prinsip transparansi dan profesionalisme.

d. Faktor Kendala/Hambatan dan Upaya Percepatan

Mekanisme survei integritas di Balmon Pontianak sebelumnya masih bersifat periodik dan terbatas pada peserta sosialisasi, sehingga aspirasi pengguna layanan harian belum sepenuhnya terakomodasi sebagai dasar pemetaan risiko. Sebagai solusi, dilakukan transisi ke sistem digital menggunakan *QR Code* yang terintegrasi pada loket pelayanan.

Langkah ini memungkinkan pengumpulan data berjalan secara kontinu sepanjang tahun tanpa bergantung pada agenda tertentu. Melalui evaluasi berkala, prosedur pelayanan dapat terus diperbaiki untuk menutup celah maladministrasi, memberikan jaminan layanan yang bersih bagi masyarakat, serta memperkuat predikat Zona Integritas dan kepercayaan publik terhadap profesionalisme instansi.

e. Tindak Lanjut

Hasil Survei Integritas Pelayanan Publik (IIPP/IPAK) periode lalu telah ditindaklanjuti sebagai dasar perbaikan layanan di tahun 2025. Fokus utama perbaikan mencakup peningkatan transparansi dan kemudahan penyampaian masukan masyarakat melalui sistem *QR Code* di loket layanan. Metode digital ini membuat pengumpulan data menjadi lebih berkelanjutan dan menjangkau lebih banyak pengguna layanan.

Selain itu, hasil survei digunakan untuk menyempurnakan prosedur internal, memperkuat kanal pengaduan, serta meningkatkan sosialisasi nilai antikorupsi kepada pegawai dan pengguna frekuensi. Dampaknya, nilai indeks integritas berhasil melampaui target minimal dan akuntabilitas layanan semakin meningkat. Hal ini membuktikan bahwa survei berfungsi sebagai alat perbaikan berkelanjutan yang memperkuat Zona Integritas dan kepercayaan publik terhadap Balmon Pontianak.

f. Rekomendasi Capaian

Sebagai upaya meningkatkan hasil Survei Integritas Pelayanan Publik pada tahun 2026, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Pontianak menetapkan langkah-langkah perbaikan yang terukur dan berkelanjutan. Fokus utama ditekankan pada penguatan kualitas layanan, pembenahan sarana dan prasarana sesuai standar, serta digitalisasi sistem survei demi akurasi data.

Proses evaluasi diprioritaskan pada unsur dengan capaian terendah agar langkah perbaikan lebih spesifik dan memberikan dampak langsung. Guna mendapatkan gambaran persepsi publik yang lebih komprehensif, periode pelaksanaan survei akan ditambah sehingga data yang dihasilkan lebih representatif dalam mendukung pengambilan kebijakan organisasi yang lebih tepat.

g. Efisiensi

Dalam mencapai target indikator Survei Integritas Pelayanan Publik (IIPP/IPAK), Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Pontianak menerapkan strategi efisiensi dengan mengintegrasikan pengambilan data survei ke dalam kegiatan sosialisasi pelayanan publik dan saat asistensi di loket pelayanan Balmon Pontianak. Penggunaan metode berbasis *QR Code* memungkinkan proses pengumpulan data berjalan lebih cepat, ramah lingkungan tanpa kertas, serta tidak memerlukan penambahan anggaran khusus. Selain mempercepat pengolahan data, pendekatan ini mengoptimalkan peran sumber daya manusia sehingga capaian indikator integritas dapat diperoleh secara efektif, terukur, dan efisien.

h. Implementasi Budaya Nilai BerAKHLAK

Implementasi nilai budaya BerAKHLAK dalam kegiatan survei integritas pelayanan publik di Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Pontianak diwujudkan melalui komitmen yang berorientasi pelayanan, di mana hasil survei dijadikan bahan evaluasi fundamental untuk meningkatkan kualitas serta transparansi layanan publik. Aspek akuntabel dijaga dengan menjamin integritas survei melalui pengelolaan data yang dilakukan secara jujur dan terbuka. Nilai kompeten tecermin dari pembekalan kemampuan teknis dan literasi digital bagi petugas pelaksana dalam mengoperasikan alat survei berbasis teknologi. Dalam menjaga keharmonisan, setiap responden diberikan kesempatan dan perlakuan yang setara untuk memberikan penilaian tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, maupun tingkat pendidikan. Dedikasi dan loyalitas pegawai ditunjukkan melalui profesionalisme kerja yang mengutamakan keberhasilan instansi secara menyeluruh di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Selain itu, sikap adaptif diimplementasikan melalui penggunaan inovasi digital seperti *QR Code* dan optimalisasi media sosial dalam penyebaran informasi. Terakhir, nilai kolaboratif

diwujudkan dengan membangun sinergi dan kerja sama yang kuat bersama instansi pusat guna memastikan kelancaran seluruh tahapan pelaksanaan survei.



Gambar 40 Pelayanan di Balmon SFR Kelas II Pontianak

IK-13 Persentase (%) Tindak Lanjut Verifikasi *Site* ISR *Microwave link* yang Tidak Sesuai (PrimaAksi)**a. Latar Belakang**

Tindak Lanjut Verifikasi *Site* ISR yang Tidak Sesuai (Prima Aksi) ditetapkan untuk memastikan akurasi dan validitas pangkalan data infrastruktur telekomunikasi nasional, khususnya di wilayah kerja Balmon Pontianak. Indikator ini krusial karena ketidaksesuaian data koordinat antara sistem perizinan dan kondisi riil di lapangan sering kali menjadi penghambat dalam proses perizinan, di mana banyak permohonan ISR ditolak akibat analisis potensi interferensi yang didasarkan pada data historis yang tidak akurat. Melalui pelaksanaan Prima Aksi yang terintegrasi dengan *Master data referensi site* (MDRS), Balmon Pontianak dapat mendorong pemutakhiran data secara menyeluruh, menurunkan tingkat penolakan izin yang tidak perlu, serta menjamin sinkronisasi antara data administrasi sistem dengan kondisi fisik di lapangan.

Penerima manfaat dari pencapaian indikator ini mencakup para penyelenggara jaringan telekomunikasi yang memperoleh kepastian teknis serta kemudahan dalam proses perizinan dan modifikasi infrastruktur mereka. Di sisi lain, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital mendapatkan basis data yang valid untuk pengawasan dan perencanaan spektrum frekuensi radio yang lebih efektif dan efisien. Secara luas, masyarakat di Kalimantan Barat turut diuntungkan melalui ketersediaan layanan telekomunikasi yang lebih stabil dan andal, karena risiko gangguan frekuensi akibat kesalahan data koordinat *site* dapat diminimalisir secara signifikan.

b. Capaian Kinerja

Target capaian kinerja yang ditetapkan untuk Tindak Lanjut Verifikasi *Site* ISR yang Tidak Sesuai (PrimaAksi) untuk tahun 2025 adalah 100%. Adapun realisasi capaian target kinerja tahun 2025 oleh Balai Monitor SFR Kelas II Pontianak adalah sebagai berikut:

Tabel 62 Capaian Tindak Lanjut Verifikasi *Site* ISR *Microwave link* yang Tidak Sesuai (PrimaAksi) Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban serta pelayanan publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi	Persentase (%) Tindak Lanjut Verifikasi <i>Site</i> ISR <i>Microwave link</i> yang Tidak Sesuai (PrimaAksi)	100%	100%	100%

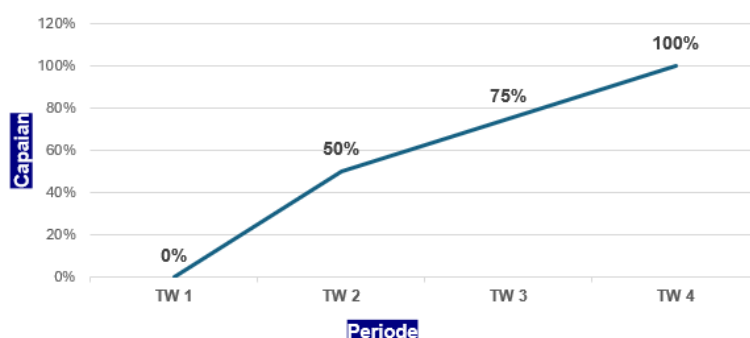
Adapun capaian indikator kinerja tersebut diperoleh berdasarkan perhitungan sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Jumlah site ISR tidak sesuai yang telah ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah site ISR yang tidak sesuai}} \times 100\%$$

Berdasarkan rumusan dan rekapitulasi data pada tabel di atas, realisasi indikator kinerja Tindak Lanjut Verifikasi *Site* ISR *Microwave link* yang Tidak Sesuai (Prima Aksi) pada tahun 2025 berhasil mencapai angka sempurna, yakni 100%. Merujuk pada formula pengukuran yang ditetapkan, persentase capaian tersebut menegaskan bahwa seluruh *site* ISR yang teridentifikasi mengalami ketidaksesuaian data telah berhasil ditindaklanjuti dan diselesaikan secara tuntas. Keberhasilan merealisasikan target maksimal ini merupakan wujud nyata dari efektivitas strategi penyelesaian proaktif berbasis rekonsiliasi data terpusat yang diimplementasikan oleh Balai Monitor Kelas II Pontianak. Melalui koordinasi intensif dan asistensi administratif secara langsung kepada pihak penyelenggara jaringan, proses pemutakhiran data koordinat maupun pengajuan penghentian izin bagi *site* yang telah *Off air* dapat dieksekusi dengan cepat dan efisien, sehingga validitas serta akurasi pangkalan data perizinan spektrum frekuensi radio nasional dapat senantiasa terjaga dengan optimal.

Tabel 63 Capaian Tindak Lanjut Verifikasi ISR *Microwave link* yang Tidak Sesuai (PrimaAksi) Tahun 2025

Periode	Site ISR yang tidak sesuai / Belum ada MDRS di MySpectra	Site ISR yang telah ditindaklanjuti (realisasi)	% Capaian
TW 1	0	0	100%
TW 2	2794	2794	
TW 3	14	14	
TW 4	14	14	
Total	2.822	2.822	



Gambar 41 Grafik Pelaksanaan Kegiatan Tindak Lanjut Verifikasi ISR *Microwave link* yang Tidak Sesuai (PrimaAksi) Per Triwulan Tahun 2025

Pelaksanaan kegiatan Tindak Lanjut Verifikasi *Site* ISR (Prima Aksi) di Balai Monitor Kelas II Pontianak menunjukkan tren progres yang stabil dan terukur di setiap fasenya. Berdasarkan data pemantauan per triwulan, kegiatan dimulai pada Triwulan II dengan realisasi sebesar 50%, yang mencakup tahap awal identifikasi dan verifikasi administrasi terhadap data *site* yang tidak sesuai. Memasuki Triwulan III, capaian meningkat secara akumulatif menjadi 75%, yang menunjukkan konsistensi tim dalam melakukan validasi lapangan dan koordinasi dengan para pemegang ISR. Progres terus berlanjut secara signifikan pada Triwulan IV dengan capaian 100% (2.822 *site*). Pola distribusi pengerjaan yang merata di setiap triwulan ini membuktikan adanya manajemen waktu yang efektif dan perencanaan operasional yang matang, sehingga beban verifikasi data yang masif dapat diselesaikan secara presisi tanpa terjadi penumpukan beban kerja di akhir tahun anggaran.

Tabel 64 Data Sebaran verifikasi *site* operator seluler di wilayah Kalimantan Barat Tahun 2025

Nama Operator	Jumlah ISR	Sudah Ditindaklanjuti	Belum Ditindaklanjuti
PT. Telekomunikasi Indonesia	1081	1081	0
PT. Telekomunikasi Seluler	14	14	0
PT. Indosat Ooredoo Hutchison	1237	1237	0
PT. XL Axiata	299	299	0
PT. Smart Telecom	187	187	0
PT. Aplikasnusa Lintasarta	4	4	0
Total	2.822	2.822	0

Berdasarkan data sebaran operasional kegiatan Prima Aksi tahun 2025, berikut adalah ringkasan distribusi verifikasi *site* berdasarkan operator seluler di wilayah Kalimantan Barat. Hasil verifikasi 2.822 *site* ISR menunjukkan bahwa sebanyak 2.822 *site* telah ditindaklanjuti. Data ini menjadi instrumen penting bagi Balmon Pontianak dalam memetakan kepatuhan administrasi koordinat *site* secara tepat sasaran yang berkaitan dengan efisiensi pemanfaatan ruang spektrum oleh para penyelenggara jaringan utama tersebut.



Gambar 42 Dokumentasi Kegiatan Tindak Lanjut Verifikasi ISR *Microwave link* yang Tidak Sesuai (PrimaAksi)

Akurasi data koordinat *site* merupakan tantangan global dalam manajemen spektrum frekuensi radio. Di Indonesia, khususnya melalui inisiasi MDRS (*Master data referensi site*), langkah sinkronisasi data perizinan dengan kondisi riil di lapangan telah menjadi prioritas nasional. Jika dibandingkan dengan kawasan regional ASEAN, banyak negara masih menghadapi kendala serupa terkait

diskrepansi data historis akibat perbedaan perangkat ukur GPS dan metode pencatatan manual di masa lalu. Posisi Indonesia melalui program "Prima Aksi" menunjukkan progres yang lebih proaktif dibandingkan beberapa negara tetangga dalam hal pembersihan data pangkalan data spektrum secara masal. Hal ini penting karena akurasi koordinat bukan sekadar masalah administratif, melainkan fondasi utama dalam melakukan analisis yang valid. Tanpa data *site* yang presisi, risiko kegagalan teknis dan penolakan izin baru akan terus meningkat, yang pada akhirnya dapat menghambat pertumbuhan ekonomi digital nasional.

Sebagai bentuk evaluasi berkelanjutan terhadap upaya penertiban dan sinkronisasi data perizinan, berikut disajikan rekapitulasi capaian kinerja historis untuk kegiatan Tindak Lanjut Verifikasi Ketidaksesuaian Data ISR (Prima Aksi) secara berkesinambungan dari tahun 2022 hingga 2025:

Tabel 65 Perbandingan Target dan Capaian (IK-13) Tindak Lanjut Verifikasi Ketidaksesuaian Data ISR (Prima Aksi)

Indikator Kinerja	2022		2023		2024		2025	
	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
Tindak Lanjut Verifikasi <i>Site</i> ISR <i>Microwave link</i> yang Tidak Sesuai (PrimaAksi)	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Berdasarkan rekapitulasi data pada tabel di atas, kegiatan Tindak Lanjut Verifikasi Ketidaksesuaian Data ISR (Prima Aksi) baru diimplementasikan secara efektif sebagai indikator pengukuran pada tahun 2023, sehingga tidak terdapat rekam jejak capaian pada tahun 2022. Sejak awal pelaksanaannya, Balai Monitor Kelas II Pontianak berhasil mencatatkan performa yang sangat prima dengan mempertahankan realisasi target secara sempurna di angka 100% selama tiga tahun berturut-turut (2023–2025).

Konsistensi pencapaian maksimal ini merupakan wujud nyata dari tingginya komitmen instansi dalam menjaga integritas dan akurasi pangkalan data spektrum nasional (*Master Data Referensi Site*). Keberhasilan mempertahankan persentase 100% ini juga membuktikan bahwa strategi penyelesaian ketidaksesuaian data khususnya melalui pendekatan rekonsiliasi proaktif dan asistensi langsung kepada

para penyelenggara jaringan telekomunikasi berjalan dengan sangat efektif dan efisien dari tahun ke tahun.

BENCHMARK CAPAIAN KINERJA DENGAN UPT LAINNYA

Sebagai upaya untuk mengukur tingkat efektivitas, efisiensi, dan daya saing dalam penyelesaian program penertiban data perizinan, berikut disajikan data komparasi (*Benchmarking*) capaian kinerja antara Balai Monitor Kelas II Pontianak dengan Balai Monitor Semarang, secara khusus pada indikator Tindak Lanjut Verifikasi Ketidaksesuaian Data ISR (Prima Aksi):

Tabel 66 *Benchmark* Capaian Kinerja (IK-13) dengan UPT Lain

Indikator Kinerja	UPT Ditjen Infrastruktur Digital	Target %	Capaian %	Keterangan
Persentase (%)Tindak Lanjut Verifikasi ISR <i>Microwave link</i> yang Tidak Sesuai (PrimaAksi)	Balmon Pontianak	100	100	Persentase Capaian Balmon Pontianak dan Balmon Semarang sama-sama mencapai Capaian Target.
	Balmon Semarang	100	100	

Berdasarkan rekapitulasi data *Benchmarking* pada tabel di atas, dapat ditarik analisis perbandingan kinerja antara Balmon Pontianak dan Balmon Semarang dalam mengeksekusi program Prima Aksi. Secara keseluruhan, kedua Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital tersebut menunjukkan performa operasional yang sangat prima dan seimbang, di mana keduanya berhasil merealisasikan target secara sempurna di angka 100%. Pencapaian yang setara dengan Balmon Semarang ini merepresentasikan bahwa Balmon Pontianak memiliki kapasitas manajerial dan efektivitas eksekusi yang sangat kompetitif di tingkat nasional. Keberhasilan mempertahankan persentase maksimal ini membuktikan bahwa strategi penyelesaian melalui inovasi pendekatan rekonsiliasi terpusat dan asistensi administratif yang diterapkan oleh Balmon Pontianak telah berjalan dengan sangat efektif serta memenuhi standar kualitas pengawasan yang tinggi, terlepas dari perbedaan karakteristik wilayah operasional dengan satuan kerja lainnya.

c. Inovasi/Strategi Keberhasilan

Keberhasilan penyelesaian target verifikasi terhadap 2.822 *site* pada Tindak Lanjut Verifikasi ISR *Microwave link* yang Tidak Sesuai (PrimaAksi) secara penuh (100%) bertumpu pada inovasi pendekatan manajerial. Strategi yang diimplementasikan oleh Balai Monitor Kelas II Pontianak adalah penerapan metode rekonsiliasi data proaktif atau melalui forum rapat koordinasi intensif bersama perwakilan penyelenggara jaringan telekomunikasi seluler. Inovasi percepatan ini secara khusus dirancang untuk respons pemutakhiran data dari pihak operator. Melalui forum sinkronisasi tersebut, tim Balmon tidak hanya memvalidasi silang pangkalan data (*Master data referensi site*) secara terpusat, tetapi juga mengeksekusi strategi asistensi administratif di tempat. Strategi pendampingan langsung ini terbukti menjadi faktor penentu keberhasilan yang sangat krusial, karena instansi dapat secara persuasif mendorong sekaligus mendampingi pihak pemegang izin untuk segera memproses perbaikan data di dalam sistem saat itu juga baik berupa modifikasi titik koordinat operasional maupun pengajuan penghentian Izin Stasiun Radio (ISR) bagi *site* yang telah dikonfirmasi mati (*Off air*). Sinergi antara ketegasan inisiatif, penghapusan total kebutuhan inspeksi fisik ke lapangan, serta efektivitas asistensi administratif inilah yang membentuk landasan keberhasilan Balmon Pontianak dalam merealisasikan seluruh target Prima Aksi secara cepat, akurat, dan sangat efisien dari sisi penggunaan anggaran.

d. Faktor Kendala/Hambatan dan Upaya Percepatan

Meskipun target penyelesaian verifikasi ketidaksesuaian data ISR (Prima Aksi) tahun 2025 berhasil direalisasikan secara penuh (100% atau 2.822 *site*), proses pelaksanaannya dihadapkan pada sejumlah kendala seperti pada proses tindak lanjut di sisi pemegang ISR. Perbaikan data ISR sepenuhnya bergantung pada kesiapan operator untuk melakukan pengecekan ulang data teknis dan koordinat riil di lapangan sebelum mengajukan modifikasi atau penghentian ISR di sistem perizinan. Proses ini memerlukan waktu karena melibatkan validasi internal, penyesuaian administrasi, serta pertimbangan operasional jaringan yang masih aktif. Selain itu, pada beberapa lokasi *site*, pemegang ISR juga harus terlebih dahulu mengajukan pembuatan MDRS sebelum dapat melakukan modifikasi ISR. Selain itu, terdapat hambatan administratif berupa respons dari sebagian penyelenggara jaringan dalam memvalidasi data historis *site* mereka. Kendala

lainnya adalah tingginya temuan *site* yang faktanya sudah tidak beroperasi (*Off air*) atau dibongkar, namun pihak operator belum melaporkan atau mengajukan penghentian Izin Stasiun Radio (ISR) pada sistem perizinan, sehingga memperlambat proses sinkronisasi data riil.

Untuk mengatasi hambatan utama berupa koordinasi dan respons dari pihak penyelenggara jaringan seluler dalam memetakan serta melaporkan pemutakhiran data *site* mereka, Balmon Pontianak mengimplementasikan strategi percepatan yang berfokus pada pendekatan proaktif di tingkat manajerial dan administratif. Upaya penyelesaian sepenuhnya difokuskan pada metode *Desk evaluation* melalui penyelenggaraan rapat koordinasi intensif. Dalam pertemuan di ruang rapat tersebut, tim Balmon secara langsung melakukan rekonsiliasi, sinkronisasi, dan validasi silang pangkalan data bersama perwakilan operator (seperti Telkomsel, Indosat, dan lainnya) untuk memastikan status operasional setiap *site* secara cepat dan terpusat. Selanjutnya, guna memangkas hambatan birokrasi internal pemegang izin di sistem perizinan, Balmon Pontianak memberikan pendampingan administratif secara *On-the-spot* selama rapat berlangsung. Melalui asistensi langsung ini, pihak operator didorong untuk segera mengeksekusi tindakan perbaikan data saat itu juga, baik berupa pembaruan data koordinat maupun pengajuan penghentian (pencabutan) ISR bagi *site* yang telah dikonfirmasi *Off air*. Pendekatan pertemuan evaluasi ini terbukti sangat efisien dalam mempercepat eksekusi pemutakhiran sistem, sehingga target verifikasi Prima Aksi dapat dituntaskan 100% pada tahun berjalan tanpa tersandera oleh lambatnya pelaporan sepihak dari penyelenggara.

e. Tindak Lanjut

Laporan hasil verifikasi Prima Aksi tahun 2025 dimanfaatkan secara langsung sebagai instrumen pada pangkalan data ISR Nasional untuk mewujudkan sinkronisasi antara sistem perizinan dengan kondisi riil di lapangan. Hasil verifikasi tersebut digunakan sebagai referensi baku dalam pemutakhiran *Master data referensi site* (MDRS) guna meningkatkan akurasi analisis teknis, meminimalisir penolakan izin, serta mengoptimalkan potensi penerimaan PNBPN melalui penertiban stasiun yang sudah tidak beroperasi.

Sebagai bentuk tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan tahun sebelumnya, Balmon Pontianak telah mengimplementasikan penguatan manajemen koordinasi proaktif dengan penyelenggara serta sinkronisasi data administrasi pra-inspeksi.

Langkah perbaikan ini terbukti efektif dalam mengatasi kendala inefisiensi lapangan dan menjadi faktor kunci tercapainya target kinerja verifikasi sebesar 100% pada tahun berjalan.

f. Rekomendasi Capaian

Berdasarkan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan verifikasi ketidaksesuaian data ISR (Prima Aksi) tahun 2025, direkomendasikan beberapa langkah strategis untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi kinerja di tahun mendatang:

1. Implementasi Digitalisasi Pengawasan: Mengembangkan pangkalan data berbasis *Mobile* untuk mempercepat proses pencarian, filtrasi, dan validasi koordinat *site* secara *Real-time* oleh tim teknis di lapangan.
2. Sinkronisasi Data Periodik dengan Operator: Membangun mekanisme rekonsiliasi data secara rutin dengan penyelenggara jaringan telekomunikasi (khususnya operator besar) untuk memutakhirkan status operasional stasiun sebelum inspeksi dilakukan, guna meminimalisir inefisiensi akibat temuan stasiun *Off air*.
3. Peningkatan Edukasi Kepatuhan: Mengintensifkan sosialisasi kepada pemegang izin mengenai kewajiban pelaporan secara proaktif untuk setiap perubahan koordinat atau penghentian penggunaan frekuensi, guna menjaga integritas *Master data referensi site* (MDRS) nasional.

g. Efisiensi

Dalam mencapai target penyelesaian 2.822 *site* pada program Prima Aksi tahun 2025, Balmon Pontianak berhasil melakukan efisiensi sumber daya operasional dan anggaran yang terukur melalui penerapan metode (rekonsiliasi data administratif) secara terpusat bersama pihak penyelenggara jaringan. Melalui metode ini, dari total 2.822 *site* yang menjadi target, seluruhnya dapat divalidasi, disinkronkan, dan dieksekusi pemutakhiran datanya secara jauh lebih cepat karena mengeliminasi total kebutuhan inspeksi fisik ke lapangan. Optimalisasi tahapan verifikasi yang murni difokuskan pada sinkronisasi di atas meja ini secara otomatis menghapuskan beban waktu operasional tim teknis. Dengan demikian, capaian target kinerja 100% dapat direalisasikan secara penuh dalam batas alokasi anggaran yang telah ditetapkan sejak awal tahun, tanpa memerlukan

usulan penambahan biaya operasional ekstra, sehingga prinsip efisiensi dalam pengelolaan anggaran instansi tercapai dengan sangat baik.

h. Implementasi Budaya Nilai BerAKHLAK

Pencapaian target 100% pada indikator Tindak Lanjut Verifikasi Ketidakesesuaian Data ISR (Prima Aksi) sangat berkaitan dengan penerapan nilai-nilai dasar BerAKHLAK dalam pelaksanaan tugas operasional di lingkungan Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Pontianak. Nilai Berorientasi Pelayanan tercermin dari komitmen pegawai dalam memastikan akurasi pangkalan data guna memberikan kepastian teknis bagi penyelenggara telekomunikasi, sekaligus menjamin masyarakat terbebas dari potensi gangguan (interferensi) jaringan. Nilai Akuntabel diwujudkan melalui pelaksanaan verifikasi terhadap 2.822 *site* secara transparan dan penuh tanggung jawab untuk membangun *Master data referensi site* (MDRS) yang valid, yang bermuara pada pengamanan potensi penerimaan negara (PNBP). Nilai Kompeten terlihat dari ketelitian dan keahlian analitis tim saat melakukan rekonsiliasi data koordinat dan sinkronisasi status operasional pemancar. Selanjutnya, nilai Harmonis dan Kolaboratif tampak nyata dalam sinergi internal tim yang solid serta koordinasi proaktif dengan para penyelenggara jaringan telekomunikasi untuk memvalidasi data historis secara komprehensif. Nilai Loyal dibuktikan melalui dedikasi kuat para pegawai dalam mendukung agenda penertiban frekuensi nasional, pantang menyerah menuntaskan target hingga menjangkau area pelosok di Kalimantan Barat. Sementara itu, nilai Adaptif terlihat dari kemampuan tim menyesuaikan strategi kerja, seperti mengoptimalkan pendekatan evaluasi awal dan pemetaan zona terpadu guna merespons kendala secara efisien. Penerapan nilai-nilai tersebut menjadi fondasi penting dalam memastikan indikator penertiban data ISR dapat dicapai secara maksimal dan memberikan manfaat nyata bagi ekosistem digital nasional.

SASARAN 2 MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA BIROKRASI YANG EFEKTIF DAN EFISIEN

Pada Sasaran Program II “**Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Birokrasi yang Efektif dan Efisien**” yang terdapat 2 (dua) indikator kinerja

IK 14 Nilai Kinerja Anggaran Balai Monitor SFR Kelas II Pontianak

Nilai Kinerja Anggaran Unit Pelaksana Teknis (UPT) merupakan indikator penting dalam menilai efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran di tingkat operasional. UPT sebagai unit kerja yang melaksanakan kebijakan teknis dan operasional pemerintah memiliki tanggung jawab dalam mengelola anggaran agar dapat mendukung pencapaian kinerja organisasi secara optimal. Dalam praktiknya, masih terdapat berbagai tantangan dalam pengelolaan anggaran di UPT, seperti rendahnya penyerapan anggaran, ketidaktepatan alokasi, serta kurangnya kesesuaian antara anggaran yang digunakan dengan output yang dihasilkan. Oleh karena itu, diperlukan pengukuran nilai kinerja anggaran untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan dapat memberikan manfaat yang maksimal sesuai dengan prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas.

Pada tahun 2025, target Perjanjian Kinerja (PK) yang ditargetkan oleh Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital untuk Balmon Pontianak minimal memiliki capaian > 86,95. **Berdasarkan data yang diperoleh dari Kementerian Keuangan diketahui bahwa capaian Indikator hingga akhir Desember 2025 adalah 83,82.**

Adapun formula yang digunakan untuk menghitung realisasi NKA adalah sebagai berikut:

$$50\% \text{ NK Perencanaan Anggaran DIPA Baru} + 50\% \text{ NK Pelaksanaan Anggaran (Rata2 Baru + Lama)}$$

Berikut capaian pada Balai Monitor SFR Kelas II Pontianak berdasarkan aplikasi e-Monev Kementerian Keuangan (<https://monev.kemenkeu.go.id>) :

No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	NK Pelaksanaan Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran
1	694713	BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II PONTIANAK	75,00	88,75	81,88

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri

Gambar 43 DIPA Baru (694713)

Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	NK Pelaksanaan Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran
BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II PONTIANAK	85,00	96,52	90,76

Gambar 44 DIPA Lama (654137)

Berdasarkan data-data di atas diperoleh hasil perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Nilai Kinerja Anggaran} = (50\% \times 75) + (50\% \times 92,64) = 83,82$$

Capaian indikator kinerja dimaksud dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 67 Capaian Nilai Kinerja Anggaran UPT Balmon Pontianak Tahun 2025

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya kualitas tata kelola birokrasi yang efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran Balai Monitor SFR Kelas II Pontianak	86,95	83,82	96,40%

Berdasarkan penjelasan diatas, diketahui bahwa capaian untuk indikator “Nilai Kinerja Anggaran UPT Balmon Pontianak Tahun 2025 dari Kementerian Keuangan” **telah terlaksana tetapi kurang dari target yang ditetapkan yaitu 96,40%**. Capaian tersebut kurang optimal disebabkan oleh nomenklatur baru dan efisiensi anggaran, dimana mengurangi efektifitas penggunaan SBK yang berpengaruh terhadap nilai kinerja pelaksanaan anggaran.

Berikut perbandingan target dan capaian indikator kinerja Nilai Kinerja Anggaran periode tahun 2022 sampai dengan 2025:

Tabel 68 Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja (IK-14) 2022-2025

Indikator Kinerja	2022		2023		2024		2025	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Nilai Kinerja Anggaran Balai Monitor SFR Kelas II Pontianak	87	89.7	87	94.12	94	92.19	86.95	83.82

BENCHMARK CAPAIAN KINERJA DENGAN UPT LAINNYA

Apabila dibandingkan dengan Balai Monitor SFR Kelas II Banjarmasin, didapat hasil sebagai berikut:

Tabel 69 *Benchmark* Capaian Kinerja (IK-14) dengan UPT Lain

Indikator Kinerja	UPT Ditjen Infrastruktur Digital	Target	Capaian	Keterangan
Nilai Kinerja Anggaran	Balmon Pontianak	86.95	96.40%	Persentase Capaian Balmon Pontianak dan Balmon Banjarmasin sama-sama dibawah 100% dari target 86.95
	Balmon Banjarmasin	86.95	98,44%	

Dari tabel di atas didapatkan data bahwa target NKA Tahun 2025 sebesar 86,95 tidak dapat dicapai oleh kedua UPT, walaupun realisasi capaian UPT Pontianak lebih rendah daripada UPT Banjarmasin, nilai kinerja tersebut merupakan kolaborasi maksimal dari pengelola anggaran dan pelaksana kegiatan yang saling bersinergi sehingga rencana kegiatan dan realisasi anggaran dapat bersinergi.

Dampak tercapainya indikator kinerja Nilai Kinerja Anggaran untuk masyarakat yaitu masyarakat mendapatkan layanan sesuai kebutuhan melalui program-program yang telah direncanakan dan dijalankan secara efektif dan efisien.

Pada pencapaian indikator Nilai Kinerja Anggaran telah dilakukan efisiensi sumber daya manusia dengan penempatan personil yang tepat sesuai dengan keahliannya serta pembagian tugas yang jelas pada tim pengelola anggaran (Perencana, PPK, Pejabat Pengadaan dan Bendahara).

Balai Monitor SFR Kelas II Pontianak telah menerapkan budaya BerAKHLAK pada pencapaian target Nilai Kinerja Anggaran (NKA). Hal tersebut dapat dilihat pada hasil perencanaan yang lebih tepat sasaran sehingga deviasi output dan revisi anggaran berkurang. Nilai-nilai yang diimplementasikan, antara lain:

- ✓ Akuntabilitas, diwujudkan dengan meningkatkan kualitas pertanggungjawaban anggaran, mengurangi temuan audit dan memperkuat kepercayaan publik;
- ✓ Harmonis, diwujudkan dengan kolaborasi antar-unit meningkat, sehingga proses perencanaan dan pelaksanaan lebih sinkron;
- ✓ Loyalitas, diwujudkan melalui kepatuhan terhadap regulasi, SOP dan kebijakan pengelolaan anggaran;
- ✓ Kolaboratif, diwujudkan melalui penguatan kerjasama antara perencana, PPK, bendahara dan pengendali teknis; dan

Adaptif, diwujudkan melalui percepatan respons terhadap perubahan kebijakan, *refocusing*, *automatic adjustment* atau dinamika lapangan.

IK 15 Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)

Pelaporan keuangan yang berkualitas merupakan salah satu aspek penting dalam pengelolaan keuangan negara. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) berperan dalam menyusun laporan keuangan yang akurat, transparan, dan sesuai dengan standar yang berlaku. Dalam era digitalisasi dan peningkatan akuntabilitas publik, penting bagi UAKPA untuk terus meningkatkan kualitas pelaporan guna mendukung pengambilan keputusan yang tepat serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan keuangan pemerintah. Permasalahan yang sering muncul dalam pelaporan keuangan meliputi ketidaktepatan pencatatan, keterlambatan dalam penyampaian laporan, serta kurangnya pemahaman terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kualitas pelaporan keuangan UAKPA agar lebih transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kementerian Komunikasi dan Digital di tahun anggaran 2025 menargetkan seluruh Satkernya memiliki capaian Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) yaitu 97. Berdasarkan Nota Dinas Nomor: 2549/DJID.1/KU.01.09/09/2025 tentang Penyampaian Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Tahun 2025, berdasarkan Indikator Penilaian terhadap Pelaporan Keuangan UAKPA Tahun 2025, yang terdiri dari Jumlah Transaksi Koreksi Audit, Kesalahan Penganggaran berdasarkan LHP BPK, Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran/Penerimaan, Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan ke Entitas Pelaporan Hasil Penilaian Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan, dan Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Hasil Penilaian PIPK ke Entitas Pelaporan, UAKPA Balmon Pontianak mendapatkan nilai akhir yaitu 100, sehingga **Berdasarkan data yang diperoleh diketahui bahwa capaian Indikator hingga akhir Desember 2025 adalah 100.**

Capaian indikator kinerja dimaksud dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 70 Capaian Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya kualitas tata kelola birokrasi yang efektif dan efisien	Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)	97	100	103.09%

Berdasarkan penjelasan diatas, diketahui bahwa capaian untuk indikator “Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)” telah terlaksana sesuai target yang ditetapkan yaitu 100%.

Berikut perbandingan target dan capaian indikator kinerja Nilai UAKPA periode tahun 2022 s.d. 2025:

Tabel 71 Perbandingan Target dan Capaian Indikator Kinerja (IK-15) 2022-2025

Indikator Kinerja	2022		2023		2024		2025	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)	-	-	80	100	100	95	97	100

BENCHMARK CAPAIAN KINERJA DENGAN UPT LAINNYA

Apabila dibandingkan dengan Balai Monitor SFR Kelas II Banjarmasin, didapat hasil sebagai berikut:

Tabel 72 *Benchmark* Capaian Kinerja (IK-15) dengan UPT Lain

Indikator Kinerja	UPT Ditjen Infrastruktur Digital	Target %	Capaian %	Keterangan
Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)	Balmon Pontianak	97	103.09	Persentase Capaian Balmon Pontianak dan Balmon Banjarmasin sama-sama 100%
	Balmon Banjarmasin	97	103.09	

Dari tabel di atas didapatkan data bahwa target Nilai UAKPA Tahun 2025 sebesar 97, dimana kedua UPT realisasi sama-sama 100 dan nilai capaiannya 103,09%.

Tercapainya target Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan (UAKPA) pada Balai Monitor SFR Kelas II Pontianak memberikan dampak positif bagi masyarakat karena mencerminkan terselenggaranya pengelolaan anggaran negara secara

tertib administrasi, transparan dan akuntabel, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan dan pertanggungjawaban. Kualitas pelaporan yang andal mendukung ketepatan pengambilan keputusan dalam pengalokasian sumber daya, meminimalkan risiko kesalahan pencatatan dan potensi penyimpangan, serta meningkatkan efektivitas pemanfaatan anggaran dalam mendukung penyelenggaraan layanan pengelolaan dan pengawasan spektrum frekuensi radio. Pada akhirnya, hal tersebut berkontribusi terhadap peningkatan kualitas layanan publik, penguatan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja instansi pemerintah, serta optimalisasi manfaat program dan kegiatan yang dirasakan secara lebih luas dan berkelanjutan.

Implementasi budaya kerja BerAKHLAK dalam pencapaian target Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan (UAKPA) diwujudkan melalui penerapan enam unsur utama di Balai Monitor SFR Kelas II Pontianak, yaitu:

- Berorientasi Pelayanan, dengan menyusun dan menyampaikan laporan keuangan tepat waktu, jelas dan responsif terhadap kebutuhan informasi pemangku kepentingan;
- Akuntabel, dengan memastikan setiap transaksi didukung bukti yang sah, dapat ditelusuri, serta dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan;
- Kompeten, dengan meningkatkan ketelitian, pemahaman regulasi dan penguasaan aplikasi pelaporan melalui pembelajaran berkelanjutan;
- Harmonis, dengan membangun koordinasi yang efektif antara pengelola keuangan, pejabat terkait dan unit pendukung agar proses rekonsiliasi berjalan lancar;
- Loyal, dengan menjaga kepatuhan pada kebijakan pemerintah, menjaga kerahasiaan data, serta konsisten mendukung tujuan organisasi; dan
- Adaptif, dengan cepat menyesuaikan diri terhadap perubahan regulasi, sistem maupun dinamika operasional sehingga kualitas data dan konsistensi laporan tetap terjaga.

Melalui penerapan enam unsur utama tersebut secara konsisten, kualitas pelaporan keuangan menjadi lebih andal, risiko kesalahan maupun ketidaksesuaian dapat diminimalkan, dan pencapaian Nilai Kualitas Pelaporan UAKPA dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

B. KINERJA LAINNYA

I. LAYANAN ADMINISTRASI KETATAUSAHAAN

Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan layanan monitoring, pengukuran, inspeksi, dan penertiban penggunaan spektrum frekuensi radio serta penanganan gangguan frekuensi radio di wilayah Kalimantan Barat, yang merupakan tugas dan fungsi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Pontianak, diperlukan dukungan layanan administrasi yang efektif guna menunjang pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

Salah satu bentuk dukungan administrasi tersebut adalah layanan ketatausahaan yang mencakup pengelolaan dan pengagendaan surat masuk maupun surat keluar yang berasal dari lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital, jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, pemerintah kabupaten/kota di wilayah Provinsi Kalimantan Barat, serta para penyelenggara dan pengguna spektrum frekuensi radio.

- ✓ Surat masuk selama periode bulan Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 sebanyak 460 surat.
- ✓ Surat keluar selama periode bulan Januari 2025 sampai dengan Desember 2025 sebanyak 320 surat.
- ✓ Surat Tugas sebanyak 223 surat.
- ✓ SK sebanyak 38 surat.

II. LAYANAN PENGELOLAAN BMN

Dokumen pengelolaan BMN sesuai aturan yang berlaku memiliki target sebanyak 3 laporan di tahun 2025 yaitu Laporan BMN Semester I TA. 2025 dengan nomor 161.1/Balmon.61/PL.06.06/07/2025, tanggal 31 Juli 2025 perihal Penyampaian Laporan Pengguna Barang (LPB) Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Pontianak Semester I TA 2025, Laporan BMN Semester II TA. 2025 dengan nomor 033/Balmon.61/PL.06.06/01/2025, tanggal 30 Januari 2025 perihal Penyampaian Laporan Pengguna Barang (LPB) Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Pontianak Semester II dan Tahunan TA 2025. Laporan BMN TA. 2025 (*Audited*) dengan nomor 151/Balmon.61/PL.06.06/05/2025, tanggal 04 Mei 2026 perihal Penyampaian Laporan Pengguna Barang (LPB) Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Pontianak TA 2025 (*Audited*).

Pembuatan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) yang dilaksanakan pada tahun 2025 untuk pelaksanaan di tahun 2027 telah diusulkan berdasarkan Nota Dinas Kabalmon nomor 180/Balmon.61/PL.06.01/08/2025 tanggal 25 Agustus 2025 yang meliputi tentang rencana Pemeliharaan dan Pengadaan di Tahun 2027.

Di Tahun 2025 telah melakukan Pelaporan Pengawasan dan Pengendalian (WASDAL) semester 1 tahun 2025 dengan Nota Dinas nomor 133/Balmon.61/PL.07.04/07/2025 tanggal 03 Juli 2025 Perihal Laporan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara Semester I Tahun 2025 melalui aplikasi SIMAN, dan Nota Dinas nomor 019/Balmon.61/PL.07.04/01/2026 tanggal 15 Januari 2025 Perihal Laporan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara Semester II dan Tahunan Tahun 2025, melalui Aplikasi SIMAN v2.

III. LAYANAN PENATAUSAHAAN KEPEGAWAIAN

Pada tahun 2025 Balai Monitor Spektrum Frekuensi radio Kelas II Pontianak memiliki sumber daya manusia sejumlah 41 Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 2 tenaga Non-ASN Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP).

Kenaikan Pangkat dan Gaji Berkala

Pada Tahun Anggaran 2025 terdapat 15 (lima belas) pegawai Balai Monitor SFR kelas II Pontianak yang memperoleh Kenaikan Gaji Berkala (KGB) dan terdapat 2 (dua) pegawai yang memperoleh Kenaikan Pangkat (KP), adapun data nama pegawai yang memperoleh KGB dan KP adalah sebagai berikut:

Tabel 73 Data Kenaikan Gaji Berkala (KGB) Pegawai TA. 2025 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Pontianak

NO.	NAMA / NIP	GOL / RUANG	TMT	MASA KERJA
1	Ade Kurniawan, S.T., M.T. NIP. 198205072005021001	Penata Tingkat I / (III/d)	1 Februari 2025	18 Tahun 00 Bulan
2	Syarif Muhammad Faisal, S.T. NIP. 198203052005021002	Penata / (III/c)	1 Februari 2025	18 Tahun 00 Bulan
3	Rivan Achmad Nugroho, S.T. NIP. 199604302019021003	Penata Muda Tk. I / (III/b)	1 Februari 2025	06 Tahun 00 Bulan
4	Ikbal Mawaldi, S.T. NIP. 199308232019021006	Penata Muda Tk. I / (III/b)	1 Februari 2025	06 Tahun 00 Bulan

5	Khusnul Karomah, A. Md. NIP. 199711052019022001	Pengatur Tk. I / (II/d)	1 Februari 2025	9 Tahun 00 Bulan
6	Endang Subiastuti, S. AP. NIP. 196809081994032003	Penata Tingkat I / (III/d)	1 Maret 2025	26 Tahun 00 Bulan
7	Benny Barasila NIP. 197409162006041001	Penata Muda / (III/a)	1 April 2025	14 Tahun 00 Bulan
8	Subandi Aria Putra NIP. 197506272009121001	Pengatur Tk. I / (II/d)	1 Mei 2025	21 Tahun 00 Bulan
9	Sunardi NIP. 197108161991031003	Penata Tingkat I / (III/d)	1 September 2025	30 Tahun 00 Bulan
10	Kiki Ratna Noviansari, S.T., M.Ak. NIP. 198211052006022001	Pembina / (IV/a)	1 Oktober 2025	18 Tahun 00 Bulan
11	Shulma Jatiawandari, S. Kom. NIP. 19940411202312040	IX	1 Oktober 2025	2 Tahun 00 Bulan
12	Mujiyo, S. Sos NIP. 197210142007011002	Penata / (III/d)	1 November 2025	16 Tahun 00 Bulan
13	Indra Rachman, S.E. NIP. 198306042009121004	Penata Tingkat I / (III/d)	1 Desember 2025	16 Tahun 00 Bulan
14	Muhammad Zamhur, S.E. NIP. 198809052009121001	Penata / (III/c)	1 Desember 2025	14 Tahun 00 Bulan
15	Wawan Kurnawan, A. Md. NIP. 198506022009121001	Penata / (III/c)	1 Desember 2025	14 Tahun 00 Bulan

Tabel 74 Data Kenaikan Pangkat (KP) Pegawai TA. 2025 Balai Monitor
Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Pontianak

NO	NAMA / NIP	GOL / RUANG	TMT	MASA KERJA
1	Mujiyo, S. Sos NIP. 197210142007011002	Penata / (III/d)	1 Oktober 2025	15 Tahun 11 Bulan

Tabel 75 Data Kenaikan Pangkat sekaligus Kenaikan Jabatan Pegawai TA. 2025 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Pontianak

NO	NAMA / NIP	GOL /RUANG	TMT / MASA KERJA	JABATAN BARU
1	Wawan Kurnawan, A. Md. NIP. 198506022009121001	Penata / (III/c)	1 Juni 2025 / 13 Tahun 06 Bulan	Pengendali Frekuensi Radio Penyelia

Kendala dalam bidang kepegawaian

Formasi Jabatan yang tercantum dalam Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 290 Tahun 2025 mengenai Peta Jabatan di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan *Bezzeting* dan Analisis Beban Kerja (ABK) pada Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Pontianak Tahun 2025. Akibatnya, terdapat kendala dalam peluang perpindahan jabatan dari jabatan pelaksana ke jabatan fungsional lainnya yang disebabkan oleh keterbatasan dalam peta jabatan tersebut.

IV. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI BALMON PONTIANAK

Penerapan manajemen risiko di Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Pontianak dilakukan sebagai upaya mendukung tata kelola organisasi yang efektif dan akuntabel dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan pengendalian spektrum frekuensi radio. Manajemen risiko diterapkan melalui identifikasi, analisis, mitigasi, serta pemantauan terhadap potensi risiko yang dapat memengaruhi pencapaian target kinerja dan pelaksanaan layanan di lingkungan kerja Balmon Pontianak.

Tabel 76 Penerapan Manajemen Risiko di Balmon Pontianak

No	Target Kinerja	Potensi Kejadian / Kendala	Penyebab	Dampak	Strategi Pengendalian dan Mitigasi Risiko
1	Presentase (%) Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring dari Stasiun Monitor Frekuensi Radio di UPT	Perangkat monitoring tidak dapat berfungsi	Perangkat using atau teknologinya tidak <i>Update</i> , kualitas jaringan internet kurang mumpuni pada <i>site</i> monitoring jarak jauh	Penurunan Kinerja	Melakukan pemeliharaan dan Kalibrasi rutin, menggunakan teknologi terbaru serta mengevaluasi lokasi penempatan antena perangkat
2	Presentase (%) Tindak lanjut verifikasi <i>site</i> ISR <i>Microwave link</i> yang tidak sesuai (PrimaAksi)	Data <i>site</i> ISR tidak sesuai dengan kondisi lapangan	Perbedaan koordinat, elevasi, arah antenna atau parameter teknis, adanya kesalahan input data oleh penyelenggara atau vendor	Penurunan Reputasi	Melakukan verifikasi lapangan secara periodik menerapkan fitur validasi otomatis di system PrimaAksi
3	Presentase (%) Tersedianya Data Hasil Pengukuran Kualitas Layanan	Hasil pengukuran tidak mencerminkan kondisi layanan yang sebenarnya	Petugas kurang mengetahui cara mengoperasikan alat ukur	Penurunan Kinerja	Ulangi pengukuran jika ada anomali, petugas mengikuti pelatihan secara berkala
4	Presentase (%) Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio	Gangguan terjadi Kembali setelah ditangani	Pelaku gangguan mengulangi kesalahan yang sama	Penurunan Reputasi	Melakukan monitoring berkala pasca-penanganan dan menerapkan sanksi administrative atau hukum sesuai pelanggaran
5	Nilai Kinerja Anggaran Balai Monitor Spektrum	Deviasi Rencana Penarikan Dana (RPD) terlalu besar	Adanya efisiensi kebijakan Pemerintah	Penurunan Kinerja	Melakukan identifikasi dan evaluasi secara berkala rencana penarikan dana

	Frekuensi Radio Kelas II Pontianak Tahun 2025				
6	Presentase (%) Pemeriksaan Stasiun Radio	Stasiun radio tidak memiliki izin atau menggunakan frekuensi ilegal	Operasi tanpa izin (illegal) atau izin sudah kedaluwarsa	Penurunan Kinerja	Melakukan inspeksi dan validasi di lapangan secara berkala
7	Presentase (%) Tingkat Kepatuhan Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Digital	Sanksi administratif pada pengguna spektrum frekuensi radio / pelaku usaha	Masih adanya penggunaan perangkat tanpa sertifikat SDPPI	Penurunan Kinerja	Inspeksi dan penegakan hukum terhadap pelanggar

V. PENGHARGAAN DAN PRESTASI

Pada tahun 2025, salah satu pegawai Balai Monitor SFR Kelas II Pontianak, Miftahurrohman, S.T., berhasil meraih predikat Prestasi Istimewa Peringkat II pada Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Latsar CPNS) Angkatan III Tahun 2025. Prestasi tersebut mencerminkan komitmen Balai Monitor SFR Kelas II Pontianak dalam pengembangan sumber daya manusia yang kompeten, profesional, dan berintegritas guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

C. REALISASI ANGGARAN

Pada Tahun 2025, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Pontianak melaksanakan pengelolaan anggaran melalui dua kode satuan kerja, yaitu Satker lama dengan kode 654137 dan Satker baru dengan kode 694713, sebagai dampak dari restrukturisasi organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital (DJID). Meskipun terjadi restrukturisasi organisasi, pelaksanaan anggaran tetap berjalan secara terkendali dan berorientasi pada hasil.

Pagu Anggaran tahun 2025 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Pontianak sebesar **Rp4.803.479.000,00** dengan realisasi sebesar **Rp4.803.453.048,00** atau 100% (654137) dan pagu **Rp6.400.588.000,00** dengan realisasi **Rp6.342.823.597,00** atau 99,10 % (694713) sedangkan rincian anggaran dan realisasi belanja sebagai berikut:

Tabel 77 Pagu dan Realisasi per Jenis Belanja Tahun 2025

Mata Anggaran	Kode Satker 654137			Kode Satker 694713		
	Pagu Anggaran	Realisasi	%	Pagu Anggaran	Realisasi	%
Belanja Pegawai	2.011.302.000	2.011.288.136	100	1.998.100.000	1.976.884.756	98,94
Belanja Barang	2.792.177.000	2.792.164.912	100	3.900.888.000	3.865.423.386	99,09
Belanja Modal				501.600.000	500.515.455	99,78
Total	4.803.479.000	4.803.453.048	100	6.400.588.000	6.342.823.597	99,10

Secara umum, tingkat penyerapan anggaran pada Satker Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Pontianak Tahun Anggaran 2025 menunjukkan capaian yang sangat baik. Kondisi tersebut mencerminkan kesungguhan satuan kerja dalam melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel guna mendukung pencapaian sasaran kinerja organisasi.

Optimalisasi realisasi anggaran yang telah dicapai menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan, termasuk penyelesaian kewajiban pembayaran, dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan kerja dan alokasi anggaran yang telah ditetapkan. Hal ini sekaligus menggambarkan kemampuan satuan kerja dalam menjaga kesinambungan pelaksanaan kegiatan secara tepat waktu dan terukur.

Pelaksanaan anggaran Tahun 2025 juga dihadapkan pada adanya dinamika kelembagaan sebagai dampak restrukturisasi organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Meskipun demikian, kondisi tersebut tidak menghambat pelaksanaan program dan pengelolaan anggaran, melainkan menjadi bagian dari proses penguatan tata kelola organisasi dan pengelolaan keuangan yang lebih adaptif, akuntabel, dan berorientasi pada hasil kinerja.

LAKIN 2025



BAB IV

PENUTUP



BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO

KELAS II PONTIANAK

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Tahun 2025 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Pontianak disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pengawasan dan pengendalian spektrum frekuensi radio serta perangkat telekomunikasi di wilayah Kalimantan Barat. Melalui berbagai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2025, Balmon Pontianak berupaya menjaga kualitas layanan pengawasan secara profesional, efektif, dan akuntabel guna mendukung terciptanya pemanfaatan spektrum frekuensi radio yang tertib, aman, dan berkelanjutan.

Secara umum, capaian kinerja Balmon Pontianak menunjukkan hasil yang baik, dengan seluruh indikator kinerja dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 berhasil direalisasikan sesuai target. Capaian tersebut mencerminkan komitmen dan sinergi seluruh pegawai dalam menjalankan tugas pengawasan, pengendalian, penanganan gangguan frekuensi radio, serta pelayanan publik secara optimal di tengah perkembangan teknologi telekomunikasi dan digital yang terus berkembang.

Sebagai langkah peningkatan kinerja di masa mendatang, Balmon Pontianak akan terus memperkuat kualitas tata kelola organisasi melalui peningkatan koordinasi dengan instansi terkait, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi pengawasan yang lebih modern, serta optimalisasi pelayanan kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Tahun 2025 ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang transparan dan akuntabel mengenai pelaksanaan tugas dan capaian Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Pontianak sekaligus menjadi bahan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan dalam mendukung pengelolaan spektrum frekuensi radio yang tertib, efisien, andal, dan berdaya guna.

LAKIN 2025

LAMPIRAN



KOMDIGI
Kementerian Komunikasi dan Digital
Republik Indonesia



**Direktorat Jenderal
Infrastruktur Digital**



**BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO
KELAS II PONTIANAK**

LAMPIRAN

DOKUMENTASI KEGIATAN

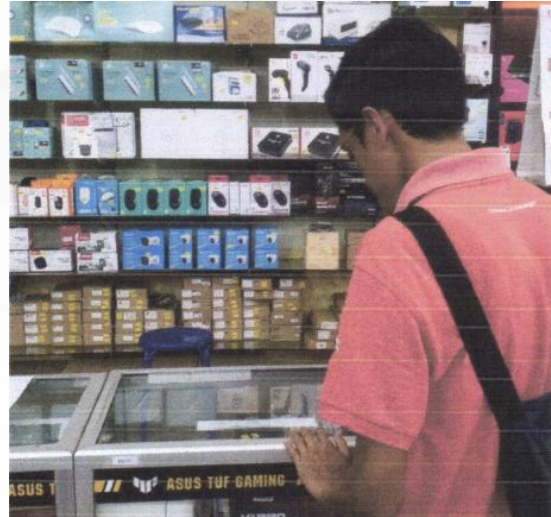
1. OBSERVASI DAN MONITORING PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO





2. PENGAWASAN ALAT/PERANGKAT TELEKOMUNIKASI





3. PENGUKURAN PARAMETER TEKNIS STASIUN RADIO



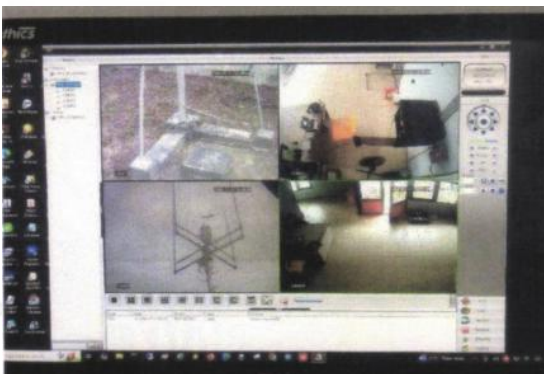


4. INSPEKSI/VALIDASI IZIN STASIUN RADIO (ISR) MW LINK DENGAN CARA *REMOTE SITE*, *OPEN SHELTER* DAN KEGIATAN VERIFIKASI KOORDINAT STASIUN RADIO





5. INSPEKSI, PEMELIHARAAN STASIUN RADIO/TRANSPORTABLE





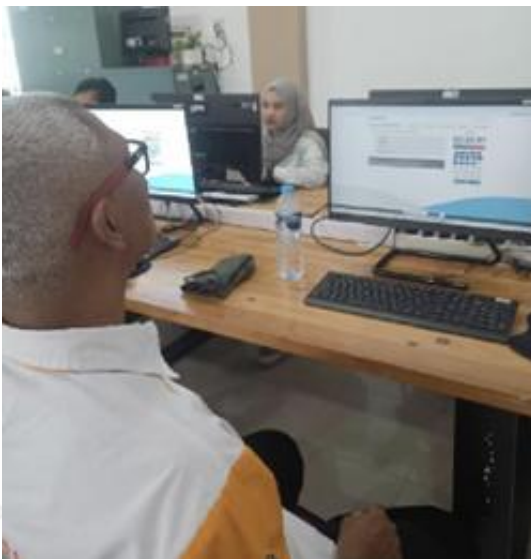
6. KEGIATAN PENERTIBAN, PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

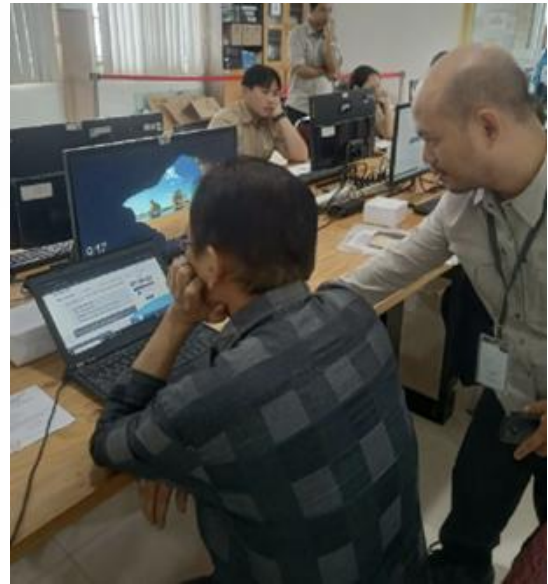
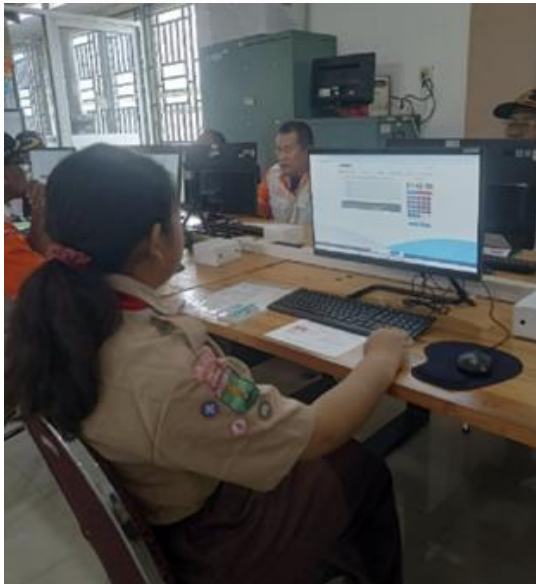






7. UJIAN NEGARA AMATIR RADIO





8. PEMANTAUAN FREKUENSI RADIO DALAM RANGKA EVENT PENTING CAP GO MEH 2025



9. POSKO MONITORING EVENT PENTING DALAM RANGKA HARI RAYA IDUL FITRI 1446H





10. POSKO MONITORING SPEKTRUM FREKUENSI RADIO DAN ALAT/PERANGKAT TELEKOMUNIKASI EVENT PENTING DALAM RANGKA NATAL 2025 DAN TAHUN BARU 2026





11. PENGUKURAN KUALITAS LAYANAN INFRASTRUKTUR DIGITAL





12. RANGKAIAN KEGIATAN MEMPERINGATI HARI BHAKTI POSTEL KE 80





13. UPACARA DAN PERLOMBAAN DALAM RANGKA MEMERIAHKAN HARI KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA KE 80



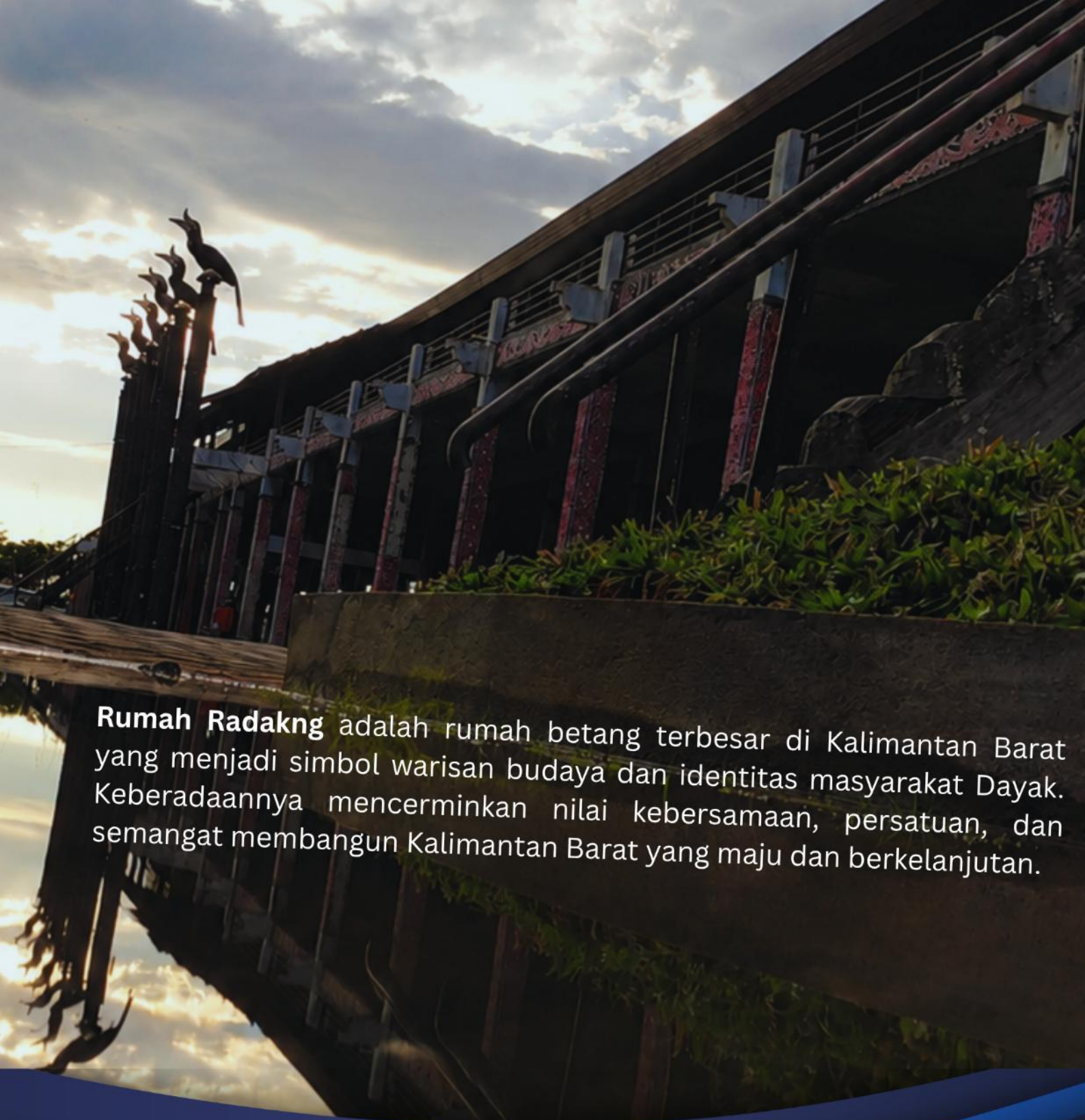


14. SOSIALISASI PENGAWASAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO DALAM Mendukung TRANSFORMASI DIGITAL DAN KONEKTIVITAS



15. MEDICAL CHECK-UP PEGAWAI





Rumah Radakng adalah rumah betang terbesar di Kalimantan Barat yang menjadi simbol warisan budaya dan identitas masyarakat Dayak. Keberadaannya mencerminkan nilai kebersamaan, persatuan, dan semangat membangun Kalimantan Barat yang maju dan berkelanjutan.

BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II PONTIANAK

Jl.A Yani II Arteri Supadio km 13
Telp/Fax (0561) 575979



KOMDIGI
Kementerian Komunikasi dan Digital
Republik Indonesia



**Direktorat Jenderal
Infrastruktur Digital**